

# TERNYATA BISA

**Cerita Pembangunan  
Air Minum dan Sanitasi  
Indonesia**



# TERNYATA BISA

Cerita Pembangunan  
Air Minum dan  
Sanitasi Indonesia

# Kata Pengantar

Pelaku pembangunan air minum dan sanitasi di Indonesia perlu semakin optimis untuk mencapai target Universal Access 2019. Seperti judul buku ini, "Ternyata Bisa", kita telah berhasil meningkatkan akses air minum dan sanitasi hampir 2 kali lipat dari kondisi tahun 2000. Keberhasilan ini tentu saja berkat kerja keras dari seluruh pelaku yang patut untuk diteruskan dan disebarluaskan. Sebagai contoh, strategi advokasi yang digunakan untuk menggerakkan pelaku mulai dari kepala negara, menteri, kepala daerah sampai tokoh masyarakat perlu dipertahankan. Dalam hal perubahan perilaku hidup bersih dan sehat, anak-anak merupakan agen perubahan yang efektif bagi lingkungannya. Selain itu, dalam hal koordinasi, Pokja AMPL dirasakan cukup berhasil dalam mengatasi masalah klasik koordinasi, khususnya pada pembangunan air minum dan sanitasi yang bersifat lintas sektor dan pelaku. Dari semua pengalaman yang kita miliki ini, mencapai target Universal Access bukanlah hal yang tidak mungkin.

Buku "Ternyata Bisa" ini sengaja dikemas secara kasual agar mudah dipahami oleh semua pelaku pembangunan air minum dan sanitasi. Keberhasilan pembangunan air minum dan sanitasi selama 10 tahun terakhir ini terbagi ke dalam 22 topik yang menarik. Selain itu, buku ini menampilkan banyak foto, ilustrasi dan diagram banyak agar pembaca dapat lebih mudah memahami setiap topik yang disampaikan.

Buku ini merupakan bagian dari kerjasama Bappenas dan Unicef sebagai salah satu bentuk advokasi pembangunan air minum dan sanitasi. Selain itu, buku ini terselesaikan berkat bantuan berbagai pelaku pembangunan air minum dan sanitasi.

Akhir kata, semoga buku ini menambah pengetahuan pembaca, dan mendukung percepatan peningkatan akses air minum dan sanitasi serta menginspirasi pelaku pembangunan di sektor lainnya.

Jakarta, Juni 2015



Gunilla Olsson  
Perwakilan UNICEF  
di Indonesia



Dr. Ir. Dedy Supriadi Priatna, MSc.  
Deputi Bidang Sarana dan Prasarana,  
Kementerian PPN/Bappenas

## **Ternyata Bisa**

### **Cerita Pembangunan Air Minum dan Sanitasi**

ISBN 978-979-17112-9-6

#### **Diterbitkan Oleh:**

Sekretariat Kelompok Kerja AMPL

Jl. Lembang No. 35, Menteng

Jakarta - Indonesia 10310

Telp/fax (62-21) 31904113 / 31903909

#### **Pengarah:**

Nugroho Tri Utomo (BAPPENAS); Claire Quillet (UNICEF)

#### **Editor:**

Nurul Wajah Mujahid, Ira Lubis, Aldy Mardikanto, Kania Mayang, Cheerli

#### **Narasumber:**

Laisa Wahanudin, Eko Widji Purwanto, Fany Wedahuditama, Kania Mayang (BAPPENAS); Lilik Trimaya (UNICEF); Dadang Sumantri Muchtar, Wilfred Purba, Danny Sutijiono, Sjukrul Amin, Susmono, Handi Legowo, Catur Adi Nugroho, (Mitra Pokja AMPL); Syarif Puradimaja, Alwis Rustam, Bachtarudin Gunawan, Ida Bagus Hendra Gupta, Hony Irawan (USDP); Jose Rizal Zein (Akkopsi); Agus Sunara (Perpamsi); Gary Swisher, Sofyan Iskandar, Hery Widjanarko, Dorman Saragih (Waspola Facility); Isabel Blacket, Devriandi Setiawan, Rahmi Kasri, Budi Darmawan (WSP); Foort Bustraan (IUWASH), Hendra Murtidjaja (NAWASIS); Dewa Alit Setiarsa (BaliFokus); Winarko Hadi, Endro Adinugroho, Laksmi Wardhani (IATPI); Sekretariat Pokja AMPL.

#### **Foto:**

Koleksi Pokja AMPL, Koleksi UNICEF, Koleksi Qipra, dan sumber-sumber lain.

#### **Penyusun:**

Qipra Galang Kualita, yang terdiri dari: Rudy Yuwono, Isna Marifa, Deasy Sekar T. Sari, Astryd Viandila Dahlan (Konsep dan Tulisan); M. Taufik S dan M. Zakki (Ilustrasi, Tata Letak, dan Desain Grafis).

01	.....	Sepakati alasan
08	.....	Pengaruh yang berpengaruh
16	.....	Satukan yang berbeda
24	.....	Dorong lebih cepat
35	.....	Strategiskan langkah bersama
43	.....	Tampilkan pimpinan
51	.....	Peluang bagi semua
58	.....	Perbaiki perilakunya juga
69	.....	Dorong layani diri sendiri
78	.....	Libatkan warga agar berlanjut
89	.....	Tengok rumput tetangga
99	.....	Libatkan anak-anak
107	.....	Gandeng swasta
114	.....	Atur aturannya
122	.....	Kendalikan setiap bantuan
132	.....	Buat seramai-ramainya
143	.....	Suburkan gagasan baru
154	.....	Dengar suara perempuan
160	.....	Siapkan manusianya
170	.....	Temukan sumber dana lain
178	.....	Temani media
186	.....	Pacu dengan penghargaan
192	.....	Ucapan terima kasih

# Ternyata Bisa

Setelah belasan tahun berupaya, kita akhirnya berhasil menunjukkan peningkatan akses air minum dan sanitasi yang berarti. Data menunjukkan bahwa kita akan mencapai dan bahkan melewati target Millenium Development Goals. Kita berhasil membalikkan statistik akses air minum dan sanitasi, dari 62 persen rumah tangga tidak mempunyai akses air menjadi hampir 70 persen memiliki akses di 2014, serta dari 75 persen rumah tangga tidak mempunyai akses sanitasi menjadi 60 persen memiliki akses di 2014.

Kita TERNYATA BISA! Bisa menciptakan momentum peningkatan akses, bisa mempercepat pengembangan layanan air minum dan sanitasi. Kita ternyata bisa melibatkan masyarakat dan swasta, serta bisa menggalang kolaborasi antara pihak-pihak yang sebelumnya bekerja sendiri-sendiri. Kita ternyata bisa mengajak para tokoh berpengaruh untuk ikut menyuarakan pesan hidup bersih dan sehat. Kita ternyata bisa menyusun strategi bersama yang melandasi kerja bersama pula.

Buku TERNYATA BISA ini berisikan benang merah dari pembelajaran dan pengalaman dalam pembangunan air minum dan sanitasi di Indonesia. Penyusunan buku ini didasarkan pada tema-tema yang menarik, antara lain Sepakati Alasan, Tampilkan Pimpinan dan Libatkan Anak-anak. Sepakati Alasan mengangkat tentang pentingnya para pelaku menyepakati alasan bersama untuk bertindak. Tampilkan Pimpinan mengkonfirmasi bahwa komitmen pimpinan akan menular pada jajaran dari organisasi yang dipimpinya. Libatkan Anak-anak mengangkat pesan tentang peran penting anak-anak sebagai agen perubahan perilaku. Pembelajaran dan pengalaman tersebut membuat kita tidak perlu ragu lagi dalam mengejar target Universal Access air minum dan sanitasi di tahun 2019. Buku TERNYATA BISA ini juga diharapkan dapat menginspirasi pelaku pembangunan di sektor lainnya yang sedang mencari terobosan dan pendekatan baru.



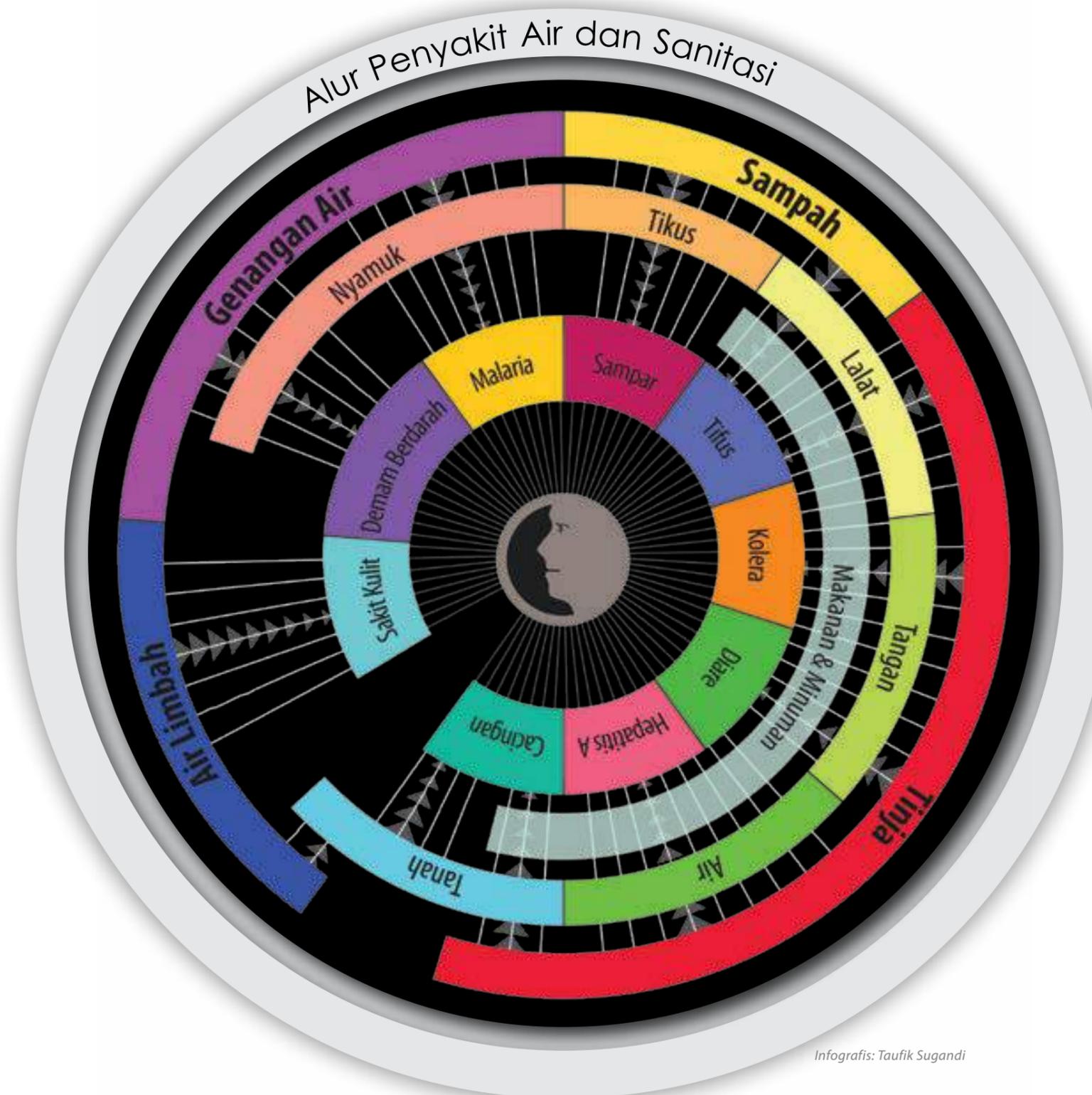
# Sepakati Alasan 1

Kita butuh alasan kuat untuk bertindak. Semakin yakin kita terhadap alasan tersebut, semakin keras juga kita berjuang. Demikian halnya dengan mereka yang terlibat dalam pembangunan sektor air minum dan sanitasi. Beberapa hal sudah disepakati sebagai alasan kuat dibutuhkannya percepatan pembangunan air minum dan sanitasi. Mulai dari alasan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, alasan kelestarian lingkungan dan alasan ekonomi, maupun demi alasan harga diri dan citra kawasan. Demikian juga adanya target *Millenium Development Goals* (MDGs). Berbagai kajian sudah dilakukan untuk memperjelas alasan-alasan tersebut.

Dampak kesehatan akibat keterbatasan layanan air minum dan sanitasi pernah benar-benar terjadi. Salah satunya terjadi di Sepatan, Kabupaten Tangerang pada tahun 2007. Kejadian Luar Biasa (KLB) diare saat itu telah menyebabkan 3 orang meninggal dan lebih dari 1.000 orang harus dirawat. Yang memprihatinkan, ternyata kasus KLB diare sebelumnya juga pernah terjadi di tempat yang sama di tahun 2005. Korbannya lebih banyak, yaitu 19 orang meninggal. Kedua kasus itu diyakini disebabkan oleh buruknya kualitas air yang dikonsumsi masyarakat. Air sumur yang digunakan untuk mengolah makanan dan minuman sudah tercemar oleh air limbah domestik. Demikian pula air sungai yang digunakan untuk mandi, mencuci, dan memasak. KLB diare selalu mengingatkan pihak-pihak berkepentingan tentang perlunya segera dikembangkan layanan air minum dan sanitasi yang lebih baik.



foto: Koleksi Unicef



Pemahaman terhadap alasan-alasan terkait kesehatan manusia merupakan pendorong utama dilakukannya pembangunan sektor air minum dan sanitasi. Air limbah, gangguan air, sampah dan tinja, ditambah dengan kelangkaan air dan kondisi lingkungan yang sangat buruk dapat menimbulkan banyak gangguan kesehatan manusia. Perilaku hidup yang tidak sehat dan bersih juga meningkatkan potensi terjadinya gangguan tersebut. Diagram ini menunjukkan berbagai penyakit yang dapat menimpa manusia akibat aspek sanitasi (air limbah, gangguan air, sampah dan tinja) yang tidak terkelola dengan baik. Sebagian mempengaruhi manusia secara langsung, sebagian lagi membutuhkan agen perantara untuk dapat masuk ke tubuh manusia.

Semua sepakat bergerak lebih cepat untuk mengejar target ke-7 *Millenium Development Goals* (MDGs) – pengurangan ketiadaan akses air minum dan sanitasi. MDGs dideklarasikan dalam Konferensi Tingkat Tinggi Milenium oleh 189 negara anggota PBB di New York pada tahun 2000. Dengan turut menandatangani deklarasi tersebut, Indonesia berkomitmen untuk mengintegrasikan ke-8 target MDGs ke dalam program pembangunan nasionalnya. Termasuk terhadap peningkatan akses air minum dan sanitasi yang merupakan salah satu sasaran di dalam target ke-7 MDG, tepatnya sasaran 7C yang berbunyi *Halve, by 2015, the proportion of the population without sustainable access to safe drinking water and basic sanitation*. Selain sasaran akses air minum dan sanitasi tersebut, pemerintah Indonesia juga sudah menyatakan bahwa target-target MDGs Indonesia hampir semuanya tercapai.



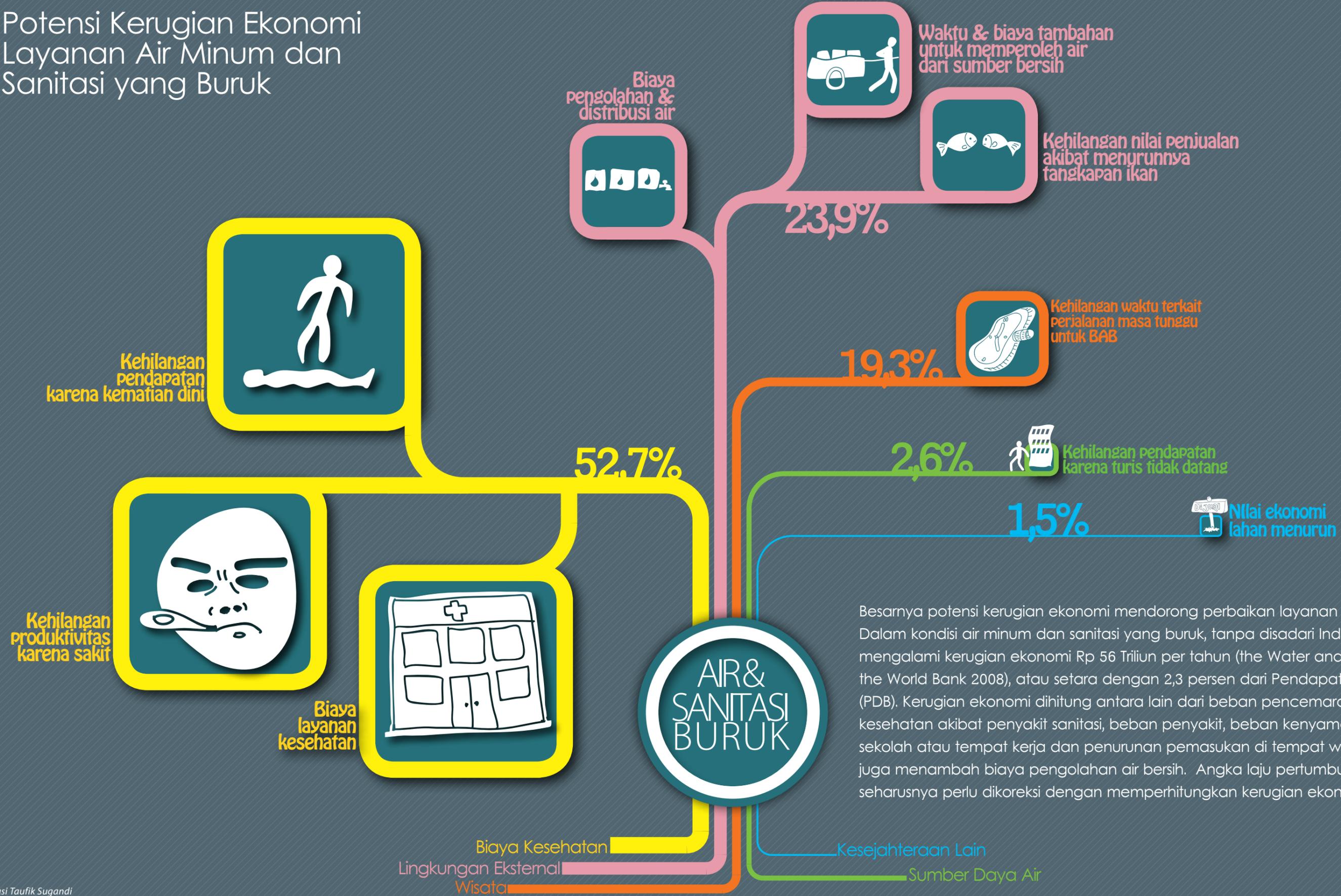
Presiden RI Abdurrahman Wahid (kanan bawah) turut menyepakati the United Nations Millennium Declaration di tahun 2000.



Kesejahteraan dan kesehatan anak merupakan alasan kuat untuk mempercepat pembangunan layanan air minum dan sanitasi. Sanitasi dan perilaku kebersihan yang buruk serta air minum yang tidak aman berkontribusi terhadap tingginya tingkat kematian anak berusia di bawah lima tahun akibat diare. Kasus diare pada anak-anak yang menggunakan air minum dari sumur terbuka tercatat 34 persen lebih tinggi dibandingkan dengan anak-anak yang menggunakan air ledeng.

Alasan kuat lain. Air bersih dibutuhkan juga untuk kebutuhan beribadah. Khususnya bagi pemeluk agama Islam yang membutuhkan air bersih untuk menyucikan diri atau berwudhu sebelum melakukan ibadah shalat.

# Potensi Kerugian Ekonomi Layanan Air Minum dan Sanitasi yang Buruk



Besarnya potensi kerugian ekonomi mendorong perbaikan layanan air minum dan sanitasi. Dalam kondisi air minum dan sanitasi yang buruk, tanpa disadari Indonesia berpotensi mengalami kerugian ekonomi Rp 56 Triliun per tahun (the Water and Sanitation Program, the World Bank 2008), atau setara dengan 2,3 persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Kerugian ekonomi dihitung antara lain dari beban pencemaran air, besarnya biaya kesehatan akibat penyakit sanitasi, beban penyakit, beban kenyamanan lain, absen di sekolah atau tempat kerja dan penurunan pemasukan di tempat wisata. Buruknya sanitasi juga menambah biaya pengolahan air bersih. Angka laju pertumbuhan ekonomi kita seharusnya perlu dikoreksi dengan memperhitungkan kerugian ekonomi ini.

# Pengaruh yang BERPENGARUH

Di manapun selalu ada sosok-sosok berpengaruh. Dengan merangkul mereka secara tepat, program pembangunan dapat berjalan dengan lebih lancar. Kegiatan advokasi dalam sektor air minum dan sanitasi selama ini sudah berhasil mempengaruhi berbagai sosok berpengaruh. Mulai dari kepala negara, menteri, kepala daerah sampai ke tokoh-tokoh masyarakat. Dalam skalanya masing-masing, mereka tergerak untuk menyuarakan komitmen, mengambil kebijakan dan mengerahkan sumber daya yang berada di bawah kendalinya guna memperlancar pengembangan layanan air minum dan sanitasi. Seringkali juga, mereka pada akhirnya menjadi pelaku advokasi berantai bagi kolega-koleganya.



*Dengan upaya advokasi yang baik, seorang pejabat tinggi juga dapat berperan menjadi pelaksana advokasi yang sangat efektif. Termasuk ke para pejabat tinggi lainnya. Peran ini ditunjukkan dengan baik oleh Menteri Pekerjaan Umum saat itu, Djoko Kirmanto dan Walikota Surabaya, Tri Rismaharini dalam acara peringatan Hari Habitat Dunia 2012 di Surabaya.*



Foto : Koleksi Pakja AMPL

Dukungan pimpinan negara diperoleh berkat upaya advokasi yang tepat. Salah satu bentuk dukungannya diwujudkan dalam kesediaan Wakil Presiden RI saat itu, Boediono untuk membuka Konferensi Sanitasi Nasional 2009. Dalam kesempatan ini, Wakil Presiden Boediono meluncurkan program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP). Pesannya jelas, seluruh kota dan kabupaten di Indonesia harus segera mengambil langkah strategis untuk mempercepat pengembangan layanan air minum dan sanitasi di wilayahnya.



Foto : Koleksi Pokja AMPL



Foto : Koleksi Pokja AMPL



Foto : Koleksi Pokja AMPL



Foto : Koleksi Pokja AMPL



Foto : Koleksi Qipra

Peran aktif pimpinan-pimpinan kelurahan dan desa sangat penting dalam mensukseskan kegiatan promosi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di daerah rural. Upaya advokasi harus dilakukan dengan cara yang sesuai. Tidak selalu harus dilakukan secara formal. Foto di atas menunjukkan diskusi informal sebagai bagian upaya advokasi untuk kegiatan *Community-Led Total Sanitation* (CLTS) di Desa Tanjung Tiga, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Setelah menyadari manfaat CLTS, Kepala Desa Tanjung Tiga langsung mendorong seluruh aparat desa untuk membuat jamban di rumahnya masing-masing. Berkat contoh baik itu, desa tersebut mampu mencapai status bebas BABS dalam waktu tiga minggu.

Acara bersama yang menampilkan para pimpinan tertinggi kementerian dan lembaga ini merupakan bukti keberhasilan upaya advokasi antar-kementerian untuk urusan air minum dan sanitasi. Sebelum acara itu berlangsung, para staf sudah saling bertukar informasi tentang pesan-pesan yang ingin disampaikan atasannya. Komunikasi antar-kementerian terjadi sehingga mempermudah koordinasi pelaksanaan kegiatan di kemudian hari. Tampak dalam foto beberapa menteri Kabinet Bersatu saat itu, (Almh.) Endang Rahayu Sedyaningsih (Menteri Kesehatan), Armida Alisjahbana (Kepala BAPPENAS) dan Joko Kirmanto (Menteri Pekerjaan Umum) sedang menjadi narasumber dalam acara *Talkshow KSN 2009* yang dipandu *host* Lula Kamal (kiri).

Banyak cara untuk mempengaruhi sikap dan persepsi para pengambil keputusan. Salah satunya adalah dengan mengajak mereka untuk melihat keberadaan layanan air minum atau sanitasi yang lebih baik di luar negeri. Cara ini seringkali memberi hasil yang baik. Mereka akan tergugah minatnya setelah membandingkan apa yang mereka lihat di tempat kunjungan itu dengan apa yang mereka miliki di daerahnya sendiri. Foto berikut menunjukkan kunjungan banding yang dilakukan beberapa wakil pemerintah daerah ke *Sewage Treatment Plant* (STP) Bunus di Kuala Lumpur, Malaysia.

Ratusan jenis materi komunikasi sudah disiapkan oleh berbagai program untuk mendukung upaya advokasi air minum dan sanitasi. Baik dalam bentuk materi tercetak maupun dalam bentuk materi audiovisual. Gaya dan topik disesuaikan dengan kelompok sasaran masing-masing. Untuk meningkatkan profil kedua sektor ini, disain materi komunikasi dipilih dengan gaya yang modern. Bahasa yang digunakan juga dibuat lebih cerdas, tanpa mengurangi kejelasan pesannya. Materi juga harus dilengkapi dengan foto-foto menarik yang berkualitas tinggi dan infografis yang sangat kreatif.

# Keuntungan Ekonomi Investasi Sanitasi

Dengan melakukan investasi sebesar Rp. 11,2 triliun per tahun, Indonesia berpeluang mencegah kerugian ekonomi sebesar Rp. 56 triliun. Bukan hanya negara, kita semua juga akan diuntungkan. Adanya berbagai keuntungan ekonomi berikut ini merupakan pesan-pesan penting yang harus disampaikan dalam kegiatan advokasi untuk para pengambil keputusan. Penting dicatat bahwa semakin lama kita mengabaikan sanitasi, semakin besar kerugian ekonominya, dan semakin besar pula biaya investasi yang diperlukan

## 1 Meningkatkan ekonomi keluarga;

Akibat buruknya sanitasi, rata-rata keluarga Indonesia kehilangan Rp. 1,25 juta setiap tahun, untuk menutup biaya berobat, perawatan rumah sakit, dan hilangnya pendapatan harian akibat menderita sakit atau harus menunggu keluarga yang sakit. Memperbaiki kondisi sanitasi berarti memberi manfaat ekonomi kepada setiap keluarga Indonesia.

## 2 Meningkatkan produktivitas;

Investasi sanitasi dapat meningkatkan produktivitas sebesar 17%, karena menghindari absensi dari kerja dan sekolah. Kajian menunjukkan bahwa kasus diare mengakibatkan mangkir atau absen dari kerja atau sekolah sebanyak 8 hari per tahun.

## 3 Mencegah pencemaran;

Dengan memperbaiki layanan sanitasi, pencemaran air dapat dihindarkan. Untuk setiap 1 USD yang diinvestasikan untuk sanitasi, kita mencegah pengeluaran sebesar 36 USD untuk pemulihan kualitas air sungai.

## 4 Menggugah tekad masyarakat;

Pengalaman di Indonesia menunjukkan bahwa setiap Rp. 1,- yang dialokasikan pemerintah berhasil menggerakkan investasi dari masyarakat sendiri hingga Rp. 35,-.

## 5 Pengembalian atas investasi;

Secara global, setiap 1 USD yang diinvestasikan untuk pembangunan sanitasi akan memberikan pengembalian atas investasi sebesar 5.5 USD dan untuk pembangunan air minum adalah sebesar 2 USD.



# 3 Satukan yang Berbeda

Ada cara praktis untuk mengatasi mereka-mereka yang cenderung terbiasa bekerja sendiri-sendiri. Satukan mereka dalam satu kelompok dan minta mereka mengerjakan tugas secara bersama-sama. Biarkan mereka berbagi informasi dan bertukar pikiran. **Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL)** dibentuk untuk maksud itu. Wakil-wakil kementerian dan lembaga didudukkan dalam kelompok kerja tersebut agar terjadi pertukaran informasi dan koordinasi di antara mereka. Baik dalam perencanaan dan pelaksanaan, maupun dalam pemantauan dan evaluasi program-program pengembangan layanan air minum dan sanitasi. Pokja serupa juga dibentuk di tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota maupun tingkat kecamatan dan kelurahan.



Ilustrasi : Muhamad Zaki



Foto : Koleksi Pokja AMPL

Bentukan awal Pokja AMPL Nasional sebenarnya sudah dikenal di tahun 1998 sejak dilakukannya penyusunan Dokumen Kebijakan Nasional Pembangunan AMPL-Berbasis Masyarakat. Walau demikian, Pokja AMPL Nasional mulai diformalkan di tahun 2005 sejak ditebitkannya Surat Keputusan (SK) Tim Koordinasi Pembangunan AMPL Tingkat Nasional. Dalam Pokja AMPL, wakil-wakil Bappenas, Kementerian PU, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri melakukan dialog dan sinergi yang lebih baik untuk mengawal dan mempengaruhi proses pembangunan AMPL-BM. Dalam foto di atas tampak wakil-wakil kementerian dan lembaga terkait saat itu, antara lain Direktur Perumahan dan Permukiman Bappenas, Basah Hernowo (tengah) dan Direktur Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Kementerian Pekerjaan Umum, Susmono (kiri) sedang berdiskusi dengan wakil-wakil kementerian lainnya.



Foto : www.ampl.or.id

Pokja AMPL berperan dalam meningkatkan pemahaman dan pengetahuan pihak-pihak berkepentingan di daerahnya terhadap berbagai isu air minum dan sanitasi. Baik melalui penyelenggaraan seminar, lokakarya maupun pelatihan. Salah satunya adalah lokakarya sosialisasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di tahun 2011 kepada wakil-wakil kecamatan di Kota Jayapura, khususnya terkait pengelolaan sampah rumah tangga (Pilar 4 STBM). Acara yang dilakukan di Abepura ini melibatkan para pelaku pengomposan dan daur ulang setempat sebagai instruktur.



Foto : Koleksi Pokja AMPL

Pokja AMPL di tingkat Kabupaten/Kota berperan untuk melakukan koordinasi pelaksanaan program PPSP, selain juga melakukan advokasi sanitasi kepada pihak-pihak berkepentingan di wilayahnya masing-masing. Salah satu tugas awal dari Pokja AMPL di tingkat Kabupaten/Kota adalah mengkoordinasikan penyusunan Buku Putih Sanitasi yang menguraikan karakteristik dan kondisi sanitasi wilayah, termasuk penetapan area sesuai tingkat resiko sanitasinya.

## Dasar Hukum

Keputusan Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas Nomor 38/D.VI/07/2013 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pembangunan Air Minum dan Kesehatan Lingkungan.



## Anggota

- BAPPENAS
- Kementerian Kesehatan
- Kementerian Pekerjaan Umum
- Kementerian Dalam Negeri
- Kementerian Lingkungan Hidup
- Kementerian Keuangan
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Kementerian Kesehatan
- Badan Pusat Statistik



# POKJA AMPL

Pokja AMPL Nasional berfungsi sebagai penggerak advokasi dan sinergi pembangunan AMPL di Indonesia. Keberadaan Pokja AMPL Nasional mampu memperkuat koordinasi dan sinergi antar para pelaku pembangunan sektor air minum dan sanitasi demi mencapai target RPJMN dan MDGs.

## Dukungan

- Lembaga donor
- LSM Internasional
- LSM nasional/daerah
  - Swasta
  - Asosiasi

# POKJA AMPL NASIONAL

## Tim Pengarah



- Memberikan arahan dalam upaya percepatan pencapaian target dan sasaran;
- Mengembangkan dan mengarahkan pelaksanaan pembangunan air minum dan sanitasi dengan sumber pendanaan dalam dan luar negeri



## Anggota

- BAPPEDA
- Dinas Pekerjaan Umum
- Dinas Kesehatan
- Badan Pemberdayaan Masyarakat
- Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Dinas Kehutanan
- Dinas Pendidikan

## Sekretariat

Pelaksana harian:

- Divisi Fasilitas, Koordinasi, dan Kemitraan Pokja AMPL
- Divisi Kemitraan dan Pengelolaan Pengetahuan
- Divisi Pengelolaan dan Administrasi Program

## Fungsi



- Menyiapkan rumusan kebijakan, strategi, dan program;
- Menyiapkan langkah-langkah koordinasi, pengendalian, dan pemantapan pelaksanaan pembangunan;
- Mendukung upaya percepatan pencapaian target dan sasaran RPJMN dan MDGs, PPSP, serta STBM;
- Mendukung perumusan pengembangan dan pengarahannya pelaksanaan pembangunan dengan sumber pendanaan dalam dan luar negeri

# POKJA AMPL DAERAH



## Dukungan

- Perguruan Tinggi
- Lembaga Swadaya Masyarakat
- Asosiasi profesi/perkumpulan
- Media massa cetak atau elektronik
- Tim Penggerak PKK
- Pakar/Tokoh Masyarakat
- Wakil rakyat (anggota DPRD) yang peduli

## Legalitas

SK Gubernur/Bupati/Walikota

# Terbaik: Pokja AMPL Sumatera Barat

Provinsi Sumatera Barat memiliki komitmen cukup tinggi terhadap sektor air minum dan sanitasi. Hal ini tentu tidak terlepas dari peran aktif Pokja AMPL-nya. Pokja AMPL Provinsi Sumatera Barat yang dibentuk di tahun 2004 ini telah banyak mengelola program-program terkait air minum dan sanitasi, antara lain Pamsimas, Sanimas dan STBM. Hasil kerja advokasi, fasilitasi dan dukungan teknis yang mereka lakukan dibuktikan dengan telah terbentuknya Pokja AMPL di seluruh kabupaten/kota Sumatera Barat. Dalam waktu singkat, Pokja AMPL Sumbar berhasil mendorong 18 kabupaten/kota ikut PPSP serta mendampingi kabupaten/kota tersebut dalam menyusun dokumen-dokumen PPSP. Di tahun 2011, Pokja AMPL memfasilitasi ikrar bersama antara gubernur, wakil gubernur, bupati dan walikota seluruh Sumbar untuk meningkatkan koordinasi dan pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan dan percepatan pencapaian tujuan MDGs 2015. Termasuk juga untuk pemenuhan target peningkatan akses air minum dan sanitasi layak di Sumbar. Pokja AMPL Sumbar di tahun 2013 memfasilitasi dilakukannya *Service Delivery Assessment (SDA)* untuk menilai penilaian kinerja layanan air minum dan sanitasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Kegiatan *horizontal learning* dilakukan agar tiap kabupaten/kota dapat belajar dari kabupaten/kota lainnya. Kerja keras Pokja AMPL provinsi tidak luput dari perhatian pihak lain. Pada acara Konferensi Sanitasi dan Air Minum tahun 2013, Pokja AMPL Sumatera Barat dinobatkan sebagai Pokja AMPL dengan kinerja terbaik di Indonesia. Kategori yang dimenangkan adalah Peran Propinsi dalam Konsistensi Peningkatan Capaian Lingkungan.



Pokja AMPL Nasional bertugas untuk meningkatkan kapasitas pokja-pokja AMPL daerah, baik menyangkut aspek kelembagaan, regulasi maupun teknis. Tampak dalam foto, Eko Wiji Purwanto (Kepala Sub-Direktorat Air Minum dan Air Limbah, BAPPENAS) sedang membuka acara Lokalatih Pokja AMPL Kota Bandung yang diprakarsai Pokja AMPL Nasional bersama Waspola Facility.



Sebagai pelaksana harian, sekretariat Pokja AMPL memegang peranan yang sangat penting. Diantaranya adalah melakukan fasilitasi dan koordinasi program serta membantu operasional dalam pelaksanaan kegiatan.

Foto : www.ampl.or.id

Foto : www.ampl.or.id

Foto : www.ampl.or.id

Foto : Koleksi Pokja AMPL

Kita harus berani melakukan terobosan-terobosan cerdas guna memenuhi target yang dinilai berat. Praktek *business as usual* tidak akan mampu mengejar target-target ambisius. Demikianlah yang terjadi dalam pembangunan sanitasi. Guna mengejar target *Millenium Development Goals* (MDGs) terkait akses sanitasi, pemerintah membuat terobosan di tahun 2009 melalui Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP). Pemerintah kabupaten/kota didampingi untuk menyusun rencana strategis pembangunan sanitasi di wilayahnya. Bantuan teknis dan program diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota guna mengimplementasikan rencana strategis tersebut.



# Dorong Lebih Cepat

 **Air Bersih dan Sanitasi dasar**  
67% penduduk dengan akses sumber air bersih  
75% penduduk dengan akses sanitasi dasar berkualitas

 **Air minum**  
70% penduduk dengan akses air minum  
(32% perpipaan 38% non-perpipaan terlindungi)

 **Drainase**  
22.500 Ha  
genangan di 100 kawasan strategis perkotaan hilang

Percepatan pembangunan sanitasi permukiman dilakukan untuk mengejar target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010 – 2014, yang disusun dengan mempertimbangkan target MDGs untuk akses air minum dan sanitasi.

 **Air limbah**  
0% buang Air Besar Sembarangan (BABS)  
5% penduduk dengan sistem terpusat skala kota  
5% penduduk dengan sistem komunal  
90% penduduk dengan sistem setempat yang layak

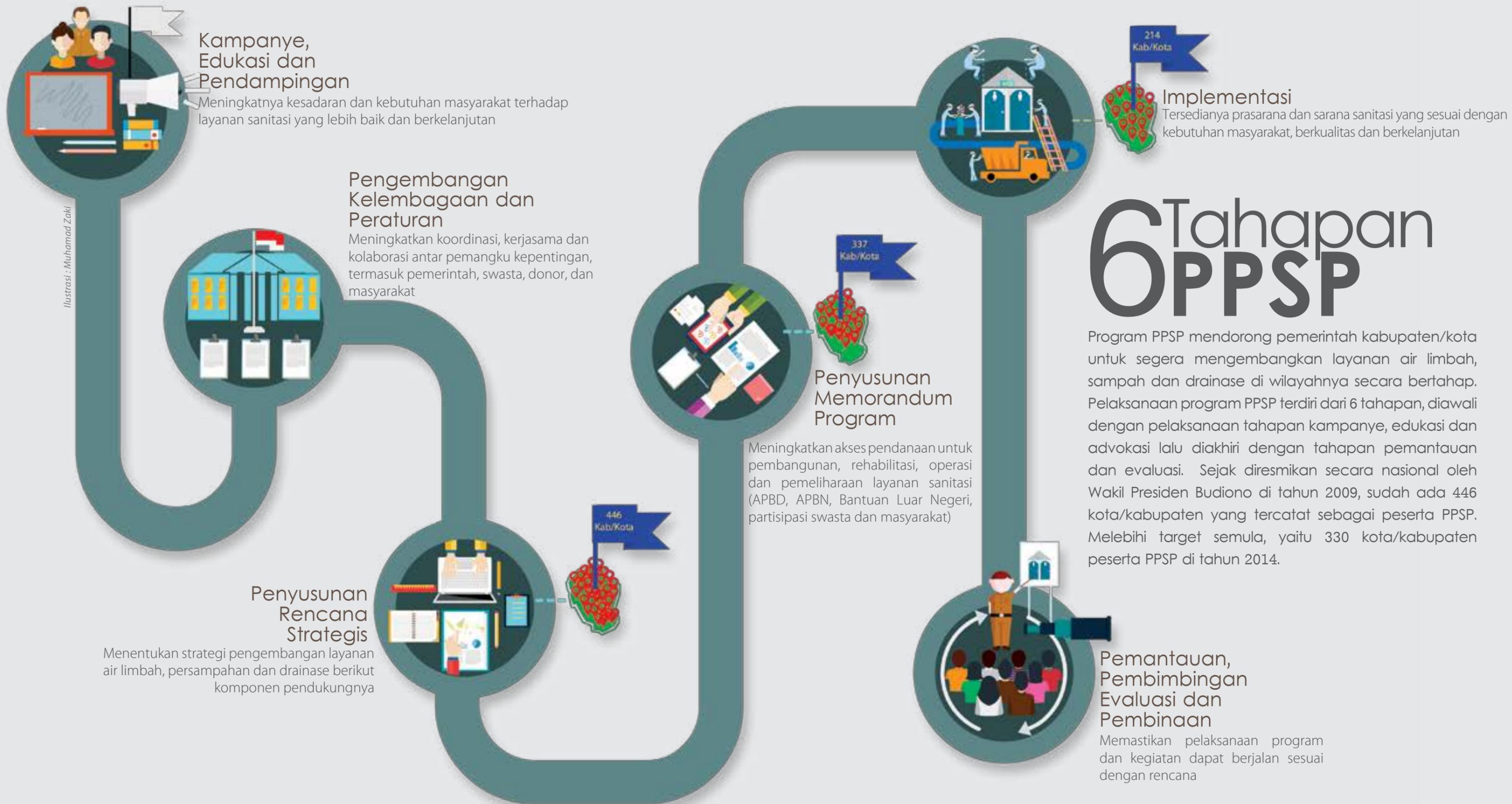
 **Pengelolaan Sampah**  
80% rumah tangga perkotaan dengan akses pengelolaan sampah

**Target  
RPJMN  
2010 – 2014**



Foto : www.ampl.or.id

Program PPSP merupakan salah satu program di Indonesia yang tidak diwajibkan tapi paling cepat sebaran dan partisipasinya. Program ini diluncurkan oleh Wakil Presiden RI, Boediono saat Konferensi Sanitasi Nasional di tahun 2009. Program ini memiliki tiga target utama sebagaimana diuraikan dalam RPJMN 2010 – 2014 yaitu menghentikan BABS, melaksanakan praktek 3R dan meningkatkan TPA menjadi *sanitary landfill*, serta yang terakhir ialah mengurangi genangan air di 100 wilayah perkotaan seluas 22.500 ha. Pelaksanaan program PPSP mendorong pemerintah kabupaten/kota memiliki rencana strategis untuk pengembangan layanan air minum dan sanitasi yang kemudian diikuti dengan implementasi rencana tersebut secara bertahap dan berkelanjutan. Banyak pihak dilibatkan dalam penyusunan rencana strategis dan implementasinya, termasuk juga kelompok-kelompok masyarakat di daerah kumuh.



# 6 Tahapan PPSP

Program PPSP mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk segera mengembangkan layanan air limbah, sampah dan drainase di wilayahnya secara bertahap. Pelaksanaan program PPSP terdiri dari 6 tahapan, diawali dengan pelaksanaan tahapan kampanye, edukasi dan advokasi lalu diakhiri dengan tahapan pemantauan dan evaluasi. Sejak diresmikan secara nasional oleh Wakil Presiden Budiono di tahun 2009, sudah ada 446 kota/kabupaten yang tercatat sebagai peserta PPSP. Melebihi target semula, yaitu 330 kota/kabupaten peserta PPSP di tahun 2014.

# Layanan Air Minum dan Sanitasi

**LAYANAN AIR LIMBAH**  
 Biasanya ditangani dengan unit-unit setempat (on-site unit) yang dibuat sendiri oleh pemilik rumah. Layanan sedot dan pengolahan lumpur tinja harus tersedia untuk mengoptimalkan kinerja unit setempat. Air kakus juga dapat ditangani dengan layanan sewerage system dimana air kakus oleh pipa pengumpulnya dibawa ke instalasi pengolahan air limbah.

**LAYANAN AIR MINUM**  
 Terdiri dari layanan perpipaan dan layanan non-perpipaan, ketersediaan air minum dibutuhkan untuk kebutuhan makan, minum, mandi, dan kakus saja, selain juga untuk kebutuhan cuci dan pembersihan lingkungan. Air juga harus tersedia untuk layanan hidran.

**LAYANAN PERSAMPAHAN**  
 Setelah pewadahan sampah, layanan pengumpulan sampah dilakukan dengan menggunakan gerobak atau truk sampah, sebelum akhirnya dibawa ke tempat pembuangan sementara (TPS), tempat pemrosesan akhir (TPA) atau fasilitas pengolahan sampah lainnya.

**LAYANAN DRAINASE**  
 Berupa saluran terbuka atau tertutup yang akan menampung limpasan air hujan dan mengalirkannya ke badan air penerima. Selain dimensinya harus cukup, saluran drainase harus memiliki kemiringannya cukup dan bebas dari sampah.

**JAMBAN**  
 Selain menjamin privasi penggunaannya, jamban yang baik harus memiliki akses air bersih yang cukup, dan tersambung ke unit penanganan air kakus yang benar. Jika tidak memiliki jamban pribadi, masyarakat dapat menggunakan layanan jamban bersama.

Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang sanitasi hanya diberikan untuk kabupaten dan kota yang ikut serta dalam Program PPSP. Dana tersebut disalurkan dalam bentuk program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) guna mendukung penyediaan prasarana dan sarana air limbah, persampahan dan drainase bagi masyarakat berpenghasilan rendah di permukiman padat perkotaan.



Ilustrasi Taufik Sugandi

# Pembangunan Air Minum dan Sanitasi dari era ke era

Sebelum Indonesia merdeka, layanan air minum dan sanitasi sudah ada di beberapa kota Indonesia. Layanan air minum hampir tersedia di seluruh kota besar Indonesia. Sementara itu, layanan perpipaan air limbah baru tersedia di beberapa kota saja, seperti Bandung, Cirebon, Solo dan Yogyakarta. Setelah merdeka, rentang perjalanan pengembangan layanan air minum dan sanitasi dari era ke era belum berjalan secepat yang dibutuhkan. Keberadaan program PPSP diharapkan dapat membuka era baru pengembangan layanan-layanan tersebut di Indonesia.



## 1970-1980

Fokus pembangunan masih ditujukan pada sektor pertanian dan irigasi. Pembangunan sarana air minum dan sanitasi masih berskala kecil dan biasanya dikaitkan dengan proyek pembangunan lain, seperti KIP (*Kampung Improvement Program*). Pembangunan sarana air minum belum menyentuh wilayah pedesaan dan kota kecil. Kesadaran masyarakat mengenai perilaku hidup bersih dan sehat masih sangat rendah. Walau demikian, pemerintah mulai menyusun Rencana induk Air Limbah DKI Jakarta untuk pengembangan jaringan perpipaan air limbah di sebagian wilayah Jakarta.

## 1980-1990

Ditandai dengan pencaanangan Dekade Air Internasional (1981 – 1989) yang bertujuan untuk meningkatkan layanan air minum. Pendekatan pembangunan air minum dirumuskan Departemen Pekerjaan Umum. LSM sudah mulai berperan dengan bantuan dari berbagai donor. IPAL terpusat mulai dibangun di kota-kota Medan dan Tangerang. Unit pengolah limbah setempat (*on-site*) dan MCK lebih gencar dipromosikan. Hanya saja pengelolaan sampah yang ramah lingkungan belum mendapat banyak perhatian. Walau demikian, Jakarta di era ini memiliki TPA sampah yang didisain dan dibangun sesuai kriteria *sanitary landfill* modern.

## 1990-2000

Tuntutan otonomi daerah membuat pemerintah pusat mulai berubah peran menjadi *enabler*, bukan pelaksana langsung. Keterlibatan dunia swasta meningkat pesat. Walau demikian, akibat krisis ekonomi dan perubahan peta politik, pembangunan sempat mengalami stagnasi. Di skala pedesaan dan kota kecil, partisipasi masyarakat dalam layanan air minum dan sanitasi mulai diperkenalkan dan diterima, misalnya IPAL skala komunal yang dibangun di Tlogomas Kota Malang dan di beberapa kota lainnya. Di era ini, Rencana Induk Air Limbah Kota Denpasar mulai disusun walau pembangunan fisiknya belum dimulai.

## 2000 - Sekarang

Pembangunan air minum dan sanitasi mulai dilakukan secara terpadu, ditandai dengan adanya kebijakan nasional AMPL Berbasis Masyarakat. Pengembangan layanan air minum dan sanitasi semakin sinergis sejak diluncurkannya program PPSP. Adanya komitmen MDGs membuat pengembangan ke-2 layanan tersebut memiliki tambahan sumber daya. Kerangka peraturan diperbaiki, baik di tingkatan undang-undang, peraturan pemerintah maupun peraturan menteri. Pembangunan fisik dilakukan berbarengan dengan kampanye perilaku hidup bersih dan sehat. Pembangunan berbasis masyarakat semakin diintensifkan, baik untuk layanan air minum, air limbah maupun persampahan skala permukiman.

Foto : www.ampl.or.id



Foto : www.ampl.or.id



Foto : www.ampl.or.id



Foto : www.ampl.or.id



Foto : www.ampl.or.id



Foto : www.ampl.or.id



Foto : www.ampl.or.id



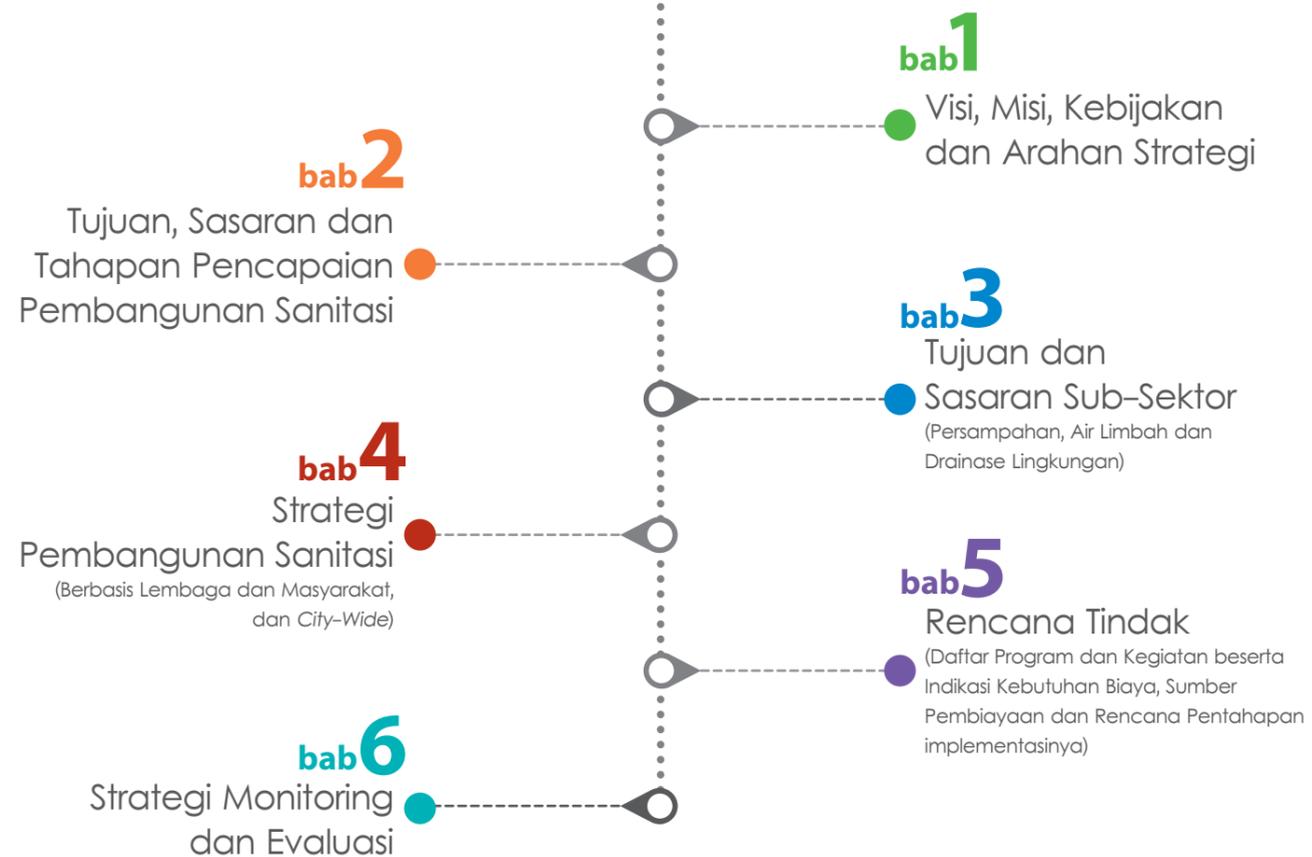
Foto : www.ampl.or.id

Sejak program PPSP berlangsung, frekuensi pertemuan terkait urusan pembangunan sanitasi di tiap kabupaten dan kota sangat jauh meningkat. Mulai dari pertemuan terkait sosialisasi dan persiapan pelaksanaan program PPSP, penyusunan rencana strategis, pembuatan memorandum program, penyiapan implementasi serta pemantauan dan evaluasi.



Lingkup pembangunan sanitasi memang luas. Ada pengembangan layanan untuk air limbah, sampah dan drainase, ada juga promosi perilaku hidup bersih dan sehat. Banyak pihak yang terlibat. Tidak hanya instansi pekerjaan umum, tetapi juga instansi-instansi kesehatan, lingkungan hidup dan keuangan. Pihak-pihak non-pemerintah juga terlibat. Biaya yang dibutuhkan sangat besar. Tidak akan cukup jika hanya mengandalkan anggaran pemerintah kabupaten/kota. Sumber-sumber pendanaan lain perlu digalang. Dengan karakteristik demikian, pembangunan sanitasi jelas membutuhkan suatu rencana strategis yang terintegrasi, multisektor dan komprehensif. Rencana demikian disebut Strategi Sanitasi Kota (SSK). Visi dan misi pembangunan sanitasi dijabarkan dalam dokumen SSK tersebut, selain tujuan dan sasaran dari pengembangan tiap jenis layanan.

# 5 Strategiskan Langkah Bersama



Strategi Sanitasi Kota (SSK) merupakan rencana strategis pembangunan sanitasi yang dimiliki kota atau kabupaten. Di dalamnya diuraikan langkah-langkah strategis pemerintah kabupaten/kota dalam mengembangkan layanan sanitasi untuk wilayahnya secara terintegrasi, sistematis dan berkelanjutan. Rencana strategis berjangka waktu 5 tahun ini disusun oleh Pokja AMPL masing-masing daerah. Rencana strategis tersebut kemudian dituangkan dalam dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK).



Pengembangan layanan berbasis masyarakat diuraikan di dalam SSK, selain layanan berbasis institusi. SSK menggabungkan pendekatan *top-down* dan *bottom-up* guna mencapai sasaran pembangunan sanitasi yang disepakati. Optimasi layanan yang dikelola masyarakat atau organisasi non-pemerintah juga termasuk hal-hal yang perlu direncanakan dan diuraikan dalam SSK. Tampak dalam foto adalah layanan persampahan berbasis masyarakat yang dilakukan Koperasi Serba Usaha (KSU) Sampah Komodo di kepulauan Komodo.

Penyusunan Strategi Sanitasi Kota (SSK) terdiri dari beberapa tahapan kerja. Diawali dengan pengkajian fakta sanitasi, sebagaimana sebelumnya diuraikan dalam Buku Putih Sanitasi sampai perumusan strategi serta penyusunan program-program dan kegiatan pembangunan sanitasi yang diusulkan. Substansi SSK harus dipaparkan ke masyarakat dalam acara Konsultasi Publik sebelum kemudian difinalkan dalam suatu dokumen SSK.



Dengan SSK, suatu kota atau kabupaten akan mengembangkan layanan-layanan air limbah, sampah, drainase dan air bersih yang sesuai dengan visi, misi, kebijakan dan tujuan pembangunannya. Peran berbagai pihak berkepentingan dalam membantu pengembangan layanan sanitasi di suatu kabupaten/kota akan dioptimalkan. Baik itu peran pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun peran perusahaan swasta, lembaga donor maupun masyarakat.



Foto : www.ppsplampung.wordpress.com

Di dalam program PPSP, pemerintah menyediakan tenaga-tenaga fasilitator untuk mendampingi Pokja AMPL Kabupaten/Kota dalam menjalankan proses penyusunan SSK. Peran para fasilitator sangat strategis dalam penyusunan SSK. Mereka harus memastikan Pokja AMPL bekerja sesuai pemahaman, prosedur, dan metode yang benar. Mereka juga harus mengoordinasikan pihak-pihak berkepentingan untuk terus terlibat dalam penyusunan SSK. Tampak dalam foto, para fasilitator menghadiri rapat Pokja AMPL Kota Bandar Lampung yang dipimpin langsung oleh kepala Bappeda sebagai bagian dari koordinasi penyusunan SSK kota tersebut di tahun 2012.



Foto : www.depok.go.id



Foto : www.news.kutaitaranearakab.go.id

Penyusunan SSK di suatu kabupaten/kota harus didahului dengan penyusunan Buku Putih Sanitasi yang berisi informasi terkait kondisi sanitasi di wilayah tersebut. Termasuk antara lain menyangkut kelembagaan dan peraturan, kondisi prasarana, serta aspek finansialnya. Indikasi permasalahan dijelaskan, berikut rekomendasi peningkatan kondisi sanitasi yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan SSK. Buku Putih disusun dengan melibatkan pihak-pihak berkepentingan agar informasinya akurat dan aktual. Sebagaimana terlihat pada foto-foto di atas, acara konsultasi publik dilakukan oleh Pokja AMPL Kota Depok, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Trenggalek guna mendapatkan masukan untuk menyempurnakan Buku Putih Sanitasi-nya masing-masing.

# NAWASIS



Photo : Nawasis.info

Informasi terkait partisipasi dan kinerja kabupaten/kota dalam program PPSP saat ini dapat dengan cepat diketahui. Pokja AMPL Nasional, BAPPENAS bersama Waspola Facility mengembangkan pusat data dan informasi berbasis internet yang disebut NAWASIS (*National Water Supply and Sanitation Information Services*). Melalui situs 'NAWASIS Info', pengguna dapat memasukkan dan membaca data terkait pembangunan sektor air minum dan sanitasi. Data tersebut kemudian diolah menjadi informasi yang lebih mudah dipahami oleh semua pengguna. Progres tiap daerah dalam program PPSP dapat diketahui, termasuk statusnya dalam pembuatan SSK. NAWASIS berhasil menjadi penghubung berbagai sistem data dan informasi yang telah ada di sektor air minum dan sanitasi. Dengan NAWASIS sebagai portal, input data menjadi lebih efisien dan akurasi dapat terjaga. Dalam jangka panjangnya, NAWASIS tidak hanya memantau dan mengevaluasi kinerja sektor air minum dan sanitasi, namun juga akan menawarkan materi untuk penguatan advokasi dan peningkatan kapasitas.



*Wilujeng Sumping*  
**di Bandung**



**City Sanitation  
Summit XIV**  
BANDUNG 2014

Saat pimpinan tampil dan berbicara, lebih banyak orang memperhatikan dan mendengar. Saat pimpinan menyatakan komitmennya, banyak orang yakin bahwa itu merupakan komitmen dari seluruh jajaran di organisasi yang dipimpinnya. Itulah manfaat strategis yang diperoleh jika kita berhasil menampilkan pimpinan kita ke muka publik. Di balik itu semua, sebelum dia tampil, ada manfaat lain yang sebenarnya dapat kita peroleh. Menjelang tampil, para pimpinan akan berusaha memahami isu air minum dan sanitasi yang akan dibicarakannya. Mau tidak mau, dia akan mempelajari kondisi aktual dari layanan air minum dan sanitasi di wilayahnya. Seluruh manfaat itu membuat para pelaku pembangunan air minum dan sanitasi berupaya keras untuk menampilkan figur pemimpin mereka di depan publik.

# Tampilkan Pimpinan



Foto: [www.tribunnews.com](http://www.tribunnews.com)



Foto: [www.inspirasibangsa.com](http://www.inspirasibangsa.com)



Foto: [www.tunashijau.com](http://www.tunashijau.com)



Foto: [www.humasdepok.blogspot.com](http://www.humasdepok.blogspot.com)

Tampilnya pimpinan negara untuk meninjau wilayah banjir menandakan keseriusan seluruh jajaran pemerintahannya untuk segera mengatasi permasalahan tersebut. Foto ini menunjukkan Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono bersama beberapa menteri Kabinet Bersatu 1 (2004 – 2009) sedang berjalan menuju lokasi banjir di Jakarta pada tahun 2007.



Foto: [www.sragenpos.com](http://www.sragenpos.com)

Apapun yang dilakukan pimpinan akan menjadi motivasi bagi anak buahnya untuk bertindak lebih. Tampak di foto-foto berikut (dari atas) Joko Widodo (Gubernur DKI Jakarta 2012 – 2014) sedang memeriksa langsung kondisi gorong-gorong di Bunderan Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Gatot Pudjo Nugroho (Gubernur Sumatera Utara) bersama Ngogesa Sitepu (Bupati Langkat) meninjau langsung bencana banjir di Kabupaten Langkat, Tri Rismaharini (Walikota Surabaya) turut serta dalam kegiatan pengumpulan sampah dan Nur Mahmudi Isma'il (Walikota Depok) turut berpartisipasi dalam kegiatan bersih-bersih bersama jajaran KOSTRAD Brigif 17.

Percepatan pembangunan sanitasi di suatu kota membutuhkan komitmen penuh dari para pimpinannya. Tanpa komitmen para pimpinan, rencana pembangunan yang sudah tersusun di daerahnya tidak akan dapat terimplementasi dengan baik. Hal ini disadari sepenuhnya oleh pimpinan-pimpinan dari 6 kota Indonesia yang saat itu termasuk sebagai wilayah kerja *Indonesian Sanitation Sector Development Program* (ISSDP), yaitu kota-kota Blitar, Surakarta, Banjarmasin, Denpasar, Jambi, dan Payakumbuh. Para walikota yang memiliki kesamaan pemahaman dan kepedulian terhadap pembangunan sanitasi itupun bertemu dalam forum koordinasi ISSDP yang diselenggarakan pada tahun 2006 di Banjarmasin. Acara forum itu resminya bernama Lokakarya Sanitasi Enam Kota ISSDP.



Foto : Koleksi Pokja AMPL

**CSS**

Lokakarya sanitasi di tahun 2006 itu kemudian dianggap sebagai the *City Sanitation Summit* (CSS) pertama. Sampai tahun 2014, CSS telah dilaksanakan sebanyak 14 kali. CSS ke-14 di kota Bandung dihadiri oleh 60 walikota dan bupati beserta 1.000 undangan lainnya. Hal ini menandakan para kepala daerah yang semakin bersemangat untuk melakukan percepatan pembangunan air minum dan sanitasi. Walau awalnya dibiayai ISSDP, CSS akhir-akhir ini dibiayai sendiri oleh anggota AKKOPSI. CSS ke-14 dibuka oleh Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat saat itu, Agung Laksono dan dihadiri beberapa anggota kabinet lainnya.

Foto: Koleksi Pokja AMPL



**DEKLARASI BLITAR**

Dalam lokakarya sanitasi atau CSS ke-2 tahun 2007 di kota Blitar, ke-6 walikota menandatangani Deklarasi Blitar. Intinya, mereka menyatakan dukungannya terhadap percepatan pengembangan sanitasi di kotanya masing-masing dengan keberpihakan pada masyarakat miskin. Walikota Blitar saat itu, Djarot Syaiful Hidayat turut langsung menandatangani deklarasi itu bersama Walikota Banjarmasin, Ahmad Yudi. Kota-kota lain diwakili oleh pejabat tingginya yang hadir dalam kesempatan itu. Penandatanganan dilakukan di Perpustakaan dan Museum Bung Karno. Gema Deklarasi Blitar ini terdengar ke seluruh Indonesia sehingga mengundang minat kota-kota lainnya untuk turut memperbaiki kondisi sanitasinya .



Foto : Koleksi Pokja AMPL

**AKKOPSI**

CSS ke-6 di kota Jambi tahun 2009 ditandai dengan mulai berdirinya AKKOPSI (Aliansi Kabupaten Kota Peduli Sanitasi) dengan ketua pertamanya adalah walikota Jambi saat itu, Bambang Priyanto. Misi utama AKKOPSI adalah melakukan advokasi kebijakan dan penguatan kapasitas kepala daerah, melalui kolaborasi dan sinergi dengan berbagai pihak. AKKOPSI memainkan peran sangat penting dalam mendorong pencapaian PPSP. Kini para kepala daerah anggota AKKOPSI menyepakati untuk meningkatkan alokasi anggaran APBD minimal dua persen untuk pembangunan sanitasi. AKKOPSI juga melakukan kegiatan pembelajaran horisontal (*horizontal learning*) dan pemeringkatan (*index*) pembangunan sanitasi antar Kabupaten/Kota se-Indonesia. AKKOPSI saat ini beranggotakan 348 bupati dan walikota, serta memiliki kantor sekretariat sendiri di Jakarta Pusat.



Foto : Koleksi Pokja AMPL



Photo: AMPL Pokja

Ada saatnya pimpinan harus tampil mewakili Indonesia untuk hadir dalam pertemuan internasional untuk urusan sanitasi. Salah satunya, Konferensi *The East Asia Ministerial Conference on Sanitation and Hygiene* (EASAN). Indonesia sempat menjadi tuan rumah acara dua tahunan tingkat menteri di bidang sanitasi dan higienitas ini. Acara berlangsung di Denpasar, Bali pada bulan September 2012. Tema utamanya kali ini adalah untuk meningkatkan komitmen mencapai target MDGs di bidang sanitasi. Dibuka oleh Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi, acara ini dihadiri oleh 250 peserta dari 14 Negara di Asia Timur.

Photo: www.stbm-indonesia.org



Jika seorang menteri tampil untuk urusan air minum dan sanitasi, pengaruhnya pasti besar. Tidak hanya ke masyarakat luas, tetapi juga ke jajaran kementeriannya sendiri. Bayangkan pengaruhnya jika beberapa menteri tampil sekaligus. Komunikasi antar kementerian akan terjadi, baik sebelum maupun sesudah acara yang menampilkan menteri-menteri itu. Foto diatas menunjukkan para menteri saat itu, Joko Kirmanto (Menteri Pekerjaan Umum) dan Endang Rahayu Sedyaningsih (Menteri Kesehatan) tampil bersama dalam Puncak Peringatan Hari Cuci Tangan Pakai Sabun Sedunia Ke-4 Tahun 2011.



Jika ingin membuat pimpinan lebih memahami permasalahan air minum dan sanitasi, ajak pimpinan tersebut untuk tampil di depan media. Menjelang tampil, dia pasti akan berusaha melengkapi dirinya dengan berbagai informasi terkini terkait urusan air minum dan sanitasi. Tampak dalam gambar, Ismet Aziz, Walikota Bukittinggi sedang berbicara dengan media selaku tuan rumah CSS pada tahun 2010.

# PELUANG SEMUA BAGI

Seseorang akan mendukung suatu kegiatan jika dia melihat manfaat dari kegiatan tersebut. Baik bagi dirinya, maupun bagi orang-orang di sekelilingnya. Semakin beragam jenis peluang dari suatu kegiatan, semakin banyak pihak yang siap mendukung kegiatan tersebut. Dalam tahun-tahun terakhir ini, pembangunan air minum dan sanitasi berhasil menciptakan banyak peluang. Tidak hanya peluang kerja dan usaha, tetapi juga peluang untuk aktualisasi diri. Untuk sebagian pihak, pengembangan layanan air minum dan sanitasi merupakan panggilan mulia bagi mereka untuk meningkatkan harkat manusia di sekitarnya.





Foto: Koleksi Qipra

## APARAT PEMERINTAH

Ini peluang untuk mengaktualisasikan tugasnya di urusan yang menyentuh kebutuhan dasar manusia. Mereka merasakan besarnya apresiasi masyarakat yang mendapat sambungan air minum dan layanan air limbah.



Foto: Koleksi Qipra

## PENGUSAHA

Ini peluang usaha yang sangat besar, baik untuk penyediaan alat, bahan maupun jasa. Tidak hanya di perkotaan, tetapi juga di perdesaan. Contoh, pembuatan cubluk pracetak oleh wirausahawan sanitasi di Grobogan (Jawa Tengah).



Foto: Koleksi Qipra

## POLITISI

Ini peluang bagi kepala daerah, anggota dewan dan politisi lainnya untuk benar membantu, sekaligus menarik dukungan dan simpati masyarakat.



Foto: Koleksi Qipra

## PENCARI KERJA

Ini peluang kerja yang sangat luas, baik untuk tenaga ahli, tenaga terampil atau lainnya. Contoh, peluang menjadi fasilitator pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan air minum atau sanitasi berbasis masyarakat.



Foto: Koleksi Qipra

## INVESTOR

Ini peluang investasi yang menjanjikan. Baik untuk layanan skala perkotaan maupun layanan skala kawasan. Misalnya, dalam pembangunan dan pengoperasian beberapa instalasi air minum atau persampahan.



Foto: Koleksi Qipra

## TOKOH MASYARAKAT

Ini peluang untuk memperbaiki martabat dan kesehatan warga kampungnya. Siapapun pasti menghargai jasa dan pengorbanan mereka yang berhasil meningkatkan kesejahteraan tetangga-tetangganya.



Lima belas tahun lagi, Jakarta akan memiliki sistem jaringan perpipaan air limbah (sewerage system) yang luas. Pembangunannya tentu akan menciptakan banyak peluang usaha. Mulai dari jasa keahlian teknis dan manajemen proyek, penyediaan komponen perpipaan dan instalasi pengolahan sampai ke jasa pengoperasian jaringan tersebut. Rencana investasi 70 trilyun dalam 15 tahun ini akan menjadi salah satu proyek air limbah terbesar di Asia

Foto: Koleksi Qipra



Foto: Koleksi Qipra



Foto: Koleksi Pokja AMPL



Foto: Koleksi Qipra



Foto: Koleksi Pokja AMPL

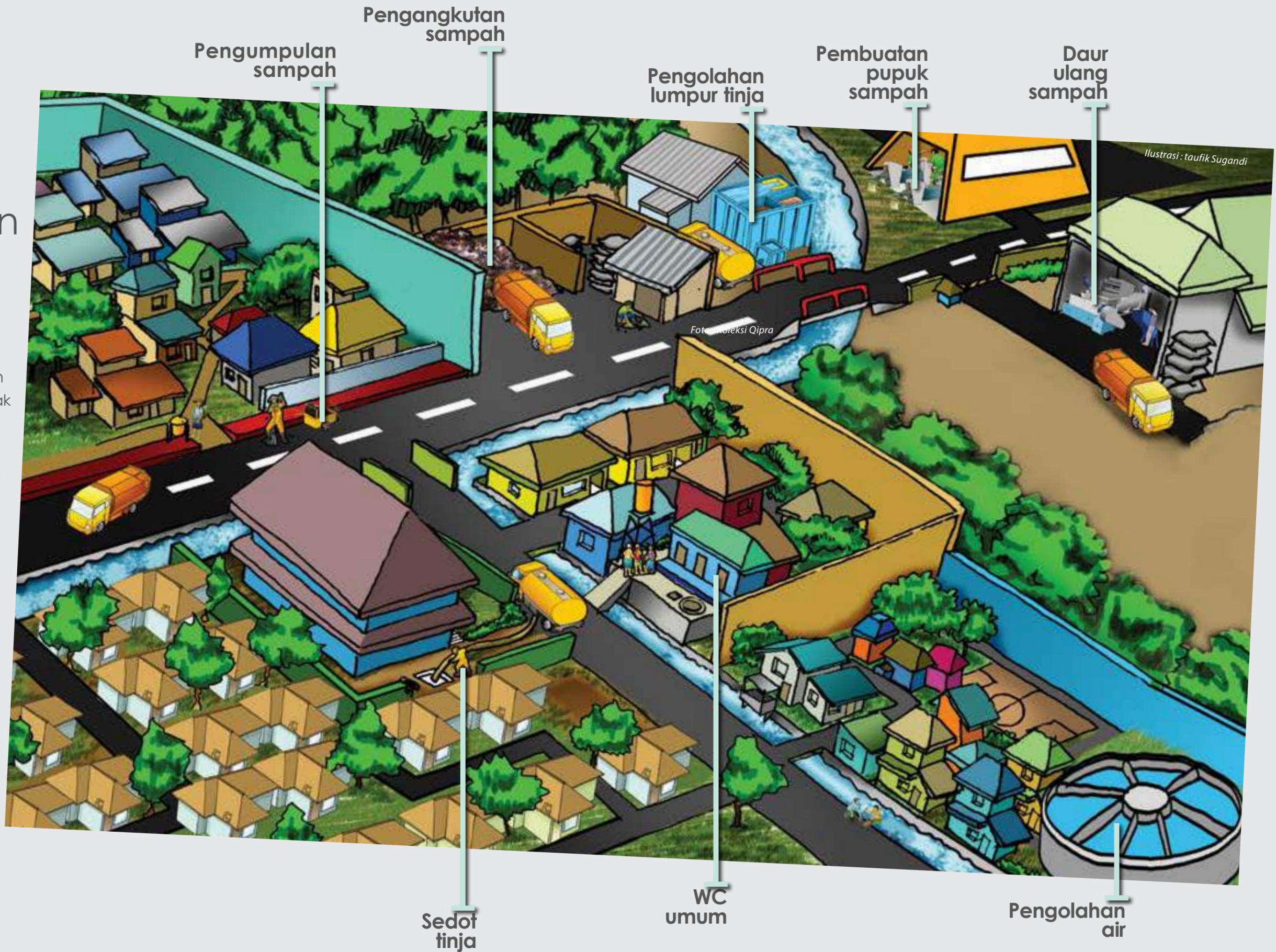


Foto: Koleksi Pokja AMPL

Pengelolaan sampah melibatkan inisiatif individu, sektor informal dan sektor formal yaitu mulai dari pengumpulan, pengangkutan, pemilahan, penimbunan sampai pemanfaatan sampah. Dengan cara-cara yang sederhana, mereka memainkan peran sangat penting dalam rantai pengelolaan sampah di kawasan perkotaan.

# Peluang dalam Layanan Air Minum dan Sanitasi

Setiap kawasan permukiman pasti membutuhkan layanan air minum, layanan persampahan dan layanan air limbah domestik. Banyak individu, perusahaan, koperasi atau organisasi masyarakat yang sudah berkecimpung di dalamnya, baik dalam bentuk penyediaan layanan formal maupun informal. Sebagian bahkan bergerak dalam skala perkotaan. Semua kegiatan dalam gambar ini mungkin saja menjadi lingkup bisnis layanan kita. Banyak peran yang tersedia dalam pengembangan dan pengelolaan layanan-layanan tersebut. Kita bisa jadi produsen, supplier peralatan yang dibutuhkan, pelaksana operasi, atau pengelola fasilitas air minum dan sanitasi.





# 80

# Perbaiki Perilakunya juga

Tanpa disertai perubahan perilaku dari calon penggunanya, banyak produk pembangunan tidak akan bermanfaat. Hal ini semakin terasa penting dalam pembangunan air minum dan sanitasi. Kebiasaan buang air besar sembarangan (BABS) perlu diubah agar jamban bermanfaat. Masyarakat perlu tahu cara menyimpan air di rumahnya agar kualitas air tetap terjaga. Program-program diadakan untuk memperbaiki perilaku masyarakat agar dapat menjalankan pola hidup yang lebih bersih dan sehat. Baik program yang dikelola pemerintah maupun program yang dikelola organisasi-organisasi nirlaba dan kelompok-kelompok masyarakat. Pemerintah menganjurkan perubahan perilaku tersebut melalui pendekatan yang disebut Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).



Kebiasaan cuci tangan pakai sabun dipromosikan ke semua lapisan masyarakat, termasuk ke anak-anak sekolah. Mereka memahami manfaatnya yaitu dapat menurunkan 44% peluang terkena diare. Tampak dalam foto, Nafsiah Mboi (Menteri Kesehatan Kabinet Bersatu II) bersama Ratna Djoko Suyanto (Ketua Solidaritas Isteri Kabinet Indonesia Bersatu) dan Duta Sanitasi sedang memberi contoh mencuci tangan yang benar pada acara Hari Cuci Tangan Pakai Sabun Sedunia, 15 Oktober 2012 di Jakarta Selatan.

Masyarakat akan berminat untuk membuat sendiri jambannya asalkan kesadaran mereka sudah terpicu untuk meninggalkan dampak buruk BABS. Pendanaannya dapat distimulasi dengan menggunakan dana bergulir yang kemudian akan dikembalikan secara berangsur oleh masyarakat. Tampak dalam foto, seorang warga sedang membangun jamban yang dilengkapi tangki septik di halaman belakang rumahnya.



# STBM

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) merupakan suatu pendekatan pemberdayaan masyarakat agar menerapkan perilaku hidup yang lebih bersih dan sehat. STBM merupakan perluasan dari pendekatan *Community-Led Total Sanitation (CLTS)* yang mendorong masyarakat untuk menghentikan perilaku BABS. STBM memiliki lima pilar, yaitu:

**1** Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS)



Setiap individu mempunyai akses terhadap sarana sanitasi dasar sehingga terwujud komunitas terbebas dari BAB sembarangan.

**2** Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS)



Setiap rumah tangga dan sarana umum menyediakan fasilitas cuci tangan yang dilengkapi air dan sabun.

**3** Pengelolaan Air Minum Makanan - Rumah Tangga (PAMM RT)



Setiap rumah tangga mengelola air minum dan makanan yang aman.

**4** Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (PS RT)



Setiap rumah tangga mengelola sampahnya dengan benar.

**5** Pengelolaan Limbah Cair Rumah Tangga



Setiap rumah tangga mengelola air limbahnya dengan benar.

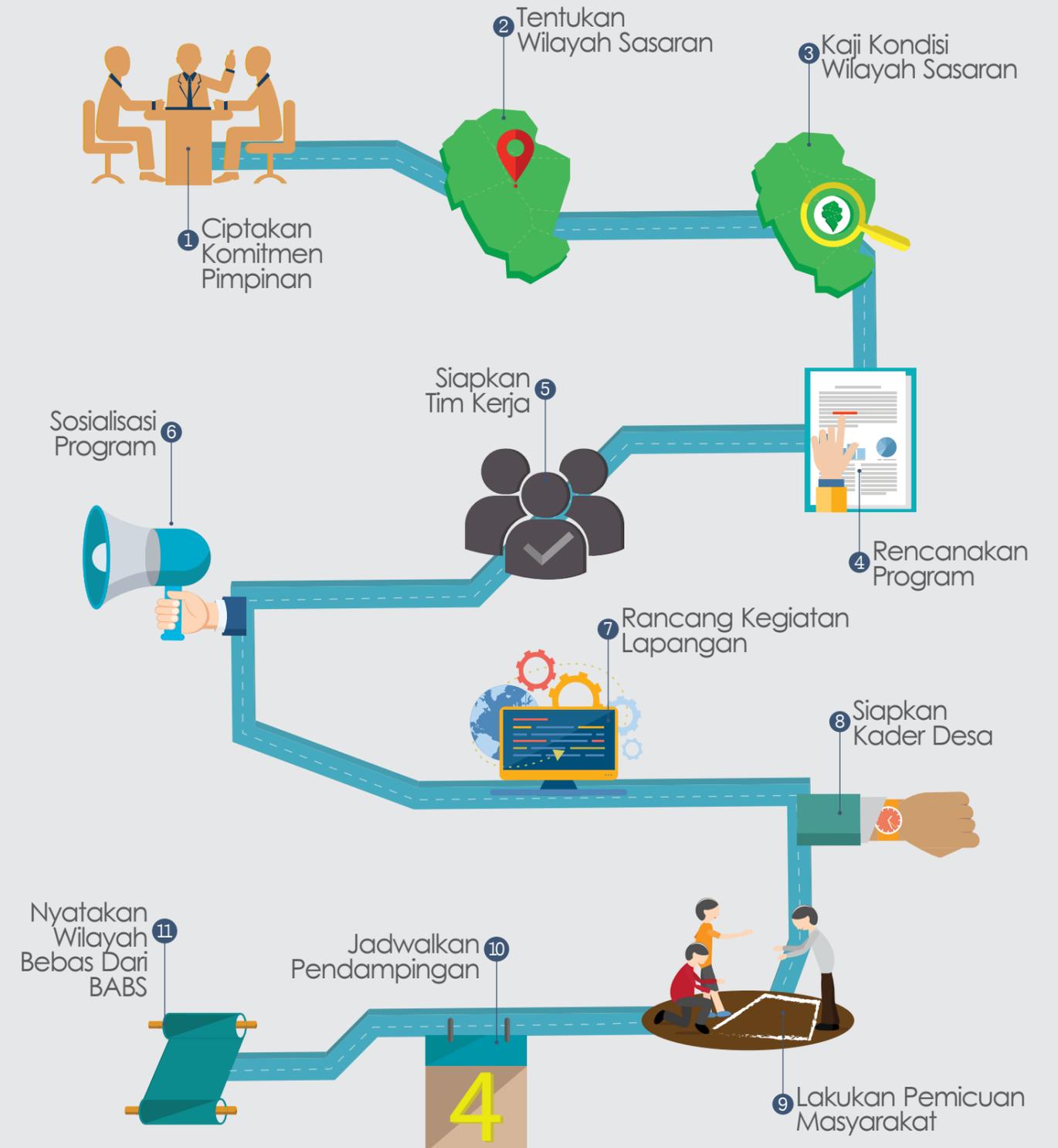
STBM dijadikan strategi nasional di tahun 2008 melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 852/Menkes/SK/IX/2008. Strategi ini menjadi acuan bagi mereka yang terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan program STBM.



Program nasional STBM di tahun 2013 sudah mengintervensi lebih dari 16.000 desa, sedikit lagi target RPJMN 2010 - 2014 sebesar 20.000 desa akan tercapai. Grafik ini menunjukkan perbandingan jumlah desa intervensi dan target tahunannya.

## Tahapan Replikasi STBM

Replikasi STBM membutuhkan langkah-langkah yang sistematis. Walaupun demikian, pelaksanaannya pasti membutuhkan penyesuaian lapangan, sesuai kondisi dan dinamika masyarakat.



# Pemicuan Stop BABS

## Bahan :

- 1 orang pendamping
- Sebanyak mungkin warga setempat
- 1 lembar kertas besar
- Kapur untuk menggambar di tanah/ lantai
- Minimal 1 orang tokoh berpengaruh di masyarakat

## Bumbu :

- Segenggam ketekunan
- 1 sendok makan kesabaran
- 3 sendok makan rasa empati



**Pemetaan**

Foto: [www.communityledtotalsanitation.org](http://www.communityledtotalsanitation.org)

## Cara Melakukan Pemicuan:

- Setelah pendamping melakukan persiapan dengan tokoh masyarakat setempat, kumpulkan warga di suatu lokasi yang nyaman dan luas.
- Buat suatu denah di kertas atau di atas lantai/tanah yang menggambarkan desa dan lingkungan sekitarnya.
- Ajak warga keliling desa dan menunjukkan tempat dimana mereka melakukan BABS, atau biasa disebut *transect walk*. Beri tanda pada denah dimana semua warga BABS.
- Ajak warga mencermati denah dengan tanda lokasi BABS, dan bahas potensi lalat hinggap ke kotoran lalu makanan warga. Dengarkan tanggapan warga.
- Rangkum hasil diskusi, dan perkenalkan peluang untuk memperbaiki kebiasaan BAB dan pilihan teknologi yang tepat guna.



**Transect walk**

Foto: [www.mapcarta.com](http://www.mapcarta.com)



**Pemilihan teknologi**

Foto: [www.mardaleni.rejangbongkab.go.id](http://www.mardaleni.rejangbongkab.go.id)

Foto: Koleksi Pokja AMPL



Foto: Koleksi Pokja AMPL

Membuat seseorang mau melangkah masuk dan menggunakan jamban ternyata tidak semudah yang disangka. Duduk perkaranya menyangkut kebiasaan yang sudah membudaya, persepsi yang berbeda, kemiskinan selain kurangnya pemahaman terhadap dampak BABS. Perlu teknik tersendiri untuk merubah kebiasaan tersebut. Demikian juga untuk membuat seseorang mau membuang sampah di tempatnya.

Foto: Koleksi Qipra



Berbagai pihak sudah membuat materi-materi untuk mempromosikan perlunya pengembangan layanan air minum dan sanitasi, selain juga untuk mempromosikan penerapan perilaku hidup yang lebih bersih dan sehat. Sebagian materi menunjukkan kondisi yang buruk akibat keterbatasan layanan air minum dan sanitasi yang sekarang ada. Tampak dalam gambar, poster-poster yang dikembangkan oleh Plan Indonesia untuk digunakan oleh Pokja AMPL Nasional.



Foto: Koleksi Pokja

Foto: Koleksi Pokja AMPL

Promosi penghematan air terus dilakukan di berbagai kesempatan. Salah satunya di peringatan Hari Air Dunia yang selalu dilaksanakan pada tanggal 22 Maret. Pelaksananya bermacam-macam, termasuk lembaga-lembaga swadaya masyarakat, kementerian dan lembaga pemerintah, asosiasi profesi terkait dan perusahaan-perusahaan daerah air minum.

Penanganan urusan air minum dan sanitasi perlu dimulai dari rumah tangga kita sendiri. Apalagi di saat layanan air minum dan sanitasi belum tersedia dengan baik. Ada beberapa tindakan yang selama ini dipromosikan dalam program-program pembangunan air minum dan sanitasi. Sebut saja: pengomposan di rumah untuk mengurangi sekaligus memanfaatkan timbulan sampah organik; pembuatan sumur resapan di halaman rumah untuk menangani limpasan air hujan sekaligus menambah ketersediaan air tanah; penggunaan tangki septik untuk menangani masalah air kakus. Dalam pembangunan air minum dan sanitasi, sudah dilakukan berbagai kegiatan promosi, pelatihan dan percontohan agar upaya di tingkatan rumah tangga tersebut memberi hasil yang optimal.

# Q DORONG MEREKA LAYANI DIRI SENDIRI



Ilustrasi: Muhamad Zaki



Percontohan pengomposan dilakukan agar semakin banyak pemilik rumah yang mau dan mampu membuat kompos dari sampah organik rumahnya sendiri. Selain mengatasi permasalahan rumahnya sendiri, upaya pengomposan akan mengurangi jumlah sampah yang perlu diangkut ke tempat pembuangan akhir. Tampak dalam foto, Djamaluddin Suryohadikusumo (Menteri Kehutanan 1993 – 1998) beserta istrinya, Sri Murniarti tengah menunjukkan hasil pengomposan kepada peserta pelatihan yang diselenggarakan di tempat mereka sendiri, yaitu Kebun Karinda (Lebak Bulus, Jakarta Selatan).



Biopori diyakini dapat mengurangi terjadinya genangan air selain meresapkan air ke dalam tanah. Sosialisasi biopori dilakukan secara intensif mengingat dibutuhkanannya biopori dalam jumlah yang besar guna mencegah terjadinya banjir. Tampak dalam foto, Walikota Bogor Aria Bima secara simbolis sedang membuat lubang biopori sebagai bagian upaya kotanya untuk membuat 5 juta lubang biopori. Sosialisasi biopori juga dilakukan di kalangan Tentara Nasional Indonesia, seperti yang terjadi di lingkungan Koramil 19/Bumijawa, Kota Tegal (Jawa Tengah).

# Penampung Air Hujan di Pulau Ende

Keterbatasan sumber air di Pulau Ende merupakan tantangan terbesar dalam penerapan PHBS. Di tahun 2006, teknologi Penampung Air Hujan (PAH) mulai diperkenalkan oleh UNICEF dan pemerintah setempat. Warga dilatih untuk membangun PAH di rumah mereka sendiri. Modalnya hanya pipa dan tangki penampung air. Beberapa rumah yang berdekatan memutuskan untuk menggunakan PAH secara bersama. Tangki PAH diletakkan di antara rumah-rumah tersebut. Pipa penyalur dari PAH juga diberi cabang agar bisa menjangkau beberapa rumah. Saat ini ada sekitar 1500 unit PAH di pulau tersebut yang diharapkan mampu selalu memenuhi kebutuhan air masyarakat, khususnya untuk minum dan memasak. Dengan kapasitas PAH rata-rata 4.000 liter dan asumsi satu keluarga terdiri dari 5-7 jiwa, maka air hujan yang ditampung diperkirakan dapat memenuhi kebutuhan minum dan memasak hingga tujuh bulan. Pengerjaan PAH seluruhnya dilakukan oleh masyarakat. Dari harga tiap unit Rp 2.850.000, Unicef hanya membantu pengadaan material senilai Rp 1.362.500 per unit, sedangkan sisanya ditanggung warga. Dari 20 kecamatan di Kabupaten Ende, bantuan PAH dikonsentrasikan di Kecamatan Pulau Kawran Ende yang tergolong sebagai daerah kejadian luar biasa (KLB) diare.



Foto: Koleksi Qipra

Teknologi pengolahan air skala rumah tangga dikembangkan untuk mengatasi permasalahan kelangkaan suplai air yang memenuhi kualitas air minum, misalnya yang di permukiman dekat lahan gambut. Dengan menggunakan teknologi sederhana dan murah, air gambut dapat diolah menjadi air bersih guna memenuhi kebutuhan rumah tangga. Tampak dalam gambar, Basah Hernowo (saat itu, Direktur Perumahan dan Permukiman BAPPENAS), Johan Susmono (Kementerian Dalam Negeri), dan Zaenal Nampira (Kementerian Kesehatan) sedang mengamati air yang dihasilkan dari instalasi pengolahan air gambut.



Foto: Koleksi Pokja AMPL

Daur ulang air limbah semakin banyak dilakukan, termasuk untuk menghasilkan air bersih yang dapat digunakan untuk penyiraman taman. Upaya tersebut akan mengurangi ketergantungan pengguna terhadap layanan penyediaan air minum. Tampak dalam gambar adalah penggunaan air hasil olahan air limbah untuk pemenuhan kebutuhan air penyiram tanaman yang dilakukan di Rumah Sakit Panti Rapih, Daerah Istimewa Yogyakarta.



Foto: Koleksi Istimewa

Tangki septik atau unit setempat jenis lainnya tetap dibutuhkan oleh suatu bangunan saat layanan jaringan perpipaan air limbah (*sewerage system*) belum tersedia. Asalkan ditempatkan di lokasi yang benar dan dibuat dengan disain, ukuran, material dan cara yang tepat, tangki septik dapat mengamankan dampak buruk dari air limbah rumah tangga. Apalagi jika penggunaan tangki septik juga didukung dengan penyedotan lumpur tinja secara berkala.



Foto: [www.myphilippineslife.com](http://www.myphilippineslife.com)

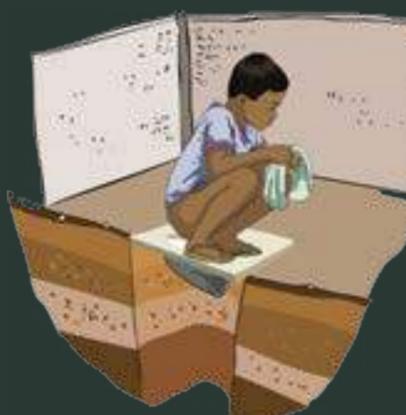
# Tangga Sanitasi

Saat beralih dari BAB sembarangan ke perilaku BAB yang lebih sehat, setiap keluarga mempunyai pilihan untuk membuat jenis jamban yang sesuai dengan kemampuan dan keinginannya masing-masing. Namun, dengan berjalannya waktu, diharapkan bahwa keluarga dapat meningkatkan kualitas jamban yang dimilikinya, sampai ke tingkat yang paling baik. Tahapan peningkatan kualitas jamban ditunjukkan dengan tangga sanitasi, yang menggambarkan jamban yang paling sederhana sampai dengan jamban yang memenuhi semua persyaratan kesehatan dan kebersihan.



## 3 Leher angsa

Leher angsa butuh air yang cukup banyak untuk pembilasan. Air juga berfungsi untuk mengurangi bau, ciri kebersihan dan sebagai tanda berfungsi tidaknya kloset. Leher angsa dapat dibeli di toko atau dibuat sendiri dengan menggunakan cetakan.



## 2 Plengsengan

Plengsengan dapat dibuat sendiri dengan kemiringan tertentu supaya tinja tidak langsung jatuh kebawah, tetapi melalui media kloset. Air hanya dibutuhkan untuk membilas. Penutupnya sebaiknya yang mudah diangkat atau dipindahkan.



## 1 Cemplung

Cemplung bentuknya berupa lubang yang menyalurkan tinja ke dalam tanah. Dapat dikelilingi bangunan yang tidak permanen. Cemplung tidak memerlukan air untuk pembilasan. Penutupnya sebaiknya yang mudah diangkat atau dipindahkan.

Ilustrasi : Taufik Sugandi



# tippy-tap

## Bahan:

-  1 jerigen plastik
-  2 batang kayu lurus @ 1 meter
-  2 batang kayu bercabang @ 2 meter seutas tali kuat
-  1 buah paku beton
-  1 buah lilin dan korek api
-  1 buah sabun
-  Kerikil



## Cara membuat:

- Pilih lokasi tepat untuk mendirikan *tippy-tap*.  
Sebaiknya di tempat dimana air bisa mengalir ke parit;
- Gali 2 lubang sedalam 0,5 meter dengan jarak 1 meter;
- Tanamkan kayu bercabang je dalam lubang dan samakan ketinggian keduanya;
- Isi lubang dengan tanah dan batu kemudian dipadatkan;
- Panaskan paku dan buat lubang pada jerigen;
- Sabun dilubangi dan masukkan tali;
- Gantungkan jerigen dan sabun , kemudian isi jerigen dengan air;
- Pasang tali pada pegangan jerigen dan sambungkan tali pada kayu untuk tuas kaki;
- Gunakan kerikil untuk menampung air.

# 10

## Libatkan Warga agar Berlanjut

Pemanfaatan hasil pembangunan akan lebih berlanjut jika masyarakat turut dilibatkan dalam proses perencanaan, pembuatan dan pengelolaannya. Program pembangunan air minum dan sanitasi sudah menerapkan pendekatan tersebut. Masyarakat diberdayakan agar mampu mengidentifikasi masalah, potensi dan kebutuhan permukimannya. Mereka diberi cukup informasi agar dapat memilih jenis fasilitas air minum, air limbah, sampah dan drainase yang tepat. Mereka dilatih dan didampingi agar pembuatan fasilitas berjalan benar dan lancar. Merekapun diberi kesempatan untuk mengelola layanan tersebut. Pemerintah memberi hibah dana untuk pembuatan fasilitas, sementara masyarakat menyiapkan lahan, tenaga dan dana pendamping.

Sektor air minum dan sanitasi meyakini bahwa rencana yang dibuat bersama dengan warga setempat akan memberikan hasil yang lebih berkelanjutan. Tingkat pemakaian fasilitas air minum dan sanitasi meningkat drastis. Pendekatan pembangunan dengan melibatkan masyarakat yang diberdayakan menjadi salah satu andalan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi di Indonesia.

# PAMSIMAS

Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) adalah salah satu program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia untuk mengatasi keterbatasan akses air minum di wilayah perdesaan dan pinggiran kota. Sasaran program ini adalah meningkatkan jumlah fasilitas air minum untuk warga masyarakat kurang terlayani termasuk masyarakat berpendapatan rendah di wilayah perdesaan dan peri-urban. Dengan PAMSIMAS, diharapkan mereka dapat mengakses pelayanan air minum dan sanitasi yang berkelanjutan serta meningkatkan penerapan perilaku hidup bersih dan sehat.

PAMSIMAS dikoordinasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum, dan didukung oleh Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, serta melibatkan Bank Dunia dan Australian Aid. PAMSIMAS dikenal juga sebagai program *the Third Water Supply and Sanitation for Low Income Communities (WSLIC-3)* yang dimulai sejak Juni 2008. Kegiatan pendahulunya, yaitu WSLIC-1 dimulai pada tahun 1993 sedangkan WSLIC-2 dimulai pada tahun 2000. Sampai tahun 2013, PAMSIMAS sudah berhasil menjangkau hampir 2000 desa di 32 propinsi, baik melalui dana APBN maupun APBD. Data pemantauan menunjukkan bahwa hanya 5 % fasilitas Pamsimas yang tidak terpakai. Ini merupakan kinerja yang luar biasa.



Foto : [www.ampl.or.id](http://www.ampl.or.id)



Foto : [www.for-mass.blogspot.com](http://www.for-mass.blogspot.com)



Foto : [www.mutahirpamsimas.blogspot.com](http://www.mutahirpamsimas.blogspot.com)



Foto : [www.ditpam-pu.org](http://www.ditpam-pu.org)



Foto : Koleksi Qipra



Foto: [www.mluthfiyanti.blogspot.com](http://www.mluthfiyanti.blogspot.com)

Melalui program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM), masyarakat juga dilibatkan untuk mengembangkan layanan sampah 3R untuk permukiman. Kegiatan ini menerapkan paradigma baru pengelolaan sampah, karena fasilitas sampah yang dibangun akan mampu memproses sampah organik menjadi pupuk organik, selain mampu memilah sampah untuk dapat dimanfaatkan kembali. Program SLBM didanai melalui mekanisme Dana Alokasi Khusus yang diberikan ke pemerintah kabupaten atau kota.



Foto : Koleksi Qipra



Foto : Koleksi Qipra



Foto : Koleksi Qipra



Foto : Koleksi Qipra



Foto : Koleksi Qipra

Peran aparat pemerintah dalam meyakinkan masyarakat untuk mau memulai pembangunan sarana air minum dan sanitasi sangat besar. Kehadiran aparat pemerintah, khususnya yang bertugas dalam pelaksanaan program SANIMAS dan PAMSIMAS, mampu memberikan jaminan akan kepastian bantuan yang akan diberikan pemerintah. Saat konstruksi sudah berjalan, kehadiran mereka juga membuat masyarakat merasa didampingi. Tampak dalam gambar, para staf pemerintah kabupaten dan kota yang banyak berperan dalam pengembangan SANIMAS di daerahnya masing-masing seperti Gresik, Bantul, Malang dan Denpasar.



Foto : Koleksi Qipra

Tenaga fasilitator lapangan sangat dibutuhkan dalam program pembangunan berbasis masyarakat. Mereka bertugas untuk meningkatkan kemampuan dan mendampingi masyarakat dalam meningkatkan minat masyarakat untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, menyusun rencana dan melakukan konstruksi sarana air minum dan sanitasi komunal sampai menyiapkan kelompok pengelola layanan tersebut. Di sisi lain, mereka juga harus memastikan pelaksanaan pembangunan berbasis masyarakat tersebut berjalan sesuai ketentuan-ketentuan administrasi yang berlaku.



# SANIMAS

Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS) merupakan program atau pendekatan pembangunan untuk menyediakan sarana air limbah bagi kawasan permukiman padat perkotaan yang banyak dihuni masyarakat berpenghasilan rendah. SANIMAS mengandalkan pola pemberdayaan masyarakat yang menjadikan masyarakat sebagai aktor utama dalam proses perencanaan, konstruksi, operasi dan pemeliharaan fasilitas sanitasi komunal. Dalam SANIMAS, masyarakat dapat memilih sarana sanitasi yang ingin dibangunnya, baik berupa MCK atau sarana jaringan perpipaan air limbah komunal, atau kombinasi keduanya.

Pembangunan fasilitas SANIMAS merupakan komponen utama dalam mencapai target RPJMN 2010–2014 bidang sanitasi, yaitu menyediakan akses terhadap layanan pengelolaan air limbah terpusat skala komunal untuk 5 % penduduk Indonesia di tahun 2014. Berbagai donor dan lembaga internasional turut membantu penerapan SANIMAS di Indonesia, termasuk *Asian Development Bank*, *Islamic Development Bank* dan lainnya. Pendekatan SANIMAS pertama kali diperkenalkan di Indonesia oleh lembaga nirlaba dari Republik Jerman, yaitu *Bremen Overseas Research and Development Association* (BORDA) bersama ketiga mitranya yaitu BaliFokus, Bina Ekonomi Sarana Terpadu (BEST), dan Lembaga Pengembangan Teknologi Pedesaan (LPTP). Setelah diujicobakan di tahun 2003, pendekatan SANIMAS kemudian diaplikasikan Kementerian Pekerjaan Umum ke ribuan lokasi di Indonesia.



Foto : Koleksi Qipra

# Berteman untuk Berkarya

Singkat cerita, melihat keberhasilan pilot project SANIMAS yang dilakukan BORDA dengan mitranya, Direktorat PPLP (Departemen Pekerjaan Umum) di tahun 2006 tertarik untuk mereplikasinya di 100 lokasi sekaligus. Masalahnya, direktorat itu belum pernah melakukan proyek prasarana fisik dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat. Banyak pertanyaan muncul di kepala Handi Legowo, staf PPLP pada saat itu. Misalnya, bagaimana meyakinkan atasannya, apakah BAPPENAS akan setuju, apa mungkin bekerjasama dengan LSM, lalu siapa pelaksananya. Beruntung Direktur PPLP saat itu, Susmono sangat mendukung replikasi SANIMAS tersebut. Beruntung juga Handi mengenal individu-individu yang perlu mendukung rencananya. Dia berteman baik dengan Basah Hernowo yang saat itu menjabat Direktur Permukiman dan Perumahan ( BAPPENAS), beserta stafnya, Nugroho Tri Utomo dan Oswar Mungkasa. Melalui Pokja AMPL, Handi bisa berkomunikasi secara luwes dengan mereka. Tidak perlu ada surat menyurat resmi, tidak perlu diskusi di ruang rapat. Berkat jalur pertemanan, rencana replikasi SANIMAS dapat disetujui. Replikasi itu kemudian dianggap berhasil sehingga pendekatan SANIMAS sampai saat ini terus diaplikasikan.



Foto: Koleksi Qipra



Foto: Koleksi Qipra



Foto: Koleksi Qipra



Foto: Koleksi Qipra

Pembangunan berbasis masyarakat memberikan banyak manfaat bagi warga setempat. Sebagian warga turut dipekerjakan sebagai tenaga pelaksana konstruksi. Pelatihan diberikan sebelumnya untuk memastikan para warga yang terlibat dalam konstruksi itu memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk membangun sarana air minum dan air limbah.





Semangat memperbaiki diri dapat terpicu setelah kita melihat tetangga yang lebih maju. Demikian pula bagi mereka yang ditugaskan membenahi layanan air minum dan sanitasi. Dengan melihat majunya layanan di daerah lain, mereka dapat terpicu memperbaiki layanan di daerahnya. Program-program pembangunan air minum dan sanitasi selama ini memberi kesempatan bagi pihak-pihak berkepentingan untuk berkunjung dan mempelajari keberhasilan daerah lainnya. Tidak hanya bagi pejabat pemerintahnya, tetapi juga bagi tokoh penggerak masyarakatnya. Proses pembelajaran horizontal demikian terbukti efektif dalam menginspirasi dan memberi pengetahuan yang mereka butuhkan untuk mempercepat pengembangan layanan air minum dan sanitasi di daerahnya.

# 11 TENGGOK RUMPUT TETANGGA

Suatu organisasi perlu mempelajari ilmu dan pengalaman dari organisasi sejenis yang lebih baik. Hal demikian sering terjadi di antara PDAM-PDAM di Indonesia, baik karena inisiatif mereka sendiri atau karena program kemitraan PERPAMSI. Saat ini, PDAM Kota Malang sering dijadikan tempat studi banding karena diakui memiliki keunggulan-keunggulan teknis dan manajerial. PDAM Kota Malang memiliki Zona Air Minum Prima (ZAMP) yang banyak dipelajari oleh mereka yang ingin mengembangkan layanan air siap-minum serupa.



Foto : [www.wibika.com](http://www.wibika.com)



Foto : [www.iuwash.or.id](http://www.iuwash.or.id)

Beberapa program bantuan asing turut aktif menyelenggarakan studi banding guna meningkatkan kapasitas pokja-pokja AMPL daerah. Sebagai contoh, program IUWASH, program USDP serta WSP Bank Dunia. Tampak dalam gambar, kunjungan kerja dari wakil-wakil pokja AMPL dari 8 kota yang diprakarsai IUWASH ke fasilitas sanitasi MCK++ di Kota Parepare, Sulawesi Selatan di tahun 2012.

Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) 3R Mulyoagung Bersatu, Kabupaten Malang sering dikunjungi oleh mereka yang ingin mempelajari upaya pengelolaan sampah yang lengkap. TPST 3R yang dibangun di tahun 2010 ini merupakan contoh bentuk pengelolaan sampah berbasis masyarakat. TPST 3R mampu mengelola sampah dari sekitar 6000 rumah di sekelilingnya. Hampir setiap hari, TPST 3R ini dikunjungi tamu-tamu dari berbagai daerah, seperti dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur.



Foto : [www.tpst-mulyoagungbersatu.blogspot.com](http://www.tpst-mulyoagungbersatu.blogspot.com)



Foto : [www.flickrhivemind.net](http://www.flickrhivemind.net)

Banyak pihak berkunjung ke kawasan-kawasan permukiman dimana masyarakatnya aktif mengelola lingkungannya. Selain melihat fasilitas yang ada, isu keberlanjutan layanan merupakan hal yang selalu ingin dipelajari. Sebagai contoh, kunjungan kerja wakil-wakil pemerintah ke kawasan permukiman Rancamanyar, Kabupaten Bandung yang terletak di tepi Sungai Citarum.

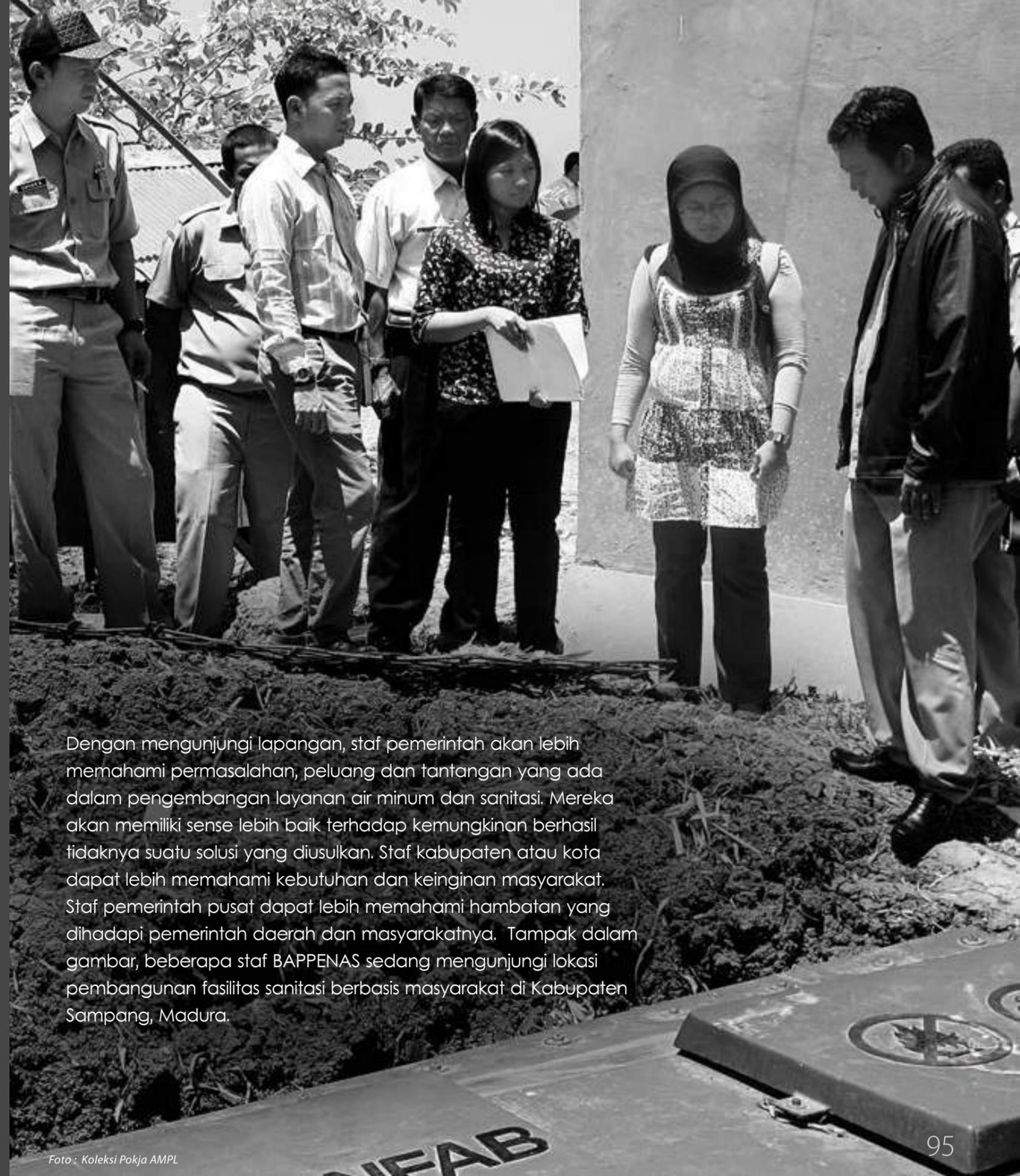
Tidak jarang juga wakil-wakil negara tetangga kita yang datang untuk melakukan studi banding dan bertukar pikiran dengan para pelaku pembangunan air minum dan sanitasi di Indonesia. Salah satunya, sebagaimana terlihat dalam foto, wakil-wakil pemerintah Republik Sosialis Vietnam dan Republik Demokratik Rakyat Laos sedang melihat lokasi pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur pada tahun 2008.



Asosiasi Kabupaten Kota Peduli Sanitasi Indonesia (AKKOPSI) membentuk tim *Advocacy and Horizontal Learning* (AHL), yang terdiri dari para "Walikota Duta AKKOPSI" serta para "champion" dari Pokja AMPL Provinsi dan Kabupaten/Kota. Beberapa di antaranya adalah Walikota Payakumbuh, Jambi, Tegal, Pekalongan, Ciamis dan Depok. Tim AHL melakukan *road show* mendatangi Kabupaten/Kota yang membutuhkan bimbingan untuk melakukan pembangunan di sektor sanitasi. Termasuk bimbingan untuk urusan penguatan kelembagaan dan penyelesaian dokumen-dokumen PPSP. Tampak dalam foto, Tim AHL bersama Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan dan Gubernur Jawa Timur Sukarwo sehabis mengikuti acara Forum AHL di Gedung Sate, Bandung pada bulan Maret 2015.



Foto : [www.pasberita.com](http://www.pasberita.com)



Dengan mengunjungi lapangan, staf pemerintah akan lebih memahami permasalahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pengembangan layanan air minum dan sanitasi. Mereka akan memiliki sense lebih baik terhadap kemungkinan berhasil tidaknya suatu solusi yang diusulkan. Staf kabupaten atau kota dapat lebih memahami kebutuhan dan keinginan masyarakat. Staf pemerintah pusat dapat lebih memahami hambatan yang dihadapi pemerintah daerah dan masyarakatnya. Tampak dalam gambar, beberapa staf BAPPENAS sedang mengunjungi lokasi pembangunan fasilitas sanitasi berbasis masyarakat di Kabupaten Sampang, Madura.

Foto : Koleksi Pokja AMPL

Foto : [www.kimbijak.blogspot.com](http://www.kimbijak.blogspot.com)

# MENCONTOH KAMPUNG SUKUN



Foto : [www.gatototobe.wordpress.com](http://www.gatototobe.wordpress.com)

Warga RW 03, Kelurahan Sukun, Kota Malang (Jawa Timur) patut berbangga karena sering dikunjungi oleh berbagai pihak yang ingin mempelajari keberhasilan warga dalam meningkatkan kondisi kampungnya. Kampung Sukun yang memiliki luas ± 1000 m<sup>2</sup> dan warga ± 800 jiwa ini dikenal sebagai kawasan permukiman yang sangat bersih dan hijau. Warganya memiliki kesadaran tinggi untuk mengelola sampahnya dengan baik. Sampah basah dipisahkan dan dimasukkan ke dalam komposter. Setiap bulan sampah kering akan diambil dan dipilah ulang oleh kader lingkungan hidup RW 03 untuk didaur-ulang sebagai bahan kerajinan atau dijual. Uang hasil penjualan sampah digunakan untuk pembelian bunga, pupuk, pot dan lain-lain yang dapat dimanfaatkan warga.

Kampung Sukun sering sekali menerima kunjungan dari berbagai instansi pemerintahan dari dalam dan luar kota. Juga kunjungan dari perwakilan kampung-kampung lain yang ingin menjadikan Kampung Sukun ini sebagai acuan. Tidak hanya melihat kegiatan dan fasilitas yang dimiliki kampung itu, tetapi para tamu-tamu itu juga ingin mempelajari berbagai aturan yang dikembangkan bersama oleh warga kampung itu. Beberapa di antaranya, aturan pemilahan dan pembuangan sampah, aturan pelarangan merokok di sembarang tempat dan aturan pembuangan limbah rumah tangga. Jalur terapi disediakan bagi pejalan kaki di sepanjang gang di kampung itu. Mereka yang berjalan tanpa alas kaki akan merasakan manfaat dari batu-batu kecil yang tersusun rapi di jalur tersebut. Itulah yang menyebabkan Kampung Sukun juga disebut sebagai Kampung Terapi.

*Foto disamping merupakan gambaran kegiatan yang dilakukan di Kampung Sukun. Kampung sukun adalah salah satu kampung yang memiliki lubang biopori terbanyak, total ada sekitar 100 buah lubang yang dibuat oleh warga. Warga kampung Sukun juga selalu menjaga lingkungannya tetap bersih, sehat dan indah. Beraneka bunga dan tanaman ditanam disetiap jengkal lahan yang tersedia. Pemilahan sampah juga dilakukan setiap hari, sampah kering dipisahkan tersendiri sedangkan sampah basah diolah menjadi kompos. Pada tahun 2012, Kampung Sukun mendapat kunjungan dari Menteri Lingkungan Hidup Kabinet Bersatu II (2009 – 2014), Balthasar Kambuaya, yang hadir untuk meninjau lokasi dan meresmikan Bank Sampah Malang (BSM) di wilayah Kampung Sukun.*



Foto : [www.bkm-lpmksukun.com](http://www.bkm-lpmksukun.com)



Foto : [www.bkm-lpmksukun.com](http://www.bkm-lpmksukun.com)

# 12 LIBATKAN ANAK-ANAK



Anak-anak dapat mempengaruhi orang-orang di sekitarnya. Ini sudah dibuktikan oleh sektor air minum dan sanitasi. Jika dibekali pengetahuan dan keterampilan praktis, anak-anak dapat berperan sebagai agen perubahan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), dan mempengaruhi teman, orang tua dan anggota keluarga lainnya. Selama belasan tahun, berbagai kegiatan sudah dilakukan untuk membekali anak-anak dengan pengetahuan PHBS. Ada kegiatan percontohan dan kunjungan lapangan, ada pula kegiatan-kegiatan lomba dan festival. Di beberapa tempat, anak-anak bahkan bertindak langsung untuk menjaga kebersihan lingkungannya.



Juara Lomba Poster Sanitasi Jambore Sanitasi Tahun 2013

Foto : [ciptakarya.po.go.id](http://ciptakarya.po.go.id)

Foto : Koleksi Qlpra



Berbagai lomba bertema air minum dan sanitasi diadakan untuk menarik kepedulian anak-anak terhadap sanitasi dan pada akhirnya mereka bisa menjadi agen perubahan bagi orang disekitarnya. Salah satunya adalah lomba melukis untuk anak-anak Sekolah Dasar sebagai bagian dari acara Jambore Sanitasi.



Banyak acara penyadaran sanitasi diadakan untuk kelompok sasaran anak sekolah. Dari pengetahuan yang di dapat di acara-acara tersebut, anak-anak akan menyampaikan pesan-pesan kepedulian dan perilaku sanitasi ke para orang tua dan orang-orang dewasa lainnya. Dalam foto, tampak siswa dari salah satu Sekolah Dasar Negeri di Surabaya sedang diajari cara memilah sampah sesuai jenisnya. Acara kampanye PHBS tersebut diadakan di tahun 2011 dan diikuti oleh 390 murid kelas 2 sampai kelas 5.

Foto : Koleksi Pokja AMPL

Dalam merancang fasilitas sanitasi, anak-anak perlu diberi kesempatan untuk memberi masukan. Kondisi fisik mereka perlu diperhatikan, baik dalam penentuan tata letak dan dimensi jamban, alat pengangkutan sampah, tempat cuci tangan dan jenis keran.



Foto : Koleksi Pokja AMPL

Penyadaran PHBS di lingkungan sekolah juga dilakukan melalui Program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan Dokter Kecil. Para dokter kecil mengajak kawan-kawannya cuci tangan pakai sabun, menggunakan jamban sekolah dan mengamati kebersihan ruangan.



Foto : Koleksi Pokja AMPL

## Sanitasi Sekolah

Program "Sanitasi Sekolah" digulirkan untuk meningkatkan perhatian pengelola sekolah terhadap sanitasi, sekaligus memperbaiki perilaku hidup bersih dan sehat dari sekitar 55 juta pelajar sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Melalui program ini, siswa juga diharapkan menjadi agen perubahan yang mempengaruhi orang tuanya untuk memiliki jamban yang layak di rumah masing-masing.

Program ini melibatkan kerjasama antara Kementerian Pekerjaan, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kolaborasi menghasilkan pembangunan fasilitas sanitasi di sekolah, penataran cuci-tangan pakai sabun bagi guru dan siswa, peningkatan peran Dokter Kecil serta Usaha Kesehatan Sekolah (UKS). Lembaga internasional dan swasta juga memberi kontribusi berarti bagi pelaksanaan program Sanitasi Sekolah, termasuk UNICEF, *Save The Children* dan *Care*.



Foto : Koleksi UNICEF

# SETIAP TAHUN, JAMBORE SANITASI



Foto : ciptakarya.po.go.id



Foto : ciptakarya.po.go.id



Foto : ciptakarya.po.go.id



Foto : ciptakarya.po.go.id

Jambore Sanitasi dihadiri oleh siswa-siswi SMP yang terpilih untuk mewakili tiap provinsi di Indonesia. Mereka merupakan pemenang dari lomba karya tulis dan poster di provinsinya masing-masing. Selama hampir dua minggu mereka berkumpul untuk mengikuti acara-acara yang disediakan penyelenggaranya, yaitu Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum.

Acara puncak dari jambore yang diadakan sejak 2008 ini adalah pemilihan Duta Sanitasi. Mereka yang terpilih diharapkan dapat menjadi agen perubahan sanitasi. Acara lainnya adalah pembekalan, kerja lapangan, pentas kesenian daerah dan wisata. *Rundown* acara disesuaikan dengan tema tahunan dari jambore tersebut. Di tahun 2014, temanya adalah Sanitasi Mendukung Air dan Energi yang Berkelanjutan.

Dalam Jambore Sanitasi tersebut, mereka dengan sendirinya saling bertukar informasi, gagasan dan pemikiran terkait masalah air minum dan sanitasi. Setelah itu, merekapun terus diharapkan berhubungan baik melalui jejaring sosial maupun internet.

Setelah mengikuti jambore, mereka tentunya diharapkan dapat memotori promosi peningkatan kondisi sanitasi dimanapun mereka berada.

# 13

## GANDENG SWASTA

Pihak swasta memegang peranan penting dalam penyediaan layanan air minum dan sanitasi di Indonesia. Pemerintah tidak mungkin berperan sendiri dalam menyediakan layanan-layanan tersebut. Banyak perusahaan swasta di Indonesia sejak dahulu sudah terlibat dalam layanan penyediaan air minum, persampahan, air limbah dan drainase. Mulai dari penyediaan alat dan bahan, perencana dan pelaksana konstruksi sampai ke pengoperasian fasilitasnya. Tidak hanya memanfaatkan peluang yang ada, pihak swasta di Indonesia juga siap untuk berinvestasi membangun dan mengoperasikan fasilitas-fasilitas air minum, persampahan dan air limbah. Di sisi lain, beberapa perusahaan swasta seringkali menjadi sponsor bagi kegiatan-kegiatan penyadaran PHBS maupun pembangunan sarana air minum dan sanitasi komunal. Baik dalam kerangka *corporate social responsibility* (CSR) maupun dalam bentuk partisipasi biasa, peran sektor swasta semakin meningkat dari tahun ke tahun, khususnya di daerah-daerah masyarakat berpenghasilan rendah.

Anggaran pemerintah hanya mampu menutupi 40 persen dari total kebutuhan dana untuk mencapai target *universal access*. Investasi dari sektor swasta sangat dibutuhkan untuk pengembangan sarana air minum, sampah, drainase dan air limbah. Salah satu contohnya adalah investasi swasta untuk Instalasi Pengolahan Air Sepatan (Kabupaten Tangerang) oleh PT Aetra Air Tangerang. Instalasi ini mampu menghasilkan air bersih siap minum untuk 52.000 pelanggan. Instalasi ini merupakan satu dari 30 lebih contoh Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) yang sudah ada di seluruh Indonesia. Peran serta swasta dalam sistem penyediaan air minum didorong pemerintah melalui BPSPAM (Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum). Badan yang dibentuk tahun 2005 ini diharapkan dapat menyeimbangkan kepentingan konsumen dengan penyedia jasa pelayanan.



Foto : Koleksi Qipra

Pihak swasta sudah memainkan banyak peran dalam pengembangan dan pengelolaan layanan air minum dan sanitasi. Baik di sektor jasa maupun sektor produksi, kita dapat menjumpai pengusaha dan perusahaan yang mengisi peluang tersebut. Mulai dari jasa penyapuan jalan, pengambilan sampel air, pengisian ulang air minum, pengadaan WC berjalan sampai produksi tangki septik plastik, pengolahan pelet pupuk organik, pembuatan pipa.

# Jejaring AMPL

Pihak swasta yang bergerak di bidang sanitasi juga diajak bergabung ke suatu wadah komunikasi yang dinamakan Jejaring AMPL. Di dalamnya juga tergabung pemangku-pemangku kepentingan sektor air minum dan sanitasi lainnya, seperti kementerian terkait, perguruan tinggi, lembaga donor serta pengelola-pengelola program. Pembentukan Jejaring AMPL disepakati dalam suatu rapat di BAPPENAS pada bulan Februari 2007. Pertemuan lebih intensif kemudian dilakukan pada bulan Juli dan Agustus 2007 dan menghasilkan draft konsep dan arahan strategis Jejaring AMPL. Konsep ini menjadi dasar



Foto : Koleksi Pokja AMPL

dari pernyataan bersama anggota dan menjadi mandat untuk dilaksanakan. Jejaring AMPL bersifat independen, yang berfungsi sebagai sebagai wadah untuk membangun komunikasi, mensinergikan potensi informasi dan pengetahuan antar pemangku kepentingan di sektor air minum dan sanitasi. Tampak dalam foto di atas (dari kiri) adalah Oswar Mungkasa (Pokja AMPL), Syarif Puradimadja (ISSDP), Rositayanti Hadisoebroto (Teknik Lingkungan - Universitas Trisakti), Gary Swisher (WASPOLA), Taufik Rochman (Plan Indonesia), Didier Perez (Program Air Kita), dan Manfed Oepen (Jaringan Air dan Sanitasi). Foto tersebut diambil pada sat pertemuan rutin anggota Jejaring AMPL pada February 2008.



Foto : Koleksi Pokja AMPL



Foto : Koleksi Pokja AMPL

Pengusaha sanitasi juga ada di tingkatan masyarakat desa. Mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk membuat jamban dan unit setempat yang murah namun memenuhi syarat kesehatan dan kenyamanan. Para pengusaha atau wirausaha sanitasi ini kemudian membentuk Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Sanitasi Indonesia (APPSANI). Kiprah para anggota APPSANI secara keseluruhan telah berhasil meningkatkan akses jamban sehat di sekitar 14 ribu desa dari 20 ribu desa target STBM di Indonesia. APPSANI telah melakukan "Pelatihan Marketing Sanitasi" dilanjutkan dengan "Pelatihan Wirausaha Sanitasi" di lima provinsi yakni Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Bali dan Nusa Tenggara Barat dan sudah lebih dari 1.000 orang sudah dilatih secara profesional, dimana sekitar 30-40 persen di antaranya sukses menjadi pengusaha sanitasi. Yang menarik, lembaga ini turut memberikan advokasi kepada pemerintah yang selama ini selalu mendukung program peningkatan akses sanitasi melalui marketing sanitasi di beberapa provinsi.



Beberapa perusahaan swasta turut aktif dalam melakukan kampanye penyadaran masyarakat di bidang air minum dan sanitasi. Salah satunya penyadaran terkait perilaku cuci tangan pakai sabun. Tampak dalam gambar, kampanye CTPS yang dilakukan PT Unilever Indonesia dengan melibatkan 100 ribu pelajar SD di 14 kota.

Foto : Koleksi Pokja AMPL



Foto : Ahok.org

DKI Jakarta beberapa kali menerima sumbangan truk sampah dari pihak swasta. Jumlahnya mencapai 100 truk lebih, termasuk dari perusahaan otomotif, asosiasi pengusaha dan pihak swasta luar negeri. Sumbangan truk ini sangat bermanfaat mengingat Jakarta membutuhkan sekitar 700 unit truk untuk menggantikan truk sampah yang ada. Tampak dalam gambar, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama sedang menerima bantuan truk sampah dari salah satu perusahaan swasta.

Berbeda dengan donasi atau kegiatan amal, kegiatan *Community Social Responsibility* (CSR) dilakukan perusahaan sebagai bagian dari upaya mereka untuk meningkatkan partisipasi dan posisinya dalam komunitas guna kemaslahatan bersama. Dengan CSR, perusahaan menyeimbangkan kepentingan internal mereka dengan kepentingan pemangku kepentingan eksternal. Seiring dengan meningkatnya kesadaran akan CSR, partisipasi pihak swasta dalam pembangunan air minum dan sanitasi juga semakin terlihat. Tampak dalam gambar, beberapa contoh kegiatan CSR perusahaan-perusahaan swasta Indonesia. Searah jarum jam, fasilitas MCK dengan energi surya yang didirikan oleh Bank Mandiri dan Wijaya Karya di Bekasi, penyediaan sarana air bersih oleh Tambang Emas Martabe di Tapanuli Selatan (Sumatera Utara), pembagian air ke masyarakat oleh Unit Bina Mitra PDAM Kota Bogor, dan kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Surabaya oleh PT Pertamina (Persero).



Foto : <http://www.greatmartabe.com/>



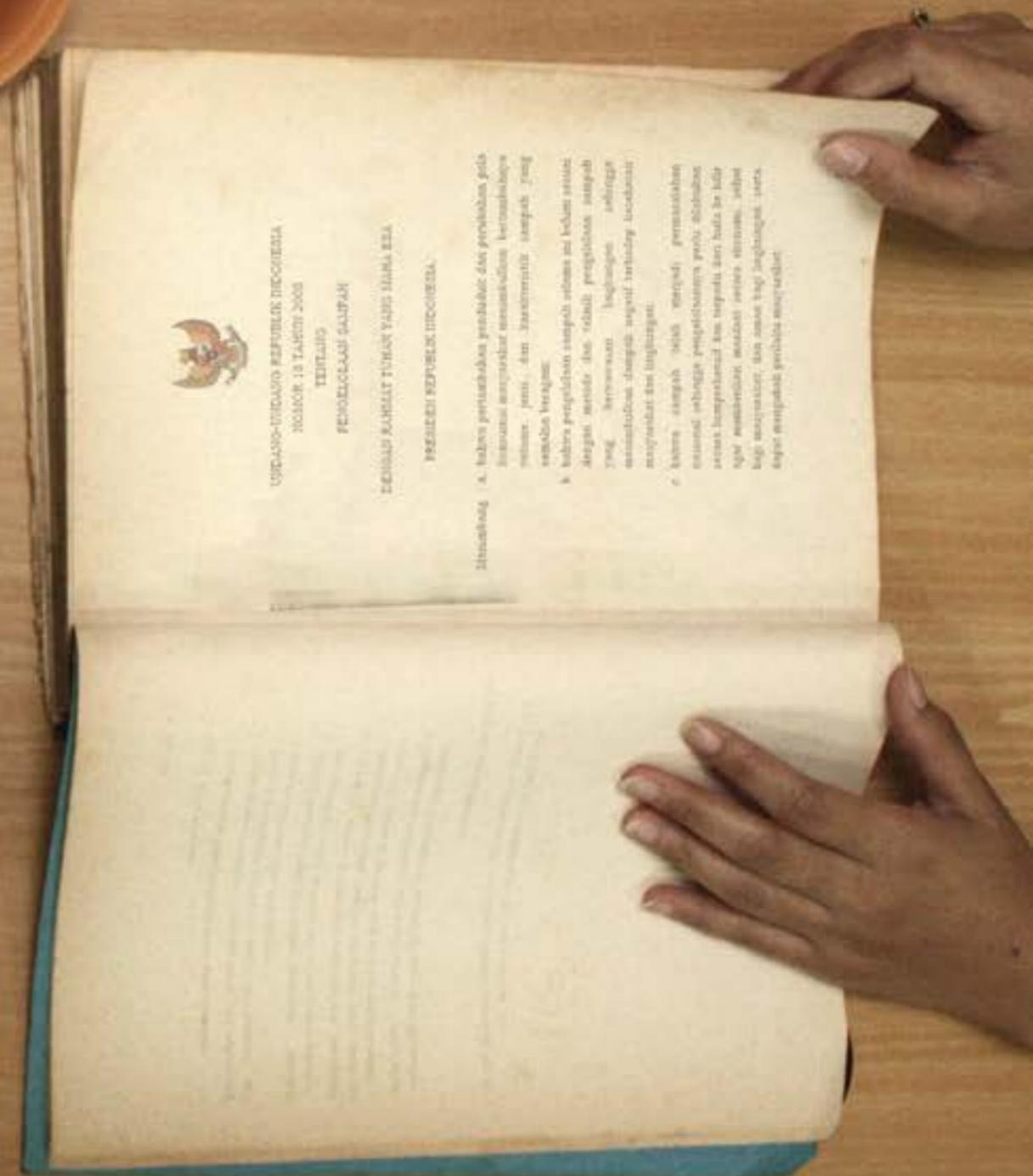
Foto : <http://csrpdamkotabogor.wordpress.com>



Foto : <http://csr.bankmandiri.co.id/>

# 14 ATUR ATURANNYA

Terkadang mengandalkan kesadaran saja tidak cukup, masyarakat perlu dipaksa agar mau mengelola sampah dan air limbahnya dengan benar. Untuk itulah, pemerintah kabupaten dan kota perlu mengembangkan peraturan-peraturan yang diikuti dengan upaya penataan yang baik. Untuk mereka yang tidak taat, tentu akan ada sanksinya. Tetapi sebaliknya, untuk mereka yang taat, pemerintah juga perlu memberikan insentif. Di sisi lain, peraturan juga dibutuhkan untuk memaksa pemerintah sendiri agar mau mengembangkan layanan air minum, persampahan, air limbah dan drainase yang memuaskan dan aman bagi lingkungan.





UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah meminta bupati dan walikota untuk menerapkan metoda *sanitary landfill*. Artinya, tidak boleh ada lagi tempat pembuangan akhir sampah terbuka (*open dumping*). Istilah TPA diartikan sebagai Tempat Pemrosesan Akhir, yaitu tempat terakhir sampah dalam tahap pengelolaannya sejak di sumber, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, pengolahan, dan penimbunan (pembuangan). Salah satu kota yang sudah menerapkan ketentuan ini adalah Kota Banjar (Jawa Barat). Kota ini sudah memiliki TPA yang menerapkan upaya pemilahan, pengomposan sampah organik, penyiapan bahan daur ulang dan penimbunan sampah dengan metode *sanitary landfill*.



Semakin banyak pemerintah daerah memiliki peraturan daerah terkait air minum dan sanitasi. Ada yang peraturan baru, ada juga yang penyempurnaan dari peraturan sebelumnya. Tidak hanya di tingkatan provinsi tetapi juga di tingkatan kabupaten dan kota. DKI Jakarta saat ini sudah memperbaharui peraturan daerahnya terkait pengelolaan persampahan. Arahannya pengelolaan sampah ditata ulang sesuai ketentuan undang-undang pengelolaan sampah. Sanksi terhadap berbagai pelanggaran dipertegas, tidak hanya untuk masyarakat tetapi juga untuk pihak pengelola sampah. Demikian juga Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota Batam, Kota Bandung, Kota Balikpapan, Kota Semarang, Kota Makassar, Kota Pekanbaru, Kabupaten Malang, Kabupaten Buleleng, Kota Manado dan lainnya. Untuk urusan air limbah domestik, Kota Medan, Kota Banjarmasin, Kota Makassar, Kota Malang dan beberapa kota lainnya sudah memiliki peraturan daerahnya.

Keinginan untuk terus meningkatkan kualitas air minum bagi masyarakat terlihat dari diberlakukannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416 tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air minum. Dibandingkan peraturan-peraturan sebelumnya, peraturan No. 416/2010 ini membatasi dirinya hanya untuk mengatur kualitas air minum saja. Beberapa parameter kualitas air minum diperketat dibandingkan peraturan tahun 2002 guna memastikan air minum yang dihasilkan benar-benar memenuhi syarat kesehatan untuk dapat langsung diminum. Aspek pengawasan kualitas juga lebih dirinci dalam peraturan No. 416/2010 ini, termasuk menyangkut kegiatan inspeksi sanitasi terhadap Depot Air Minum.



Foto : Koleksi Pokja AMPL

Foto : [www.pdpalbanjarmasin.com](http://www.pdpalbanjarmasin.com)



Foto : [www.pdpalbanjarmasin.com](http://www.pdpalbanjarmasin.com)



Foto : [www.pdpalbanjarmasin.com](http://www.pdpalbanjarmasin.com)



Foto : [www.pdpalbanjarmasin.com](http://www.pdpalbanjarmasin.com)

Peraturan tidak akan banyak berpengaruh jika tidak disosialisasikan ke para pihak berkepentingan. Bukan hanya ke masyarakat, tetapi juga ke seluruh jajaran pemerintah. Penting sekali bagi suatu daerah agar para pimpinannya mengetahui keberadaan suatu peraturan daerah dan memiliki persepsi yang sama terhadap peraturan tersebut. Foto di atas menunjukkan acara peninjauan fasilitas pengolahan air limbah di Kota Banjarmasin yang dilakukan sebagai bagian dari acara sosialisasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No. 7 Tahun 2010 tentang Ijin Pembuangan dan Pengelolaan Limbah Cair pada tahun 2012. Hadir dalam kesempatan itu adalah wakil walikota, perwakilan DPRD, para pimpinan satuan kerja peringkat daerah, pengusaha perumahan serta lurah dan camat Kota Banjarmasin. Turut hadir juga mewakili pemerintah pusat adalah Sjukrul Amien (Direktur PPLP, Kementerian Pekerjaan Umum saat itu).



Peraturan di tingkat komunitas juga dibutuhkan untuk menjamin keberlanjutan fasilitas air minum atau sanitasi yang dibangun bersama oleh masyarakat. Sebagai organisasi pengelola, Kelompok Swadaya Masyarakat di kawasan tersebut umumnya bertanggungjawab untuk merumuskan peraturan yang berisi hasil kesepakatan-kesepakatan masyarakat. Termasuk di dalam aturan tersebut adalah ketentuan pemakaian, tatacara pemeliharaan, besar dan mekanisme pembayaran tarif serta pertanggungjawaban organisasi pengelola.



Di tingkat kementerian, berbagai peraturan diterbitkan sesuai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah di atasnya. Peraturan menteri umumnya berisi persyaratan, batasan dan tatacara untuk mengimplementasikan kewajiban peraturan perundangan di atasnya. Sebagai contoh, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, dan Recycle* Melalui Bank Sampah. Untuk urusan yang sama, Kementerian Pekerjaan Umum mengeluarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

# Kota Tarakan

Kondisi air minum dan sanitasi di Kota Tarakan sungguh tidak sebanding dengan kekayaan sumber minyak bumi dan gas yang dimilikinya. Akibatnya derajat kesehatan warga menurun dan wajah kota menjadi buruk karena lingkungan yang kotor. Hal inilah yang kemudian melatarbelakangi pemerintah Kota Tarakan untuk mengeluarkan Perda No. 3 Tahun 2011 tentang Kesehatan Lingkungan. Beberapa sasaran ditentukan dalam peraturan tersebut, antara lain menyangkut urusan pengawasan kualitas air minum, pengelolaan sampah serta sanitasi lingkungan permukiman. Waktu pembuangan dan pengangkutan sampah diatur secara tegas dalam peraturan ini, demikian pula terkait kewajiban pemerintah untuk mengembangkan fasilitas pengomposan. Peraturan ini kemudian diimplementasikan dengan baik melalui penegakan hukum yang tegas. Hasilnya dapat dilihat, Kota Tarakan menjadi salah satu kota yang memiliki lingkungan yang bersih dan teratur. Beberapa penghargaan berhasil diraih sebagai bentuk apresiasi pihak-pihak luar terhadap kemajuan kondisi air minum dan sanitasi di Kota Tarakan. Dalam Konferensi Sanitasi Air Minum dan Sanitasi 2011, Kota Tarakan menerima penghargaan atas Inisiatif Terbaik di Bidang Kelembagaan dan Regulasi Kesehatan Lingkungan. Salah satu poin penting dalam penilaian tersebut adalah keberadaan peraturan tersebut beserta implementasinya. Kota Tarakan juga meraih *Pilot City Award for Excellence* dari *Democratic Local Governance in South East Asia (DELGO'SEA)* di tahun 2012 atas keberhasilannya melakukan upaya daur ulang dengan melibatkan sekolah, kelompok masyarakat, toko-toko kerajinan dan depo sampah.



Foto : [www.ampl.or.id](http://www.ampl.or.id)



Foto : [www.delgosea.eu](http://www.delgosea.eu)



Foto : [sahril70.wordpress.com](http://sahril70.wordpress.com)



# 15 Kendalikan Setiap BANTUAN

Sebagai negara berkembang, kita memang masih membutuhkan bantuan negara lain untuk mendukung kegiatan-kegiatan pembangunan kita. Tidak terkecuali untuk pembangunan air minum dan sanitasi. Sejak menjadi isu global, dengan adanya deklarasi *Millenium Development Goals*, banyak negara lain, lembaga donor dan organisasi luar negeri menyalurkan berbagai jenis bantuan agar kita dapat memenuhi target akses layanan air minum dan sanitasi. Ada bantuan program, ada bantuan alat dan ada juga bantuan teknis. Beberapa bantuan bersifat hibah, beberapa lainnya bersifat pinjaman. Sekecil apapun, bantuan-bantuan mereka pasti bermanfaat. Yang penting, semua bantuan dapat dikoordinasikan oleh pemerintah agar tetap selaras dengan kebutuhan dan rencana pembangunan kita.

## WSLIC



Foto : AMPL Pokia



Foto : AMPL Pokia

Proyek WSLIC (*Water Supply and Sanitation Project for Low Income Communities*) dimulai di tahun 2013 dengan dana pinjaman Bank Dunia. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat pedesaan, khususnya melalui sarana air bersih dan sanitasi. Masyarakat diberdayakan untuk mengembangkan sendiri sarana tersebut. WSLIC sudah berlangsung dalam 3 tahap. Tahap 1 (1993 – 1999) di 2.026 desa (6 provinsi), tahap 2 (2000 – 2009) di 2.350 desa (8 provinsi) sedangkan tahap 3 (2008 – 2012) atau kemudian disebut PAMSIMAS di 6.845 permukiman (15 provinsi). Untuk 2013 – 2016, WSLIC 3 dilanjutkan di 5.000 kawasan permukiman (32 provinsi). Saat ini WSLIC/Pamsimas berada di bawah koordinasi Kementerian Pekerjaan Umum. Selain pinjaman Bank Dunia, WSLIC/Pamsimas juga didukung pendanaan hibah dari Aus-AID.

## WASPOLA



Foto : AMPL Pokia



Foto : AMPL Pokia

Dimulai tahun 1998, program *Water Supply and Sanitation Policy Formulation and Action Planning* (WASPOLA) dirancang untuk meningkatkan kapasitas pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam mengembangkan kebijakan AMPL. WASPOLA aktif mendukung aktivitas Pokja AMPL Nasional. Di tahun 2011, WASPOLA diubah menjadi *WASPOLA Facility*. Sumber daya WASPOLA digunakan untuk bantuan fasilitasi teknis dalam menindaklanjuti hasil-hasil pembangunan, termasuk dengan menyediakan tenaga ahli dan fasilitator, lokakarya dan pelatihan, konsultasi penyusunan strategi pembangunan air minum dan sanitasi. WASPOLA didanai hibah Pemerintah Australia (melalui Aus-AID) yang disalurkan dan dikelola oleh WSP-EAP. Secara resmi, program WASPOLA Facility dinyatakan selesai di akhir tahun 2014.

## ISSDP & USDP



Foto : AMPL Pokia



Foto : AMPL Pokia

Foto : www.usdp.or.id

Salah satu program yang turut merintis PPSP adalah *Indonesian Sanitation Sector Development Program* (ISSDP). Berlangsung tahun 2006 – 2010, program ini mendorong kabupaten/kota untuk mengembangkan kebijakan terkoordinasi, mereformasi kelembagaannya dan menyusun SSK. ISSDP yang berlangsung di 12 kota ini kemudian dilanjutkan dengan *Urban Sector Development Program* (USDP) di tahun 2010 – 2014. Program ini mengintensifkan apa yang dirintis ISSDP ke seluruh Indonesia. USDP memberikan dukungan teknis pada Pokja AMPL Nasional. Baik ISSDP maupun USDP didanai hibah Kerajaan Belanda melalui WSP-EAP. Dalam *City Sanitation Summit* di Bandung, USDP mendapat penghargaan 'Best Partner' yang diserahkan Menko Kesejahteraan Rakyat kepada pimpinan USDP, Bram van der Boon.

## ESP & IUWASH



Foto : AMPL Pokia



Foto : IUWASH.or.id

Program *Indonesia Urban Water Sanitation and Hygiene* (IUWASH) merupakan program bantuan pemerintah Amerika Serikat yang berlangsung tahun 2010 – 2015. IUWASH bekerja di 54 kabupaten/kota (9 provinsi) sesuai strategi pembangunan yang ditetapkan pemerintah, misalnya PPSP, STBM, pembangunan berbasis masyarakat. IUWASH membantu pemerintah daerah mengembangkan lembaga-lembaga pengelola sanitasi, beserta kerangka regulasi dan finansialnya. Kegiatan pilot dilakukan di skala permukiman dan kota, salah satunya dalam mengembangkan layanan lumpur tinja terjadwal di 4 kota. IUWASH merupakan lanjutan *Environmental Services Program* (ESP) yang berlangsung di tahun 2004 – 2009. Berbeda dengan ESP, IUWASH tidak mencakup urusan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS).



Foto : www.indii.co.id



Foto : AMPL Pokia

Program *Australia-Indonesia Infrastructure Initiative Grants for Sanitation* (sAIG) atau Program Hibah Air Minum dan Sanitasi (PROHAMSAN) berlangsung dari tahun 2009 – 2015 dengan pendanaan pemerintah Australia. Melalui sAIG, hibah disediakan bagi pemerintah kabupaten/kota untuk membangun *sewerage system* skala 200 – 400 KK, menambah jaringan perpipaan di *sewerage system* yang sudah ada atau membangun *transfer station* persampahan. Hibah diberikan sebagai reimbursement atas pekerjaan yang sudah dilakukan (*output-based*). Program ini berada di bawah koordinasi BAPPENAS, Kementerian Keuangan dan Kementerian Pekerjaan Umum. Hanya kabupaten/kota yang sudah memiliki atau sedang menyusun dokumen SSK yang dapat memanfaatkan hibah sAIG ini.



Foto : ciptakarya.pu.go.id



Foto : ciptakarya.pu.go.id

*Urban Sanitation and Rural Infrastructure* (USRI) merupakan program bantuan yang dirancang untuk mendukung pembangunan layanan sanitasi berbasis masyarakat di lokasi-lokasi yang sudah menerima kegiatan PNPM Mandiri. Didanai pinjaman ADB (*Asian Development Bank*), program USRI berlangsung dari tahun 2011 – 2014 di 1.350 lokasi yang tersebar di 34 kabupaten dan kota (5 provinsi). Selain menyediakan hibah untuk membangun fasilitas MCK atau jaringan perpipaan air limbah komunal ke kawasan permukiman terpilih, USRI juga menyediakan ribuan tenaga fasilitator lapangan yang akan mendampingi masyarakat selama proses pengembangan fasilitas tersebut. Kegiatan USRI dikenal juga sebagai kegiatan Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat (SPBM).

# UNICEF

The *United Nations Children's Fund* (UNICEF) adalah program Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mempromosikan hak dan kehidupan yang lebih baik bagi setiap anak di 190 negara. Di Indonesia, UNICEF sangat aktif menyelenggarakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kesadaran anak-anak dan masyarakat terhadap perilaku hidup yang bersih dan sehat. Mereka sangat mendukung prakarsa pemerintah dan kelompok-kelompok masyarakat yang dalam menerapkan pendekatan STBM. Salah satu kegiatan UNICEF di Indonesia adalah kegiatan *Water, Sanitation and Hygiene* (WASH) yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak melalui peningkatan layanan air minum, sanitasi dan higiene. Program WASH sebenarnya merupakan kelanjutan dukungan UNICEF terhadap bencana tsunami Aceh di tahun 2004. Lokasi kegiatan WASH saat ini



Foto : Koleksi Qipra

Plan Indonesia memiliki prioritas pada penyediaan air dan sanitasi. Plan Indonesia Program Unit Grobogan telah mengakhiri proyek CLTS (*Community Led Total Sanitation*) di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, pada Desember 2012 lalu. Setelah dua tahun berjalan, Plan Indonesia berhasil mendorong 149 Desa dari 10 Kecamatan untuk mendeklarasikan diri sebagai desa yang bebas dari perilaku Buang Air Besar Sembarangan (BABS). Pemerintah telah mereplikasi keberhasilan ini di wilayah non-Plan. Di tingkat sekolah, Plan membantu membangun jamban, sistem pembuangan limbah dan teknologi biogas.



Foto : Koleksi ACF Indonesia

Untuk memudahkan koordinasi antara lembaga-lembaga asing yang membantu Pemerintah Indonesia untuk sektor sanitasi, pada tahun 2007 dibentuklah suatu kelompok yang diberi nama *Sanitation Donor Group* (SDG). Kelompok ini dimotori oleh World Bank melalui WSP (*Water and Sanitation Program*). SDG ini melakukan rapat berkala untuk berbagi perkembangan dengan program masing-masing di sektor sanitasi. Pada 2012, namanya berubah menjadi SPG atau *Sanitation Partner Group*. Pemerintah yang diwakili oleh Bappenas, kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Kesehatan diundang secara rutin dalam setiap rapat koordinasi yang diadakan. Dari tahun 2007 hingga 2015, 33 rapat koordinasi telah diadakan dengan rata-rata 5 rapat pertahunnya. Kelompok ini terbukti sangat efektif dalam meningkatkan komunikasi dan sinergi antara pemerintah dengan lembaga donor.



Foto : Koleksi UNICEF

umumnya berada di Indonesia Timur. Untuk meningkatkan peran anak dalam mengubah perilaku sanitasi masyarakat, UNICEF juga menyelenggarakan program WASH di sekolah-sekolah, yang disebut program Sanitasi Sekolah. Selain membantu masyarakat meningkatkan akses masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi, UNICEF juga memberikan bantuan teknis kepada pemerintah untuk mengembangkan kebijakan air dan sanitasi. Belakangan ini UNICEF juga menyelenggarakan kampanye sosial media sanitasi melalui situs Tinju Tinja. Tujuannya untuk mempromosikan kesadaran masyarakat luas tentang sanitasi dan mendapat peran serta mereka terhadap STBM.



## JICA

*Denpasar Sewerage Development Program (DSDP)* dilaksanakan dengan bantuan pemerintah Jepang yang disalurkan melalui *Japan International Cooperation Agency (JICA)* dan *Japan Bank for International Cooperation (JBIC)*. DSDP diresmikan di tahun 2008 oleh Presiden RI saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono. DSDP tahap 2 dilanjutkan di tahun 2010 dengan dana pinjaman JBIC. Selain membantu membantu Kota Makasar dan Kota Surabaya, JICA juga membantu DKI Jakarta untuk perluasan sewerage system-nya. Dalam menjalankan kegiatannya, JICA berada di bawah koordinasi Kementerian Pekerjaan Umum.



Foto : Koleksi Qipra



Foto : www.ampl.or.id

## World Bank

Bank Dunia (*the World Bank*) memberi berbagai bantuan hibah dan pinjaman untuk pengembangan layanan air minum, sampah, air limbah dan drainase. Salah satu pinjamannya diperuntukkan untuk mendanai WSLIC atau PAMSIMAS. Bank Dunia turut membantu peningkatan akses air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah, seperti di Kota Surabaya melalui pola pendanaan *Global Partnership Output Based Aid (GPOBA)* Air Minum. Selain itu, Bank Dunia juga mendanai pengembangan layanan air limbah di Kota Balikpapan dan layanan persampahan di beberapa kota Indonesia.

## ADB

Bank Pembangunan Asia (*Asian Development Bank*) di tahun 2012 mendanai Metropolitan Sanitation Management and Health Project (MSMHP) yang bertujuan untuk mengembangkan prasarana air limbah perkotaan di Kota Medan dan Kota Yogyakarta. Untuk daerah perdesaan, ADB memberikan pinjaman untuk mendanai Community Water Services and Health Project (CWSHP) di tahun 2005 guna mengembangkan fasilitas air minum dan sanitasi untuk 1000 kawasan permukiman di provinsi-provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Jambi dan Bengkulu. Belakangan, ADB memberikan pinjaman ke pemerintah Indonesia untuk pengembangan sarana sanitasi komunal dalam kegiatan USRI.

Foto : www.iuwash.or.id



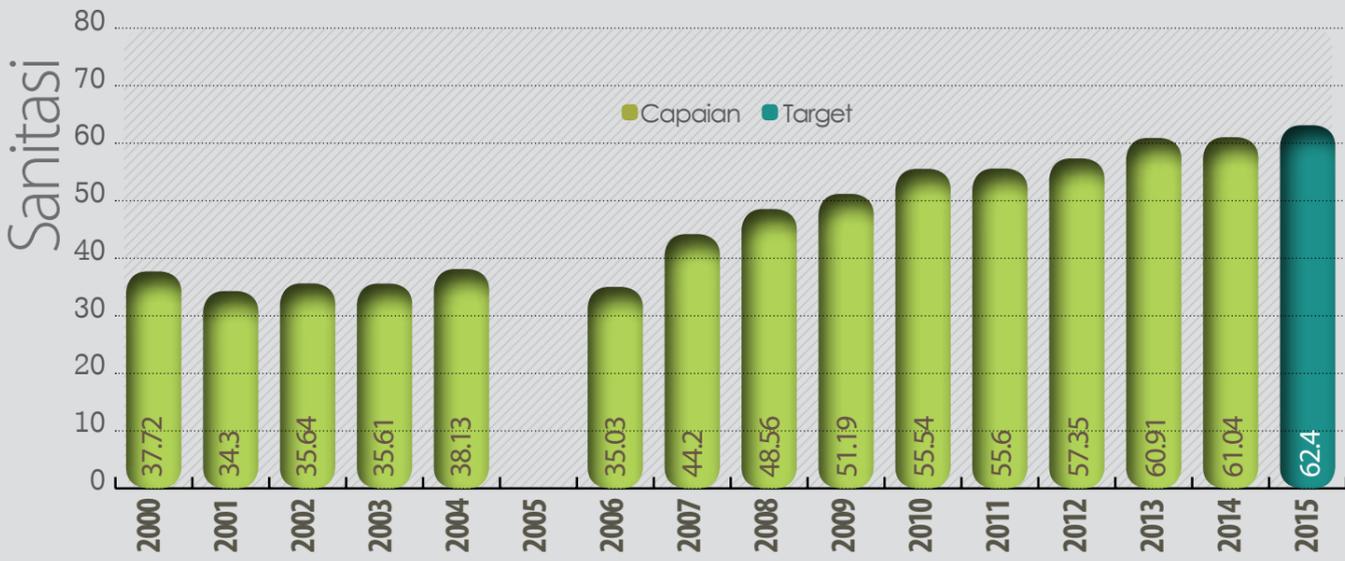
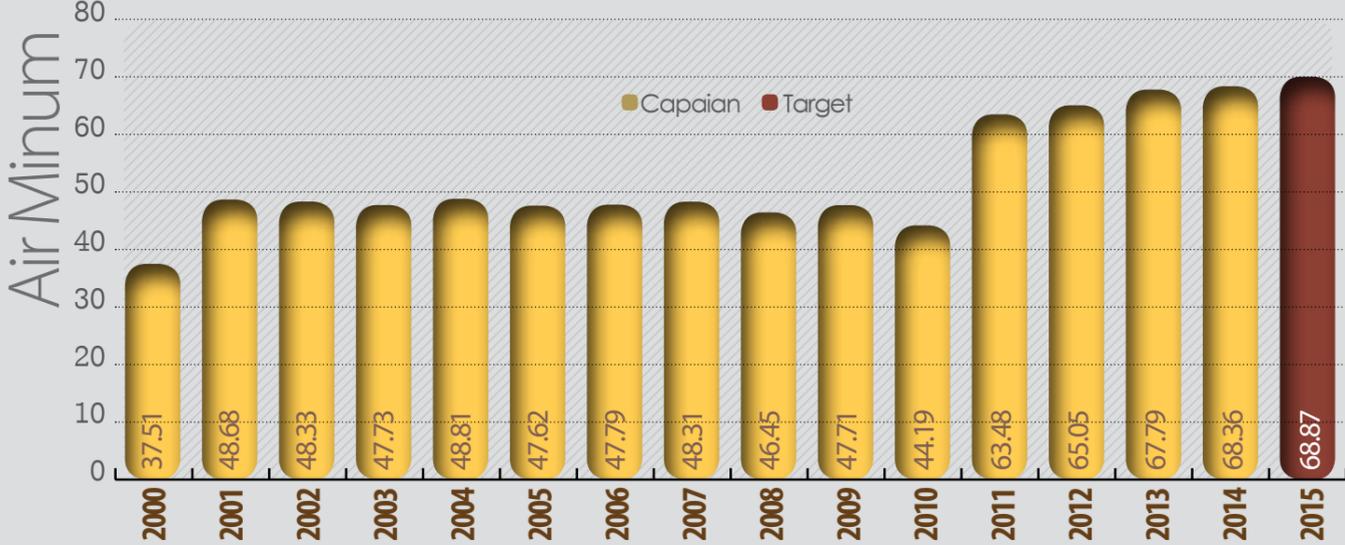
Foto : Koleksi Pokja AMPL

## KfW

Kerjasama pendanaan juga dilakukan dengan *Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)* Jerman di tahun 2005 ini untuk pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan fasilitas pendukungnya di Kota Jambi, Kota Malang, Kabupaten Jombang, Kabupaten Sidoarjo dan Regional Pekalongan. Salah satu bentuk bantuan KfW tersebut adalah pelatihan bagi wakil-wakil kabupaten dan kota tersebut di Jerman dan Cina. Di tahun 2002, KfW juga pernah membantu Indonesia melalui program ProAir di beberapa kabupaten Nusa Tenggara Timur. ProAir adalah program penyediaan air bersih yang berbasis masyarakat pedesaan yang menggunakan sistem gravitasi dan sumur gali.

# Pencapaian MDGs (Millennium Development Goals)

Keterlibatan lembaga-lembaga donor berikut program-programnya harus diakui juga turut berperan dalam pencapaian target MDGs, yaitu akses aman air minum untuk 68,87% penduduk, serta akses terhadap fasilitas sanitasi layak untuk 62,41% penduduk. Diyakini, Indonesia akan berhasil mencapai target MDGs di tahun 2015 untuk akses air minum dan sanitasi dasar tersebut. Setiap tahun Badan Pusat Statistik Nasional mengkompilasi data pencapaian akses sanitasi dan air minum dan melaporkannya ke *Joint Monitoring Programme (JMP) for Water Supply and Sanitation*. Program yang dikelola WHO and UNICEF ini merupakan mekanisme resmi PBB dalam memantau pencapaian dari tiap negara yang turut menandatangani Deklarasi MDG.



## Water Sanitation Program



Foto : Koleksi Qipra

Foto : Koleksi Qipra

Water and Sanitation Program – East Asia and Pasific Region (WSP–EAP) sudah ada di Indonesia sejak belasan tahun lalu. Bekerja sama dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, WSP–EAP dan mitra-mitranya mengupayakan formulasi pendekatan-pendekatan pragmatis untuk meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap layanan air minum dan sanitasi. Termasuk melalui advokasi dan promosi isu sanitasi, reformasi kebijakan, pengembangan kapasitas kelembagaan, dampingan teknis serta pelaksanaan kajian-kajian yang terkait. WSP–EAP dibentuk Bank Dunia untuk mengelola dana hibah yang diberikan oleh lembaga-lembaga donor lain. Beberapa contoh program yang dikelola WSP–EAP di Indonesia antara lain adalah ISSDP dan USDP, WASPOLA I dan II. WSP–EAP juga memperkenalkan pendekatan-pendekatan pembangunan air minum dan sanitasi yang berhasil dilakukan di negara lain. Salah satunya adalah pendekatan *Community Led Total Sanitation (CLTS)* yang diperkenalkan di Indonesia di tahun 2004. Konsep CLTS kemudian menjadi cikal bakal program STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat). WSP–EAP juga melakukan proyek *Total Sanitation and Sanitation Marketing (TSSM)* di 7 lokasi di Provinsi Jawa Timur yang mendorong timbulnya pelaku-pelaku wirausaha sanitasi yang siap menjawab kebutuhan masyarakat akan jamban sehat.

# 16 BUAT SERAMAI- RAMAINYA

Kalau kita ingin diperhatikan, buatlah kegiatan-kegiatan yang menarik perhatian banyak orang. Sangat baik jika kegiatan itu memiliki acara-acara yang beragam. Ada lombanya, pamerannya, pertunjukan musik dan tariannya, selain ada peragaan yang sesuai dengan maksud kegiatan tersebut. Keterlibatan tokoh terkenal akan sangat membantu karena kemampuannya untuk menarik perhatian orang dalam jumlah yang lebih besar dan tentunya media masa. Ratusan bahkan ribuan kegiatan populer sudah dilakukan untuk mendukung upaya pembangunan air minum dan sanitasi. Mulai dari upaya penyadaran masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat, sosialisasi rencana, promosi layanan, pameran teknologi sampai perayaan terhadap sesuatu keberhasilan. Beberapa kegiatan populer dilakukan untuk memperingati hari-hari tertentu.





Acara Deklarasi ODF (*Open Defecation Free*) dilaksanakan untuk mengapresiasi keberhasilan masyarakat yang sudah berhasil membebaskan desanya dari prakek BAB sembarangan. Mereka senang karena hasil jerih payahnya dihargai pemerintah setempat dan pihak-pihak lainnya. Tampak dalam foto, suasana deklarasi STBM merayakan keberhasilan warga salah satu desa di Pulau Ende (Provinsi Nusa Tenggara Timur) menghapus kebiasaan BABS di desa tersebut.



Ada beberapa pameran teknologi yang terkait dengan bidang air minum dan sanitasi yang rutin diadakan di Indonesia. Salah satunya adalah *Indonesia Water and Wastewater Expo and Forum (IWWEF)* yang diselenggarakan dua tahunan oleh Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI). IWWEF pertama kali dilaksanakan pada bulan Januari 2011. IWWEF diisi dengan seminar yang diisi puluhan pembicara dalam negeri dan luar negeri, selain juga beberapa lomba untuk pelajar dan jurnalis. Pameran lainnya adalah *INDOWATER Expo & Forum* yang diadakan tahunan, baik di Jakarta maupun di Surabaya. *INDOWATER* menampilkan sejumlah teknologi dari dalam dan luar negeri seperti China, Thailand, Singapura dan Jerman.



Keberhasilan warga beserta kelompok swadaya masyarakat di suatu kawasan permukiman dalam membangun fasilitas air minum dan sanitasi patut dirayakan. Tidak saja dengan acara makan bersama dan pertunjukan seni, tetapi juga dengan adanya acara peresmian oleh pejabat setempat. Tampak dalam foto atas, Bupati Ngawi beserta jajaran pimpinan Kabupaten Ngawi (Jawa Timur) hadir untuk meresmikan sarana MCK++ yang berhasil dibangun warga Kelurahan Ketanggi dan Dusun Beran. Kehadiran bupati dalam acara tersebut tentu akan menarik perhatian warga di sekitar daerah tersebut. Suatu saat mungkin saja warga daerah sekitar akan memberdayakan dirinya dan membangun sarana serupa.



Tidak ada salahnya acara-acara diskusi, seminar, lokakarya atau pameran di bidang air minum dan sanitasi diselingi hiburan musik agar peserta tidak merasa jenuh. Tampak dalam foto, Nugroho Tri Utomo (Direktur Perumahan dan Permukiman, BAPPENAS) sedang bernyanyi menghibur peserta rapat (atas) dan penyanyi Nugie sedang mengajak seorang anak peserta Jambore Sanitasi untuk menyanyi bersama (bawah).

Setiap dua tahun sekali, BAPPENAS dan mitra-mitranya menyelenggarakan Konferensi Sanitasi dan Air Minum Nasional (KSAN). Acara ini tidak hanya diisi dengan seminar dan lokakarya saja, tetapi juga dilengkapi dengan pameran, lomba, kunjungan lapangan, hiburan musik dan pertunjukan kesenian lain. Topiknya tentu tidak jauh dari upaya berbagai pihak dalam mengembangkan layanan air minum dan sanitasi di wilayahnya. Pesertanya tidak hanya dari kalangan pemerintah, tetapi juga dari lembaga donor, pengusaha, kelompok masyarakat, akademisi, pelajar dan mahasiswa.

Acara ini pertama kali diadakan di tahun 2007 dengan nama Konferensi Sanitasi Nasional (KSN). KSN 2007 menghasilkan 'Deklarasi Jakarta' dimana para menteri terkait menyepakati pentingnya pembangunan sanitasi bagi kesejahteraan bangsa. KSAN 2013, atau KSAN ke-4 yang diadakan di bulan Oktober 2013 itu dihadiri oleh 1.500 peserta lebih. Beberapa Menteri Kabinet Indonesia Bersatu turut mengisi acara diskusi dan talkshow, bersama para pelaku pembangunan lainnya. KSAN 2013 juga diisi dengan penyerahan AMPL Awards bagi mereka yang dinilai berkontribusi lebih kepada pembangunan air minum dan sanitasi.



Foto : [www.jelajahunik.blogspot.com](http://www.jelajahunik.blogspot.com)



Foto : [www.iuwash.or.id](http://www.iuwash.or.id)



Foto : [www.iuwash.or.id](http://www.iuwash.or.id)



Foto : [www.iuwash.or.id](http://www.iuwash.or.id)



Foto : Koleksi Pokja AMPL

### Hari Habitat Dunia – Senin pertama Oktober

Hari Habitat Dunia diperingati secara internasional sebagai wujud kepedulian terhadap pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman yang layak untuk semua lapisan masyarakat. Tentunya keberadaan layanan air minum dan sanitasi merupakan faktor penting dari layak tidaknya suatu kawasan perumahan dan permukiman. Setiap tahun, Hari Habitat memiliki tema sesuai dengan isu dan permasalahan permukiman di Indonesia.



### Hari Cuci Tangan Sedunia – 15 Oktober

Hari Cuci Tangan Sedunia adalah sebuah kampanye global untuk menggalakkan perilaku cuci tangan sebagai upaya untuk menurunkan tingkat kematian dan pencegahan penyakit. Turut aktif dalam penyelenggaraan hari ini adalah WHO, PBB, dan organisasi kesehatan lainnya. Di Indonesia, peringatan hari ini dikoordinasikan oleh Kementerian Kesehatan. Selain anjuran perilaku cuci tangan, peringatan hari ini di Indonesia juga diisi dengan isu-isu hygiene dan sanitasi lainnya.

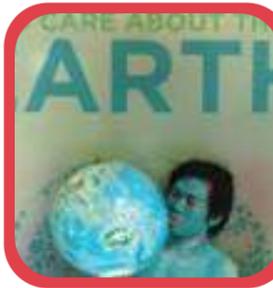


### Hari Lingkungan Hidup – 5 Juni

Hari Lingkungan Hidup Sedunia diperingati untuk merangsang kesadaran publik seluruh dunia akan pentingnya kelestarian lingkungan hidup. Tanggal 5 Juni menandai pembukaan Konferensi Lingkungan Hidup di Stockholm. Di Indonesia, Hari Lingkungan Hidup menjadi kampanye terbesar yang dikoordinasikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Walau tema dan logo mengikuti ketentuan UNEP (*United Nation Environment Programme*), isu air dan pencemaran limbah domestik selalu menjadi salah satu topik yang dibahas di Indonesia.

### Hari Bumi - 22 April

Hari Bumi atau yang lebih dikenal dengan (*Earth Day*) adalah gerakan internasional untuk mengajak orang peduli terhadap bumi, rumah satu-satunya tempat tinggal manusia. Dimulai dari jalanan di New York pada tanggal 22 April 1970, Hari Bumi telah menjadi sebuah gerakan global yang mendunia hingga kini. Ketika itu, jutaan orang turun ke jalan, berdemonstrasi dan memadati Fifth Avenue di New York untuk mengecam para perusak bumi. Tentunya isu air dan sanitasi selalu disinggung dalam peringatan Hari Bumi tersebut.



### Hari Peduli Sampah – 21 Februari

Hari Peduli Sampah diperingati untuk membangun komitmen kita bersama terhadap pengelolaan sampah yang lebih baik. Peringatan hari ini dipicu oleh tragedi longsor sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Leuwigajah, Provinsi Jawa Barat pada tanggal 21 Februari 2005. Penyebab longsor tersebut, diduga karena curah hujan yang sangat tinggi serta ledakan gas metana (CH4) yang terperangkap dalam timbunan sampah.



## Hari-Hari Terkait Air Minum dan Sanitasi



### Hari Air Sedunia – 22 Maret

Hari Air Sedunia atau *World Water Day* diperingati masyarakat internasional untuk mengingatkan pentingnya air bagi kehidupan serta untuk melindungi pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan. Hari yang secara internasional disebut *the World Water Day* ini dicetuskan pertama kali di the *United Nations Conference on Environment and Development* (UNCED), Rio de Janeiro 1992. PBB kemudian menetapkan Hari Air Dunia untuk diperingati setiap tanggal 22 Maret.



### Hari Toilet Sedunia – 19 November

Hari Toilet Sedunia atau *World Toilet Day* diperingati secara internasional untuk mengangkat pentingnya sanitasi, khususnya terkait fakta masih banyaknya penduduk dunia yang belum memiliki toilet. Peringatan hari ini diprakarsai oleh *World Toilet Organization* (WTO) yang berbasis di Singapura sejak tahun 2001. PBB memformalkan Hari Toilet Sedunia ini di tahun 2013. Di Indonesia, peringatan hari toilet dikoordinasikan oleh Asosiasi Toilet Indonesia (ATI).

# 17

## Suburkan Gagasan Baru

Gagasan baru selalu bermunculan, baik itu gagasan teknologi ataupun gagasan konsep. Tidak selalu harus gagasan canggih, terkadang gagasan sederhana malah lebih tepat untuk memecahkan masalah kita. Asalkan rajin mencari, kita pasti akan menemukan gagasan baru. Demikian juga di bidang air minum, sampah, air limbah dan drainase, banyak gagasan baru terus bermunculan. Sebagian merupakan gagasan yang diadaptasi dari negara-negara lain, sebagian merupakan gagasan murni dari dalam negeri. Tentu tidak semua gagasan dapat langsung diaplikasikan. Kajian dan ujicoba dibutuhkan sebelumnya untuk memastikan layak-tidaknya suatu gagasan diterapkan dalam skala nyata. Munculnya gagasan-gagasan baru juga ditingkatkan melalui penyelenggaraan lomba-lomba karya ilmiah dan teknologi tepat guna. Penghargaan diberikan kepada mereka yang dinilai berhasil menemukan gagasan yang tepat. Salah satu contohnya adalah RPAM (Rencana Pengamanan Air Minum) yang idenya diadopsi dari konsep *Water Safety Plan* yang dicetuskan oleh *World Health Organization* seperti yang dijelaskan pada gambar berikut.

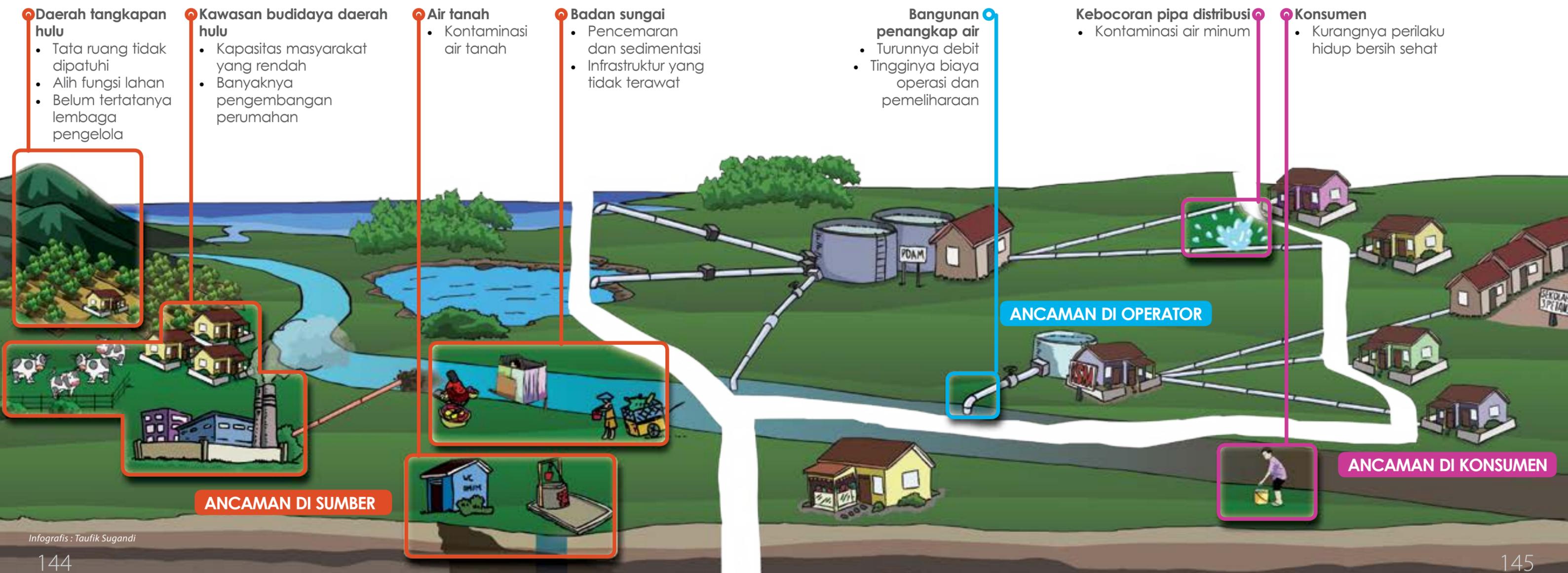
*Di Yogyakarta memiliki instalasi lumpur tinja yang dilengkapi dengan alat penguras lumpur mekanis. Biaya pengoperasian alat ini tentu tidak murah, tetapi ruang dan hasil yang diperolehnya jauh lebih baik dari IPLT kolam yang biasa dijumpai di Indonesia.*



Foto : www.old.setkab.go.id

# Rencana Pengamanan Air Minum

Konsep Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM) sedang diujicoba kelayakan penerapannya dalam pembangunan sektor air minum di Indonesia. RPAM bertujuan untuk mengamankan layanan air minum melalui pendekatan identifikasi dan pengelolaan resiko di ke-3 komponennya, yaitu komponen sumber, komponen operator dan komponen Konsumen. Di tingkatan operator, RPAM diyakini akan mampu mengefisienkan biaya pengolahan dan memperbaiki pelayanan penyelenggara air minum. Bukan hanya operator PDAM saja yang perlu diperhatikan dalam konsep RPAM, melainkan semua yang memberikan layanan air minum termasuk Badan Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum (BP-SPAM), Himpunan Penduduk Pengguna Air Minum (HIPAM), dan badan pengelola di tingkat desa dan/atau masyarakat. Beberapa uji coba RPAM Operator sudah dilakukan oleh BAPPENAS dan Kementerian Pekerjaan Umum, seperti di PDAM Bandarmasih (Kota Banjarmasin) dan di BPSAB Wai Kanuru Mopir (Kabupaten Sumba Barat Daya). Sementara ujicoba RPAM-Sumber sudah dilakukan di Sungai Cikapundung (Kota Bandung). Setelah dilakukan sosialisasi dan diseminasi konsep RPAM, konsep RPAM akan mulai diaplikasikan ke berbagai kebijakan dan program-program AMPL. RPAM diadopsi dari konsep Water Safety Plan yang dicetuskan the World Health Organization.





Berbagai lomba diadakan untuk memancing gagasan teknologi baru di bidang air minum dan sanitasi. Salah satunya adalah Lomba Teknologi Tepat Guna (TTG) STBM yang diprakarsai program *High Five* dan Pokja AMPL Nasional di tahun 2013. Lomba TTG diharapkan dapat memperkaya opsi teknologi sanitasi bagi masyarakat dengan praktis, benar dan terjangkau. Lomba TTG ini memiliki 5 kategori sesuai pilar STBM yang dapat diikuti oleh siapa saja. Peserta lomba terpilih akan diminta untuk mengembangkan gagasannya ke skala lapangan di 10 kota agar dapat dinilai secara langsung oleh para juri. Berlangsung dari bulan Juli 2013, pemenang lomba TTG diumumkan di bulan Maret 2014. Beberapa pemenangnya antara lain adalah keran air untuk cuci tangan yang dilengkapi alat pemberi sabun otomatis (keran misuh), komposter aerob dengan pengaduk mekanis, tangki septik menggunakan filter cacing (vermibio filter), filter air keramik. Total hadiah yang disediakan adalah 110 juta rupiah, selain kesempatan mendapatkan dukungan pemodal bagi teknologi yang menang. Lomba ini melibatkan banyak pihak seperti Sekretariat STBM, Plan Indonesia, HAKLI, IATPI, WVI, IUWASH, Pundi Amal SCTV serta *Business Innovation Centre* (BIC).



PDAM Kota Banjarmasin mengembangkan instalasi air yang mampu mengolah air laut menjadi air bersih dengan menggunakan teknologi membran. Instalasi ini disediakan untuk melayani penduduk yang tinggal di daerah agak terisolasi, yaitu Pulau Bromo (Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin). Instalasi dibangun dengan menggunakan bantuan PERPAMSI sebagai penghargaan bagi PDAM Kota Banjarmasin yang terpilih menjadi PDAM terbaik dengan 140 ribu lebih pelanggannya.



Ultrafiltrasi adalah teknologi penyaringan air bertekanan dengan menggunakan membran *hollow fiber* sebagai media penyaring. Ultrafiltrasi mampu mengatasi menghilangkan hampir semua partikel koloid, padatan tersuspensi, bakteri, virus dan lainnya. Saat ini IPA ultrafiltrasi berkapasitas 50 liter/detik sudah siap dioperasikan oleh PDAM Tirta Anom, Kota Banjar (Jawa Barat) untuk memenuhi kebutuhan air di wilayah Banjar Selatan. Air yang diolah dengan sistem ultrafiltrasi hasilnya bisa langsung diminum. Selain di Kota Banjar, IPA Ultrafiltrasi yang besar juga dikembangkan di Kota Tangerang.



# Bank Sampah

Bank sampah adalah suatu tempat yang menerima sampah terpilah dari masyarakat, memroses atau mengemasnya kembali dan menyalurkannya ke mereka yang membutuhkan. Bank sampah dikelola seperti perbankan. Masyarakat sekitar lokasi datang ke bank membawa sampah yang sudah mereka pilah. Mereka memiliki buku tabungan atau rekening. Untuk sampah yang dibawanya itu, mereka akan mendapat imbalan berupa uang yang dimasukkan ke rekening masing-masing, atau berupa gula, sabun, minyak dan beras. Keberadaan bank sampah membuat sampah menjadi lebih jelas nilainya karena sudah pasti ada pihak yang mau membelinya. Oleh karena itu, beberapa sekolah sekarang menerima pembayaran uang sekolah dengan sampah. Ada pula asuransi kesehatan yang preminya dibayarkan dengan sampah.

Salah satu bank sampah yang dianggap baik adalah Bank Sampah Kota Malang (BSM) yang dirintis sejak tahun 2011. Dalam operasinya, BSM memiliki lebih dari 300 unit bank di

tingkat masyarakat, selain 200 unit bank di tingkat sekolah dan institusi. Secara keseluruhan BSM Malang memiliki nasabah hampir mendekati 25.000 nasabah. Aktivitas BSM sangat menarik perhatian banyak pihak. Misalnya, program Beli Sembako Bayar Pake Sampah, Utang Duit Bayar Pake Sampah dan juga Nabung Uang dengan menyeteror sampah/limbah. Banyak yang datang untuk studi banding atau mengundang BSM untuk presentasi di kotanya masing-masing. Di tahun 2012, Menteri Lingkungan Hidup saat itu, Baltazar Kambuaya meresmikan salah satu unit BSM.

Peralatan yang dimiliki BSM Malang tergolong lengkap, yaitu alat timbang, mesin penghancur botol plastik, mesin pembersih, truk/alat angkut, kantor dan unit-unit cabang, gudang serta memiliki jaringan distribusi produksi akhir sampah. Penghasilannya dapat mencapai 150 juta sebulan, dengan keuntungan mencapai 20%. Keberadaan BSM tentu berkontribusi terhadap presentasi Kota Malang meraih ADIPURA KENCANA di bulan Juni 2013.



Foto : koleksi qipra



Foto : www.surakarta.go.id



Foto : koleksi IUWASH



Foto : koleksi IUWASH

Foto : koleksi IUWASH

Beberapa kota di Indonesia sudah menggunakan peralatan sedot tinja yang menggunakan motor gerobak roda tiga. Salah satu pihak yang menggagas gerobak motor tinja ini adalah Ikatan Ahli Teknik Penyehatan dan Teknik Lingkungan Indonesia (IATPI) dan menamakannya sebagai MOLSTA (Motor Lumpur Septic Tank). Didanai *Environmental Service Program* (ESP) di tahun 2007, IATPI membuat dua MOSLTA untuk digunakan warga Penjaringan, Jakarta Utara di bawah dampingan Mercy Corps. Salah satunya tampak di foto tas. Inovasi alat sedot tinja lainnya adalah Kedoteng (Kereta Sedot Septic Tank) yang dibuat untuk mendukung kegiatan Mercy Corps dalam mengembangkan layanan sedot tinja berbasis masyarakat di Jakarta Utara pada tahun 2013.



Foto : koleksi qipra

Layanan lumpur tinja terjadwal (L2T2) adalah bentuk layanan sedot tinja yang diwajibkan oleh pemerintah kabupaten/kota dan yang dilakukan secara berkala. Suka tidak suka, dalam 3 tahun atau 4 tahun sekali, truk tinja akan datang dan menyedot lumpur tinja dari tangki septik di rumah-rumah yang menggunakannya. Dengan dukungan manajemen yang benar, khususnya menyangkut penerimaan dari pelanggan, sistem L2T2 diperkirakan akan dapat memperoleh dana yang cukup untuk membiayai operasinya sendiri. Sistem pengelolaan lumpur tinja dengan pola L2T2 ini sekarang sedang dijajagi penerapannya di Kota Solo, DKI Jakarta, Kabupaten Tabanan dan Kota Bogor. Kerjasama penyedotan dengan penyedot swasta kemungkinan besar dibutuhkan guna mengurangi beban investasi pemerintah kabupaten/kota.



Foto : Andrias Wiji Setyo Pamuji

Teknologi penanganan sampah rumah tangga juga terus dikembangkan. Tujuannya tidak lagi hanya untuk dapat memisahkan dan memusnahkan sampah, tetapi juga untuk dapat memanfaatkan sampah untuk kepentingan tertentu. Salah satunya adalah unit biodigester sampah yang mampu mengolah sampah organik menjadi bahan bakar biogas dan pupuk organik. Dengan menggunakan tangki biodigester ini, 5 kg sampah per hari dapat diproses dan menghasilkan gas yang setara dengan 0,4 kg per hari LPG.



Foto : koleksi Pokja AMPL

Foto : koleksi Pokja AMPL

Perangkat Bauran Air Domestik merupakan salah satu strategi untuk menjamin ketahanan air. Kombinasi penerapan dari 4 prinsip pengamanan air (yaitu Jaga Air, Simpan Air, Hemat Air dan Daur Ulang Air) akan membuat penggunaan air menjadi optimal dan berkelanjutan. Perangkat Bauran Air Domestik mendorong pemerintah daerah untuk dapat memanfaatkan seluruh sumber air baku yang ada di wilayahnya dengan efisien dan efektif. Tampak dalam gambar, acara lokakarya penerapan perangkat Bauran Air Domestik yang diadakan Pokja AMPL dan dihadiri staf pemerintah dari 10 Kota di tahun 2014. Peserta dilatih untuk melengkapi data dan informasi terkait jenis penggunaan air, tingkat kebutuhan air pada setiap tipe rumah, dan juga data ketersediaan sumber air baku.



Foto : Koleksi Qipra

Beberapa program pembangunan air minum dan sanitasi telah memprakarsai penggunaan sistem pemantauan yang lebih canggih. Mereka sudah menggunakan website dan pesan pendek (SMS) melalui telepon seluler. Penggunaan sistem informasi modern terbukti berhasil memenuhi kebutuhan data di tingkat pemerintahan, baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun nasional. Data dapat diterima secara tepat dan akurat, tanpa resiko kesalahan akibat perbedaan pencatatan. Di tingkat pelaksana program di lapangan, sistem pemantauan ini juga memberi kemudahan bagi para petugas lapangannya untuk melakukan pemutakhiran data. Pengelolaan data pada website juga memudahkan analisa perkembangan program, penyiapan laporan pencapaian nasional, dan evaluasi program secara keseluruhan. Program STBM sudah memanfaatkan sistem pemantauan elektronik ini.

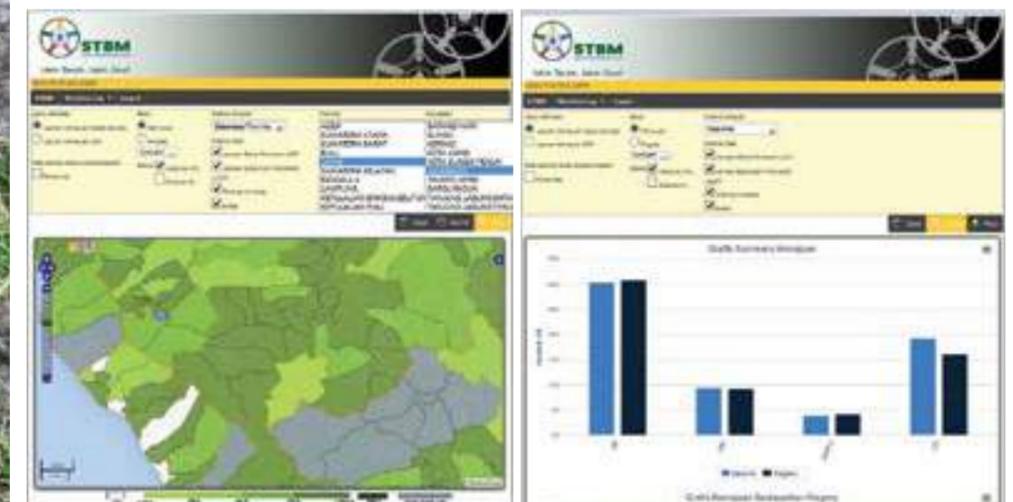


Foto : www.stbm-indonesia.or.id

# 18

## DENGAR SUARA PEREMPUAN

Sudah selayaknya kita mendengar pendapat semua pihak. Apalagi dari mereka yang memiliki informasi lebih lengkap dibanding pihak lainnya. Untuk urusan kebersihan dan kesehatan keluarga, kaum perempuan memiliki pengetahuan dan pengalaman yang lebih baik. Itulah sebabnya berbagai program pembangunan air minum dan sanitasi selalu menciptakan ruang bagi kaum perempuan untuk menyuarakan pendapatnya. Tidak jarang dibuat acara khusus yang hanya dapat dihadiri kaum perempuan agar mereka dapat lebih bebas berpendapat. Keterlibatan mereka dinilai sudah berhasil meningkatkan kualitas dan kinerja pengembangan layanan air minum dan sanitasi di daerahnya masing-masing.





Perempuan yang terlibat dalam pemicuan STBM akan menularkan pelajaran yang didapat ke suami dan anak-anaknya. Proses pemicuan terbukti membuka mata perempuan tentang dampak BABS pada kesehatan, dan memperlihatkan adanya opsi BAB di tempat yang semestinya. Perempuan yang berperan sebagai kader desa juga telah banyak berkontribusi membantu jalannya proses pemicuan. Kepekaan terhadap naluri ibu, membuat mereka efektif dalam menyampaikan pesan-pesan perilaku bersih dan sehat.



Di sebagian wilayah Indonesia, perempuan juga memainkan peran dalam konstruksi fasilitas sanitasi. Fasilitas Sanimas di sejumlah wilayah dibangun bersama oleh tenaga perempuan dan laki-laki. Selain itu, sambungan pipa air juga sering dipasang dengan keterlibatan perempuan. Dengan terlibat dalam proses konstruksi, perempuan merasa ikut memiliki fasilitas tersebut, dan tergugah untuk terus merawat fasilitas tersebut. Seperti terlihat dalam foto-foto berikut, kaum perempuan juga dilibatkan dalam pemasangan pipa air limbah pada proyek SANIMAS (atas) dan seorang ibu yang menggali lubang untuk cubluk yang akan digunakan keluarganya.



Pelaksanaan program STBM di beberapa tempat membawa urusan jamban ke tradisi arisan ibu-ibu. Melalui 'arisan jamban', setiap rumah tangga mendapat kesempatan memperoleh jamban untuk dipasang di rumah masing-masing. Pendekatan ini sangat efektif untuk komunitas yang warganya tidak sanggup membeli jamban secara tunai.



Pengalaman perempuan dalam memelihara kebersihan rumah tangga sangat bermanfaat dalam meningkatkan kualitas dari rencana fasilitas air minum dan sanitasi. Oleh karena itu, pengelola program-program pembangunan air minum dan sanitasi seringkali membuat acara diskusi khusus dengan kaum perempuan, atau biasa disebut sebagai Rembug Perempuan.



Tidak semua memahami pentingnya peran dan kontribusi kaum perempuan dalam pembangunan air minum dan sanitasi. Oleh karena itu, program-program pembangunan air minum dan sanitasi selalu mengadakan lokakarya atau seminar untuk meningkatkan kesadaran pihak-pihak berkepentingan tentang peran perempuan. Pelatihan juga diadakan agar para pelaku pembangunan mengetahui strategi dan teknik untuk mengoptimalkan keterlibatan kaum perempuan. Tampak dalam foto berikut, kader dan ahli sanitasi Kota Bogor sedang bermain peran (*role play*) tentang isu gender saat lokakarya STBM dan Pengarusutamaan Gender.



# 19

# SIAPKAN MANUSIANYA

Pembangunan membutuhkan sumber daya manusia yang sesuai dengan kompetensi dan jumlah yang diperlukan. Sektor air minum dan sanitasi membutuhkan puluhan ribu individu setiap tahunnya. Dari kategori tenaga terampil sampai tenaga ahli; baik untuk kebutuhan perencanaan, konstruksi maupun untuk kebutuhan pengoperasian. Standar kompetensi kerja diterbitkan sebagai acuan dalam pengembangan kapasitas SDM. Beragam jenis pelatihan diselenggarakan. Perguruan tinggi difasilitasi agar dapat menghasilkan sarjana-sarjana yang akan berkiprah di bidang air minum dan sanitasi. Mekanisme sertifikasi kompetensi diberlakukan guna mengakui individu-individu yang sudah memenuhi syarat keprofesian.



Foto : Alwis



Foto : stbm-indonesia.org

Secara berkala, pemerintah menyelenggarakan pelatihan untuk mencetak tenaga pendamping dan fasilitator masyarakat yang akan dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan perubahan perilaku maupun pembangunan berbasis masyarakat. Salah satunya adalah Kementerian Kesehatan yang secara rutin menyelenggarakan pelatihan STBM bagi calon koordinator dan fasilitator program STBM di berbagai wilayah di Indonesia. Foto di atas menunjukkan pelatihan yang diselenggarakan di Makasar pada tahun 2014. Pelatihan tersebut diikuti 76 peserta yang berasal dari seluruh Indonesia.



Foto : Koleksi Pokja AMPL

Para calon tukang dan mandor diberikan pelatihan sebelum mulai membangun fasilitas sanitasi. Pelatihan tersebut memberi mereka pengetahuan tentang detail pelaksanaan konstruksi, seperti mendesain bangunan yang tahan gempa, pemilihan bahan material dan bagaimana melakukan pengawasan.



Foto : Koleksi Qipra

Pengembangan sumber daya manusia air minum dan sanitasi didukung oleh modul-modul pelatihan yang sudah dikembangkan oleh pihak-pihak pengelola program pembangunan kedua sektor tersebut. Modul-modul tersebut disusun berdasarkan kurikulum yang sudah disepakati. Sebagian juga disusun dengan mengacu ke Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) terkait.



Foto : www.stbm-indonesia.org

Foto : Koleksi Qipra

Meluasnya akses internet di Indonesia telah dimanfaatkan oleh sektor air minum dan sanitasi sebagai media belajar. Dalam dua tahun terakhir, sudah diluncurkan dua modul pelatihan berbasis internet. Kementerian Kesehatan dibantu WSP telah mengembangkan Paket Belajar Mandiri STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) untuk memperluas jangkauan pelaku STBM di daerah. Selain itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dibantu ADB juga sudah mencanangkan pelatihan berbasis web untuk fasilitator pembangunan sanitasi berbasis masyarakat. Paket belajar mandiri atau *e-learning* diharapkan bisa memenuhi kebutuhan personil di bidang tersebut.



Pembangunan air minum dan sanitasi juga membutuhkan dukungan tenaga-tenaga ahli dengan latar belakang pendidikan sarjana teknik terkait, seperti Teknik Lingkungan (TL). Saat ini sudah lebih dari 40 perguruan tinggi yang menyediakan program studi TL. Walau demikian, promosi bidang air minum dan sanitasi terus dilakukan ke mahasiswa-mahasiswa program studi tersebut guna menarik minat mereka untuk nantinya bekerja dan berkarya di bidang-bidang tersebut. Tampak dalam foto, mahasiswa Teknik Lingkungan Universitas Diponegoro Semarang sedang berlatih melakukan sampling air sungai.



Sertifikasi kompetensi dilakukan untuk mendorong ketersediaan tenaga kerja air minum dan sanitasi yang memenuhi standar kompetensi kerjanya. Tidak hanya untuk tenaga kerja konstruksi, sertifikasi kompetensi juga dilakukan untuk mereka yang terlibat dalam pengoperasian maupun manajemen. Di bidang air minum, sertifikasi tenaga kerja dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Air Minum Indonesia (LSP AMI), khususnya untuk tenaga kerja yang terlibat dalam pengoperasian maupun manajemen. LSP AMI menerima lisensi sertifikasi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) pada tahun 2010.

Kemampuan tenaga kerja di bidang air minum dan sanitasi terus ditingkatkan untuk mendukung penyediaan layanan air minum dan sanitasi yang berkualitas. Sudah menjadi kewajiban suatu perusahaan atau organisasi untuk meningkatkan kemampuan pekerjanya. Tampak dalam foto, suasana pelatihan yang dilakukan PERPAMSI Kalimantan Barat untuk meningkatkan keterampilan pekerja PDAM dalam melakukan pemasangan dan penyambungan pipa. Pelatihan diadakan agar para pekerja PDAM tersebut dapat mengikuti uji kompetensi yang dilakukan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN). Bagi mereka yang lolos uji, LPJK akan memberikan sertifikat tenaga terampil di bidang konstruksi perpipaan air minum.



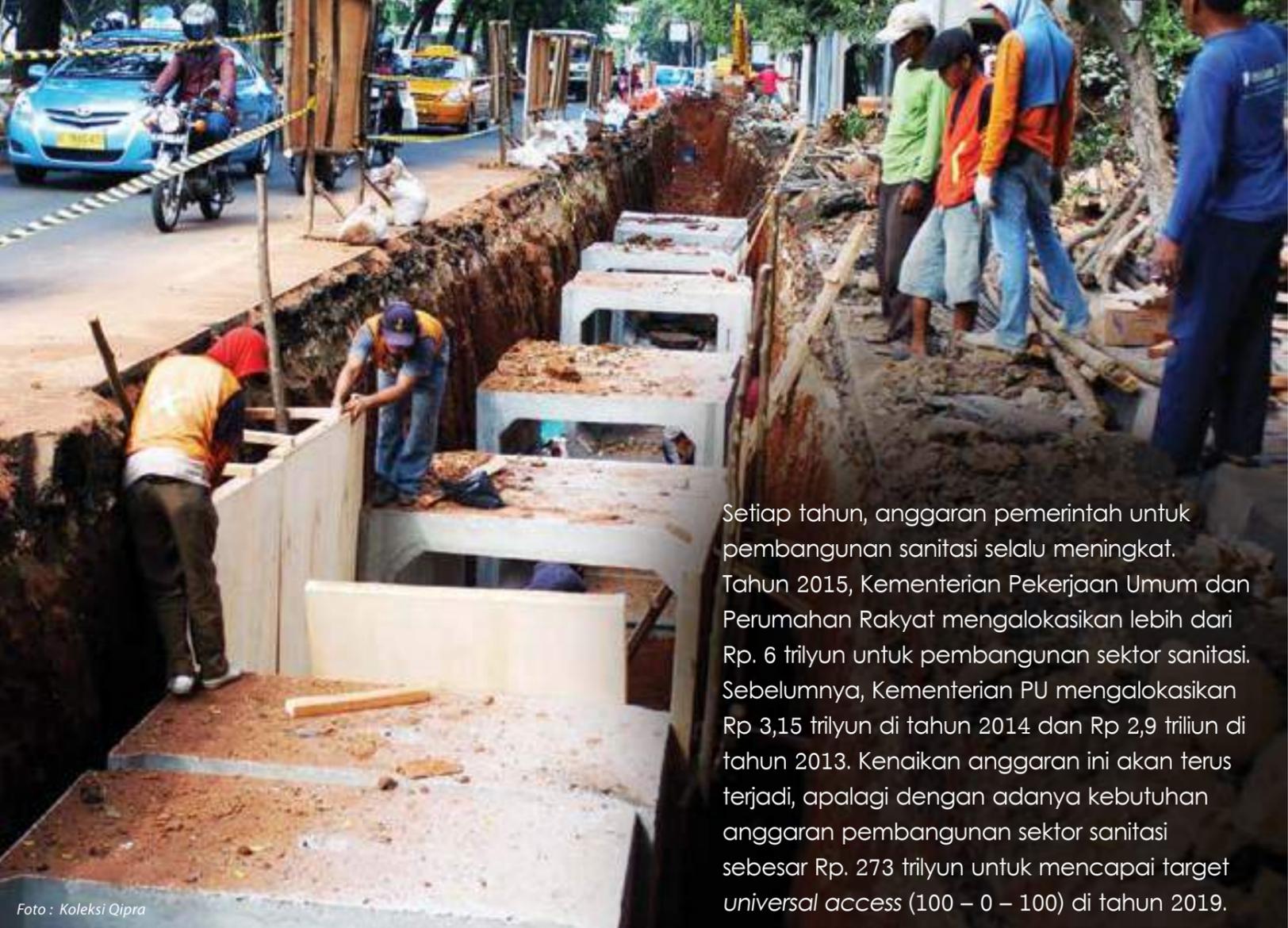
Selain pelatihan, berbagai lokakarya juga dilakukan untuk menyampaikan pendekatan-pendekatan terakhir tentang pembangunan sanitasi di Indonesia. Lokakarya juga memberi kesempatan bagi para pesertanya untuk berbagi pengalaman dan menceritakan upaya yang sudah berhasil dilakukannya. Tampak dalam foto, Direktur Perumahan dan Permukiman BAPPENAS Nugroho Tri Utomo sedang menyampaikan informasi terkait strategi pemerintah dalam mengejar target *universal access* di suatu lokakarya yang dihadiri wakil-wakil pokja AMPL daerah.



Foto : Koleksi Pokja AMPL

# Temukan Sumber dana lain

Dana pembangunan infrastruktur tidak selalu harus dari pemerintah. Banyak sumber-sumber pendanaan lain yang dapat dipertimbangkan. Apalagi untuk infrastruktur air minum, air limbah, persampahan dan drainase. Untuk skala kota, investor-investor swasta siap untuk terlibat dalam skema *public-private partnership*. Bank dan lembaga keuangan non-bank siap untuk meminjamkan dananya. Untuk skala kecil, banyak perusahaan siap menyalurkan dana *corporate social responsibility* yang dimilikinya. Demikian juga, beberapa lembaga nirlaba yang siap membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki akses air minum dan fasilitas sanitasi dasar. Dan yang tidak boleh diabaikan adalah dana dari masyarakat sendiri sebagai pengguna sekaligus penyedia layanan untuk rumah dan kawasan permukimannya.



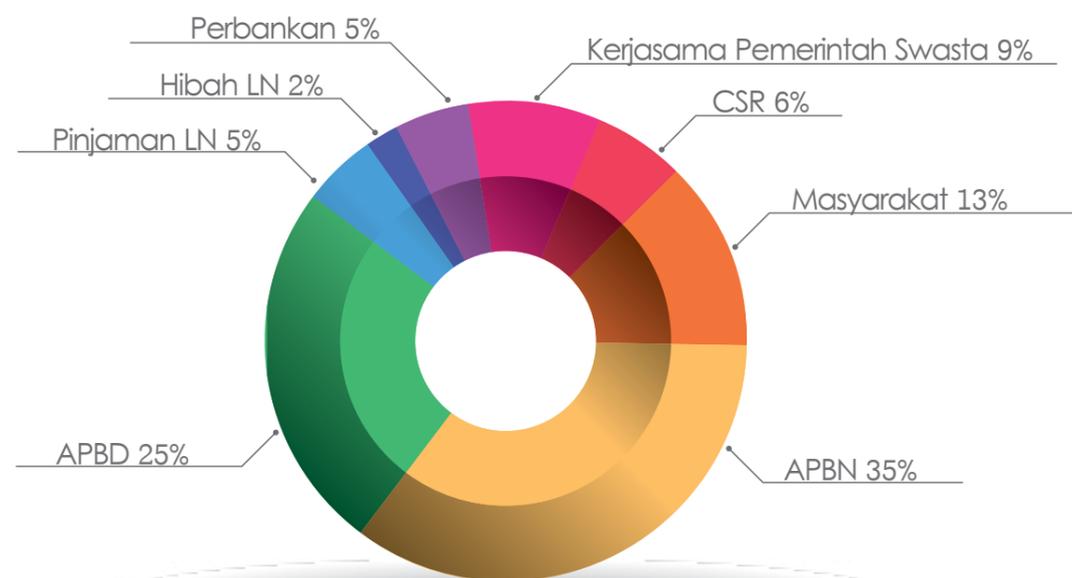
Setiap tahun, anggaran pemerintah untuk pembangunan sanitasi selalu meningkat. Tahun 2015, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengalokasikan lebih dari Rp. 6 triliun untuk pembangunan sektor sanitasi. Sebelumnya, Kementerian PU mengalokasikan Rp 3,15 triliun di tahun 2014 dan Rp 2,9 triliun di tahun 2013. Kenaikan anggaran ini akan terus terjadi, apalagi dengan adanya kebutuhan anggaran pembangunan sektor sanitasi sebesar Rp. 273 triliun untuk mencapai target *universal access* (100 – 0 – 100) di tahun 2019.

Foto : Koleksi Qipra



Foto : Koleksi USAID

Beberapa peraturan mewajibkan perusahaan untuk turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar sebagai bentuk tanggungjawab sosial dan lingkungan mereka, atau juga disebut *corporate social responsibility* (CSR). Adanya kewajiban itu dapat dimanfaatkan pemerintah setempat untuk mengajak perusahaan-perusahaan tersebut turut dalam pengembangan layanan air minum dan sanitasi di daerahnya. Salah satu daerah yang memanfaatkan hal itu adalah Kabupaten Tangerang. Dalam acara di bulan Oktober 2014, Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar berhasil memperoleh komitmen CSR perusahaan-perusahaan untuk mengatasi masalah air minum dan sanitasi. Terlihat dalam foto, Bupati Tangerang meresmikan Forum Tanggungjawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TSLP) untuk merealisasi komitmen perusahaan-perusahaan tersebut. Turut menyaksikan adalah Laisa Wahanuddin (Kasubdit Drainase dan Persampahan Bappenas), Foort Bustraan (IUWASH) dan wakil-wakil perusahaan yang turut menyatakan komitmennya.



Anggaran pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, hanya mampu membiayai sekitar 60% dari biaya pengembangan layanan air minum dan sanitasi di Indonesia. Sumber-sumber lain perlu digali, termasuk dari masyarakat sendiri dan juga dari pihak swasta.



Foto : Koleksi Qipra

Pihak pengembang kawasan perumahan juga dilibatkan dalam penyediaan layanan air minum dan sanitasi. Beberapa pemerintah kabupaten/kota sudah mewajibkan pihak pengembang untuk membangun sistem perpipaan air limbah dan pengelolaan sampah skala kawasan di kawasan-kawasan perumahan baru. Salah satu kawasan yang memiliki sistem perpipaan air limbah adalah perumahan Lippo Karawaci. IPAL yang dimiliki kawasan tersebut menggunakan sistem aerasi mekanis yang tergolong cukup modern.

Paska MDGs, target pembangunan air minum dan sanitasi Indonesia diekspresikan dalam deret angka 100 – 0 – 100. Maksudnya, di tahun 2019, 100% penduduk memiliki akses air minum, 0% kawasan kumuh yang tersisa dan 100% penduduk memiliki akses fasilitas sanitasi. Dengan melihat deret angka itu, mudah bagi kita untuk memahami bahwa di akhir tahun 2019 setiap masyarakat perkotaan dan perdesaan Indonesia sudah memiliki akses terhadap sumber air minum aman dan fasilitas sanitasi layak.

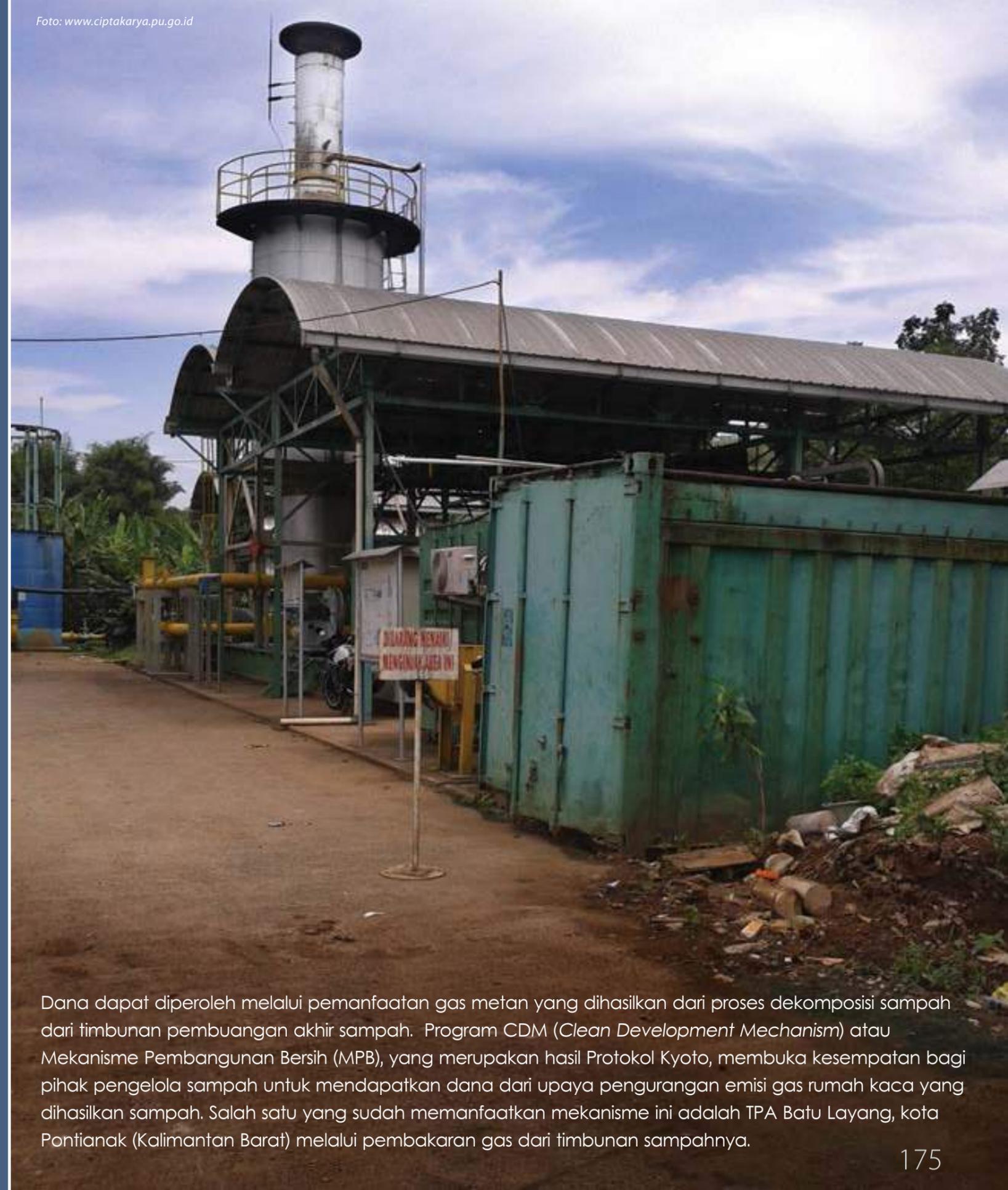


## Target *Universal Access*

Target *Universal Access* ini akan dirinci dalam Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015–2019 sebagai:

- Air minum: 85% penduduk terlayani akses air minum yang memenuhi prinsip 4K (Kualitas, Kuantitas, Kontinuitas dan Keterjangkauan); 15% penduduk terlayani akses dasar.
- Air limbah: 85% penduduk terlayani akses sanitasi layak; 15% penduduk terlayani akses sanitasi dasar.
- Sampah: 80% cakupan pelayanan sampah di perkotaan; 20% cakupan pengelolaan sampah dengan upaya 3R (*reduce, reuse and recycle*).

Perlu upaya luar biasa dan sinergi semua pihak untuk mencapai target *universal access* 100 – 0 – 100 ini.



Dana dapat diperoleh melalui pemanfaatan gas metan yang dihasilkan dari proses dekomposisi sampah dari timbunan pembuangan akhir sampah. Program CDM (*Clean Development Mechanism*) atau Mekanisme Pembangunan Bersih (MPB), yang merupakan hasil Protokol Kyoto, membuka kesempatan bagi pihak pengelola sampah untuk mendapatkan dana dari upaya pengurangan emisi gas rumah kaca yang dihasilkan sampah. Salah satu yang sudah memanfaatkan mekanisme ini adalah TPA Batu Layang, kota Pontianak (Kalimantan Barat) melalui pembakaran gas dari timbunan sampahnya.

Masyarakat turut serta mendanai pengembangan layanan air minum dan sanitasi, setidaknya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya sendiri. Bagi masyarakat yang tidak mampu, beberapa lembaga donor, bank dan koperasi menyediakan kredit mikro yang dapat dimanfaatkan untuk memperoleh sambungan rumah PDAM atau membangun jamban sehat. Salah satunya, Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang sejak beberapa tahun terakhir ini bekerjasama dengan beberapa PDAM untuk membiayai penyambungan layanan air minum bagi calon-calon pelanggannya. Demikian juga Bank Syariah Mandiri (BSM) yang siap menyalurkan kredit mikro sampai Rp. 1,1 juta ke masyarakat yang akan membangun jamban dengan tangki septik. Pengembaliannya diangsur sebesar Rp. 15 ribu – Rp. 20 ribu setiap minggu selama satu tahun. Selain lembaga perbankan, unit-unit koperasi juga disiapkan agar mampu mengembangkan skema kredit mikro jamban sehat bagi para anggotanya.



Pola alternatif untuk membantu kabupaten dan kota dalam membangun infrastruktur air minum dan air limbah terus dikembangkan dan diterapkan. Salah satunya adalah pola hibah sesuai kinerja terukur atau *Output Based Aid (OBA)*. Untuk layanan air minum, pemerintah memperkenalkan Program Hibah Air Minum dimana nantinya pemerintah pusat akan memberi hibah ke pemerintah daerah untuk mengganti investasi infrastruktur air minum yang sudah dikeluarkan pemerintah daerah. Hibah yang bersumber dari APBN atau bantuan luar negeri ini dapat dicairkan pemerintah daerah setelah adanya verifikasi terhadap keberfungsian infrastuktur yang sudah dibangunnya. Pola OBA juga diterapkan untuk perluasan jaringan perpipaan air limbah.



# Temani Media 21

Tidak ada yang mampu menyaingi kekuatan media masa untuk penyebaran informasi. Melalui media elektronik dan media cetak, informasi akan tersebar secara luas dan cepat. Sekarang tinggal kita yang perlu memastikan agar informasi yang kita ingin sebarkan itu tepat dan akurat. Saat ini, kesadaran untuk memanfaatkan media masa, tumbuh dengan baik dalam pembangunan air minum dan sanitasi. Media masa selalu diajak meliput tiap kegiatan air minum dan sanitasi. *Press release* disediakan untuk mempermudah awak media melaksanakan tugasnya. Akses wawancara terbuka luas, baik melalui konferensi pers maupun secara individu. Pemahaman media ditingkatkan melalui pelatihan-pelatihan pemberitaan air minum dan sanitasi. Jumlah artikel di media cetak ditingkatkan melalui pelaksanaan lomba jurnalistik terkait isu air minum dan sanitasi.



# Forum Jurnalis Sanitasi

Pada bulan September tahun 2012, sebanyak 21 jurnalis dari berbagai media se-kota Makassar membentuk Forum Jurnalis Sanitasi yang disingkat FJS. Forum yang memiliki *tagline* "Hidup Bersih, Lebih Sehat" ini melakukan berbagai program untuk mendukung kegiatan sanitasi yang dilaksanakan lembaga swadaya *High Five*. Forum ini merupakan bukti nyata bahwa para Jurnalis Makassar benar-benar peduli atas permasalahan sanitasi. Forum ini mengadakan acara tahunan yang diikuti oleh jurnalis dari berbagai media. Tema yang diangkat berbeda setiap tahunnya. Kegiatannya pun beraneka ragam seperti pelatihan jurnalistik, games, serta pembuatan berita menyangkut sanitasi.

Dengan adanya forum ini diharapkan semakin banyak jurnalis yang tergerak mengangkat topik sanitasi dan segala permasalahannya. Pada akhirnya, meningkatnya liputan media diharapkan mendorong pemerintah daerah dan masyarakat luas untuk bergerak memperbaiki kondisi sanitasi.



Foto : www.fjsmakassar.blogspot.com



Pelatihan Jurnalis sanitasi bukanlah sekedar pelatihan jurnalistik biasa, tapi lebih spesifik, dimana para jurnalis, diberikan wawasan lebih tentang sanitasi dan persoalan yang ada di sekitarnya. Setelah mengikuti pelatihan ini dihapkan para jurnalis bisa bekerjasama untuk mengkampanyekan program sanitasi kepada masyarakat umum dengan lebih banyak lagi membuat tulisan-tulisan terkait sanitasi dan menampilkannya di media massa, baik media televisi, radio maupun media cetak.



Foto : mediatwanglamba.blogspot.com

Tak hanya untuk wartawan, pelatihan jurnalistik juga diadakan untuk warga. Kegiatan tersebut sebagai bentuk mencerdaskan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memahami dunia jurnalistik, khususnya di bidang sanitasi. Dalam kegiatan ini sejumlah warga diajarkan cara menulis yang baik sebagaimana jurnalis yang sesungguhnya dan juga cara mempublikasi tulisan mereka di media sosial seperti Facebook, twitter, dan blog yang sudah mereka buat sendiri.

Konferensi pers terbukti merupakan ajang efektif untuk komunikasi antara pengelola program dengan awak media. Acara tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengumumkan atau menjelaskan berbagai informasi terkait urusan air minum atau sanitasi. Paket informasi dan lembar press release dibagikan agar media mendapat bekal tertulis tentang pesan utama dan data pendukung yang dapat mereka pakai untuk penulisan berita. Selain kompetensi di bidangnya, para narasumber harus tokoh-tokoh yang tidak canggung lagi berbicara di depan media. Semua pertanyaan media masa perlu dijawab dengan lengkap, baik yang bersifat klarifikasi atau pendalaman informasi.



Foto : Koleksi Pokja AMPL



Foto : Koleksi Istimewa



Hubungan baik dijaga dengan para pengelola stasiun TV agar mereka selalu memberi kesempatan bagi para pelaku pembangunan air minum dan sanitasi untuk tampil dan melakukan dialog di televisi. Tampak dalam foto-foto, wawancara yang dilakukan stasiun TV ke Iman Ernawi (Direktur Jenderal Cipta Karya), Dedy Supriadi Priatna (Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, BAPPENAS), Danny Sutjiono (Direktur Pengembangan Air Minum, Ditjen Cipta Karya) dan Maliki Moersjid (Direktur PPLP, Ditjen Cipta Karya).

Majalah PERCIK diterbitkan secara berkala oleh Pokja AMPL Nasional sebagai media advokasi dan penyampaian informasi ke para pemerhati pembangunan air minum dan sanitasi. Majalah ini berisi berbagai berita dan artikel yang terkait dengan upaya pembangunan di kedua sektor itu. Majalah ini dibagikan gratis ke pihak-pihak yang membutuhkannya, baik itu instansi pemerintah, organisasi non pemerintah, lembaga donor maupun lembaga pendidikan. Secara berkala, Pokja AMPL juga menerbitkan PERCIK Yuniior yang ditujukan untuk para pelajar SD dan SMP.



Foto : Koleksi Qipra



Foto : Koleksi Pokja AMPL



Media masa perlu selalu diberi kesempatan untuk memperoleh informasi. Penting bagi para awak media untuk memperoleh informasi, tetapi lebih penting lagi bagi pelaku pembangunan air minum dan sanitasi agar informasi kegiatannya tersebar ke publik. Hampir dalam setiap acara seminar, lokakarya serta pameran air minum dan sanitasi, para wartawan selalu diberi akses untuk mewawancara tokoh-tokoh yang mereka inginkan. Wawancara dapat terjadi dimanapun dan kapanpun, tidak jarang juga wawancara berlangsung mendadak. Tampak dalam foto, Menteri KLH Balthasar Kambuaya dan Menteri Keuangan Agus Martowardojo sedang memberi keterangan terkait impor sampah ilegal. Foto-foto samping dari atas menunjukkan wawancara yang dilakukan oleh (berikut jabatan saat wawancara dilakukan) Joko Kirmanto (Menteri PU), Nugroho Tri Utomo (Direktur Perumahan dan Permukiman), Oswar Mungkasa (Ketua Pokja AMPL), dan Maraita Listyasari (Kepala Harian Pokja AMPL).

Foto : Koleksi KLH



Foto : Koleksi Pokja AMPL

Foto : Koleksi Istimewa

# Pacu dengan Penghargaan

Apresiasi perlu diberikan untuk mereka yang berbuat lebih baik dibanding pihak-pihak lain. Tidak perlu dalam bentuk materi, tanda apresiasi atau penghargaan dalam bentuk piala maupun surat sudah cukup. Yang penting, hasil kerja mereka dihargai pihak-pihak lain. Yang juga penting, keunggulan mereka diketahui publik sehingga profil mereka meningkat di mata publik. Keberhasilan meraih penghargaan membuat mereka terpacu untuk berbuat lebih baik. Sebaliknya, mereka yang belum mendapat penghargaan tentunya akan terpacu untuk mengejar ketertinggalannya. Untuk bidang air minum dan sanitasi, ada banyak penghargaan yang disediakan untuk mengapresiasi upaya, kinerja atau pencapaian tinggi dari individu, organisasi atau wilayah.



Piala Adipura merupakan penghargaan tertinggi untuk kota-kota Indonesia yang berhasil menciptakan kebersihan kotanya dan melakukan pengelolaan lingkungannya dengan baik. Program Adipura diselenggarakan tiap tahun sejak tahun 1986 oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Walau awalnya difokuskan untuk "Kota Bersih dan Teduh", penilaian Adipura saat ini juga mencakup indikator pengendalian pencemaran air dan udara. Program ini berhasil memacu kota-kota Indonesia untuk memperbaiki kinerja pengelolaan sampah dan lingkungannya. Penghargaan Adipura Kencana dianugerahkan ke kota yang telah lima kali meraih Piala Adipura berturut-turut. Tampak dalam foto, Presiden RI saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono menyerahkan piala Anugerah Adipura ke Plt. Walikota Parepare, H. Sjamsu Alam di tahun 2012. Saat itu, Kota Parepare sudah memenangkan Piala Adipura ke-8 kalinya secara berturut-turut untuk Kategori Kota Sedang.



Penghargaan Sanipura diberikan kepada kabupaten dan kota yang telah menunjukkan kinerja yang baik dalam pembangunan sanitasi di wilayahnya. Misalnya, kabupaten dan kota yang terus meningkatkan alokasi dana pembangunan sanitasi, serta yang menerapkan inovasi-inovasi dalam penyediaan layanan sanitasi. Sanipura Award pertama kali dianugerahkan pada acara CSS XIV di Bandung pada tahun 2014. Untuk menyelenggarakan penghargaan Sanipura, AKKOPSI membentuk Tim Kerja *National Sanitation City Rating* (NSCR) yang menilai dan memverifikasi kinerja kabupaten dan kota. Sanipura Award diyakini dapat menumbuhkan persaingan positif antar kabupaten dan kota Indonesia dalam pembangunan sanitasi. Tampak dalam foto, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat saat itu, Agung Laksono sedang menyerahkan penghargaan Sanipura Award ke Walikota Depok, Nur Mahmudi Ismail. Kota Depok berhasil mendapatkan tiga Sanipura Award, yaitu untuk kategori NAWASIS, kategori Komitmen Pendanaan dan kategori Inovasi.



Penghargaan Adiwiyata diberikan ke SD, SMP, SMU dan SMK yang dinilai berhasil menciptakan lingkungan sekolah yang sehat. Penghargaan ini mendorong warga-warga sekolah untuk lebih bertanggung jawab dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui tata sekolah yang baik. Komponen yang dinilai termasuk kebijakan berwawasan lingkungan, kurikulum berbasis lingkungan, kegiatan lingkungan partisipatif dan pengelolaan sarana pendukung ramah lingkungan. Penghargaan ini diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Pendidikan Nasional. Di tahun 2014 ini sebanyak 47 SD, SMP, SMA dan sederajat menerima penghargaan Sekolah Adiwiyata Mandiri. Tampak dalam foto, Presiden RI saat itu, Soesilo Bambang Yudhoyono sedang menyerahkan penghargaan Adiwiyata Mandiri ke Kepala Sekolah SMAN 3 Sengkang Unggulan Kabupaten Wajo di Istana Negara pada Juni 2013.

AMPL Award diberikan kepada pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan kelompok masyarakat yang telah memberikan kontribusi penting, khas dan inovatif pada proses pengembangan layanan air minum dan sanitasi di daerahnya. AMPL Award diselenggarakan oleh Pokja AMPL Nasional dengan didukung mitra-mitrananya. AMPL Award 2013 diberikan kepada 12 pemenang, terdiri atas 3 provinsi, 5 kabupaten/kota dan 4 kelompok masyarakat. Piala penghargaan diserahkan oleh Kepala Bappenas saat itu, Armida S. Alisjahbana sebagai bagian dari acara KSAN 2013. Tampak dalam foto, Ketua Pokja AMPL Nasional, Nugroho Tri Utomo (tengah) berfoto bersama pengurus Asosiasi Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum dan Sanitasi (HIPPAMS) Kabupaten Lamongan yang mendapat AMPL Awards 2013 atas keberhasilan mereka mensinergikan layanan air bersih dan sanitasi di wilayah operasinya.



Foto : [www.iuwash.or.id](http://www.iuwash.or.id)



Foto : [www.payakumbuhkota.go.id](http://www.payakumbuhkota.go.id)

Perpamsi Award diberikan kepada PDAM-PDAM sehat yang mampu memberikan layanan air minum yang inovatif, sesuai kategori skala kota yang dilayani. Penghargaan yang diselenggarakan dua tahunan sekali ini berhasil memotivasi jajaran staf PDAM untuk terus meningkatkan pelayanan di wilayahnya masing-masing. Tampak dalam foto, Ketua Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) Tamin Zakaria mewakili Menteri Pekerjaan Umum sedang memberikan Perpamsi Award di tahun 2013 ke Direktur Utama PDAM Payakumbuh yang berhasil memenangkannya untuk kategori kota kecil.



Foto : Koleksi Pokja AMPL

Sanitasi Award merupakan penghargaan yang diinisiasi pelaksanaannya oleh AKSANSI (Asosiasi KSM Sanitasi Seluruh Indonesia). Penghargaan di tingkat Propinsi dan Kota/Kabupaten ini diberikan kepada KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) Sanitasi yang berhasil menjaga dan merawat sarana sanitasinya dengan baik. Sanitasi Award mendorong KSM bekerja lebih keras untuk menumbuhkan kesadaran penggunaanya terhadap pentingnya keberlanjutan sarana sanitasi. AKSANSI adalah asosiasi dari KSM-KSM Sanitasi yang dibentuk di tahun 2006 di Yogyakarta untuk mengembangkan kapasitas anggotanya. Kota Surakarta merupakan salah satu kota yang secara rutin menyelenggarakan Sanitasi Award bagi KSM-KSM di daerahnya. Tampak dalam foto, beberapa wakil KSM Surakarta setelah mengikuti lokakarya yang dikaitkan dengan pengumuman Sanitasi Award 2014.



Foto : [www.jpip.or.id](http://www.jpip.or.id)

Grup Jawa Pos melalui yayasannya, yaitu *The Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi (JPIP)* setiap tahun memberikan Otonomi Award ke pemerintah daerah yang dinilai mampu melakukan terobosan dan praktik-praktik penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Salah satu kategori Otonomi Award adalah kategori lingkungan dan sanitasi. Di tahun 2014, Otonomi Award Bidang Sanitasi berhasil dimenangkan oleh Kabupaten Gresik yang dinilai sudah melakukan banyak hal untuk mendukung pembangunan sanitasi di daerahnya. Tampak dalam foto, Wakil Bupati Gresik Mohammad Qosim (kedua dari kanan) berfoto bersama para pemenang Otonomi Award 2014 lainnya.

## PENUTUP

Hampir dua ratus halaman, buku ini telah menampilkan betapa besar upaya kemajuan di bidang air minum dan sanitasi. Kita patut berbangga dengan prestasi yang telah dicapai. Namun kita patut juga ingat pada tugas selanjutnya, yaitu mencapai sasaran *Universal Access* di tahun 2019. Berarti setiap tahunnya, kita harus menambah akses sanitasi layak bagi 8% penduduk Indonesia. Kerja keras dan cerdas masih menanti kita bersama.

Berbekal pengalaman dan peningkatan pengetahuan, kita harus yakin bahwa kita sanggup mencapai sasaran tersebut. Telah banyak kisah sukses yang dapat dicontoh, telah banyak pilihan teknologi, pendekatan sosial dan model pembiayaan yang bisa direplikasi. Ajang pertukaran informasi juga telah menjamur dengan adanya kelompok kerja dan asosiasi untuk berbagai kalangan. Tidak ada alasan untuk ragu dengan kemampuan kita.

Tinggal kita memanfaatkan kendaraan yang telah dibangun serta semangat kolaborasi yang telah terasah selama dekade terakhir. Kita bisa mengajak lebih banyak mitra untuk menggarap daerah-daerah yang belum memiliki akses memadai, baik dari pihak swasta, lembaga swadaya masyarakat, lembaga asing maupun pemerintah daerah.

Akhir kata, kisah sektor air minum dan sanitasi diharapkan memberi inspirasi bagi sektor pembangunan lain, yang juga menghadapi tantangan multidimensional. Sebagian pendekatan dan terobosan dapat direplikasi atau, paling tidak, menjadi dasar pemikiran untuk mengembangkan gagasan baru. Catatan yang sangat kuat adalah betapa kreatifnya bangsa ini; dan kreatifitas ini dapat didaya-gunakan untuk menghadapi segala bentuk tantangan.

Terima kasih.

# Daftar Singkatan

3R	: <i>Reuse, Reduce, Recycle</i>	NAWASIS	: <i>National Water Supply and Sanitation Information Services</i>
AKKOPSI	: Aliansi Kabupaten/Kota Peduli Sanitasi	OBA	: <i>Output Based Aid</i>
AMPL	: Air Minum dan Penyehatan Lingkungan	ODF	: <i>Open Defecation Free</i>
AMPL-BM	: Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat	P2KP	: Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
APBD	: Anggaran Pendapatan Belanja Daerah	PAH	: Penampung Air Hujan
APBN	: Anggaran Pendapatan Belanja Negara	PAMSIMAS	: Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat
APPSANI	: Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Sanitasi Indonesia	PDAM	: Perusahaan Daerah Air Minum
BABS	: Buang Air Besar Sembarangan	PERPAMSI	: Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia
BAPPEDA	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	PHBS	: Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat
BAPPENAS	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	PKK	: Pembinaan Kesejahteraan Keluarga
BIC	: <i>Business Inovation Centre</i>	POKJA	: Kelompok Kerja
BORDA	: <i>Bremen Overseas Research and Development Association</i>	PPLP	: Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman
BPSPAM	: Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	PPSP	: Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman
CLTS	: <i>Community-Led Total Sanitation</i>	RPAM	: Rencana Pengamanan Air Minum
CSR	: <i>Corporate Social Responsibility</i>	RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
CSS	: <i>City Sanitation Summit</i>	SANIMAS	: Sanitasi Berbasis Masyarakat
CTPS	: Cuci Tangan Pakai Sabun	SLBM	: Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat
DAK	: Dana Alokasi Khusus	SPBM	: Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat
DSDP	: <i>Denpasar Sewerage Development Program</i>	SSK	: Strategi Sanitasi Kota
ESP	: <i>Environmental Services Program</i>	STBM	: Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
FJS	: Forum Jurnalis Sanitasi	TPA	: Tempat Pemrosesan Akhir
HAKLI	: Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia	TPS	: Tempat Pembuangan Sementara
HIPPAM	: Himpunan Penduduk Pengguna Air Minum	TPST	: Tempat Pengolahan Sampah Terpadu
IATPI	: Ikatan Ahli Teknik Penyehatan dan Teknik Lingkungan Indonesia	TTG	: Teknologi Tepat Guna
IPAL	: Instalasi Pengolahan Air Limbah	UNCED	: <i>United Nations Conference on Environment and Development</i>
IPLT	: Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja	UNEP	: <i>United Nation Environment Programme</i>
ISSDP	: <i>Indonesian Sanitation Sector Development Program</i>	UNICEF	: <i>United Nations Childrens Fund</i>
IUWASH	: <i>Indonesia Urban Water Sanitation and Hygiene</i>	USDP	: <i>Urban Sector Development Program</i>
IWWEF	: <i>Water and Wastewater Expo and Forum</i>	USRI	: <i>Urban Sanitation and Rural Infrastructure</i>
KfW	: <i>Kreditanstalt für Wiederaufbau</i>	WASH	: <i>Water, Sanitation and Hygiene</i>
KPS	: Kerjasama Pemerintah dan Swasta	WASPOLA	: <i>Water Supply and Sanitation Policy Formulation and Action Planning</i>
KSAN	: Konferensi Sanitasi dan Air Minum Nasional	WSLIC	: <i>Water Supply and Sanitation for Low Income Communities</i>
KSN	: Konferensi Sanitasi Nasional	WSP-EAP	: <i>Water and Sanitation Program – East Asia and Pasific Region</i>
LPJKN	: Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional	ZAMP	: Zona Air Minum Prima
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat		
MCK	: Mandi Cuci Kakus		
MDGs	: <i>Millenium Development Goals</i>		

Didukung oleh:



WTC 6, 10th Floor  
Jl. Jend. Sudirman Kav.31  
Jakarta 12920  
Telp: (62-21) 29968043

ISSN 978-979-17330-9-6



Diterbitkan Oleh:



Sekretariat Kelompok Kerja  
Jl. Lembang No. 35, Menteng  
Jakarta - Indonesia 10310  
telp/fax (62-21) 31904113 / 31903909